

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Dampak Transformasi Gerakan Sosial Petani Koka Penduduk Asli  
(Cocaleros) Menjadi Partai Politik Terhadap Penguatan Proses  
Demokratisasi di Bolivia Studi Kasus: Kemenangan Partai MAS  
(Movimiento Al Socialismo) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2005**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik**

**Zikril Hakim  
0606095304**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
SARJANA REGULER  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
DEPOK  
DESEMBER 2010**

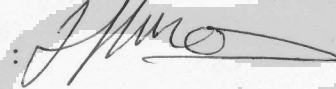
## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zikril Hakim

NPM : 0606095304

Tanda Tangan



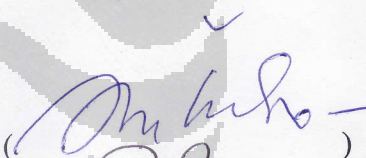
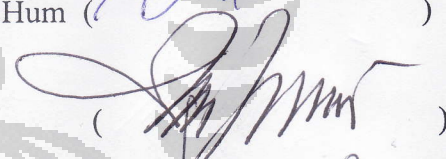
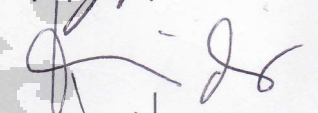

Tanggal : 28 Desember 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Zikril Hakim  
NPM : 0606095304  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Dampak Transformasi Gerakan Sosial Petani Koka Penduduk Asli (*Cocaleros*) Menjadi Partai Politik Terhadap Penguatan Proses Demokratisasi di Bolivia, Studi Kasus: Kemenangan Partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2005

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial, pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Nur Iman Subono, M.Hum (  )  
Penguji : Drs. J.F. Warrouw, MA (  )  
Ketua Sidang : Evida Kartini, S.IP, M.SI (  )  
Sekretaris Sidang : Hurriyah, S.Sos, IMAS (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 28 Desember 2010

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas segala rahmat, kasih sayang dan ridha-Nya skripsi ini akhirnya dapat selesai. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W, suri tauladan yang sempurna bagi ummat manusia serta pemberi syafaat kelak di hari akhir. Skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis terhadap dinamika sosial-politik di Bolivia. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan banyak pihak.

Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Cholid Badri dan Corneliati. Kasih sayang, jasa dan pengorbanan mereka tidak pernah dapat penulis balas dengan apapun di dunia ini. Terima kasih kepada kakak-kakak penulis, Primawan Badri, Kharisma Rani Badri dan Rendi Febrian Badri yang telah menjadi pendukung utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Drs. Nur Iman Subono, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, kesabaran dan ilmunya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mas Boni selaku dosen pembimbing penulis telah berperan tidak saja sebagai pendidik yang berdedikasi tinggi tetapi juga sebagai motivator yang baik bagi para anak didiknya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada penguji sidang, Drs. J.F. Warouw, MA atas saran dan kritiknya yang bersifat membangun dalam penulisan skripsi ini,

Terima kasih kepada Mas Cecep Hidayat, S.IP, IMRI selaku Ketua Program Studi Sarjana Reguler Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Mbak Evida Kartini, S.IP, M.Si serta Mbak Hurriyah S.Sos., IMAS selaku Sekretaris Program Studi Departemen Ilmu Politik. Juga kepada Mbak Sri Budi Eko Wardhani, M.Si selaku pembimbing akademis atas dukungan moral dan transfer ilmu dari beliau yang sangat berguna bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP UI, termasuk Mas Jemi Irwansyah M.A, sebagai dosen politik Amerika Latin atas transfer ilmu dan wawasan yang sangat berguna bagi penulis.

Terima kasih kepada sahabat-sahabatku: Jody Muhamrezky, Kania Ayunintyas, Paddy Paulus atas dukungan moril yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2006, Andi Arreiza dan Devina atas segala dukungan moral dan bantuan mereka yang tidak mungkin penulis lupakan, juga kepada kawan-kawan prodi ilmu politik lainnya: Revy Adriade, Adetya Ayu, Atik Arfan, Alvin, Nur Alia Pariwita, Redi Kalingga, Ayu Amrita Sari dan Windy Martha Lopho. Juga terima kasih kepada Tiara Sarah, Tri Agustina, Dian Wahyuni, Dewi Arum, Hayati S., Kadek Dwita, Nadine Ramelan, Yarra Regita, Nilam Nirmala, Eva Dwi, Intan Reza, Yoga Kusuma, Alif Panji Purna, Dalili Pranowo, Rifa Mulyawan, Pria Bimantara., Rangga Pria Lesmana, Indra Pradana, Ari Setio, Hari Prasetyo, Ratno Pajar, Sonny Sanjaya., Adityo Rahmat, Yogi Indra, Imam Suherman., Mulki Maulana serta kawan-kawan program studi ilmu politik lainnya yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu per satu. Selama 4 tahun lebih, baik suka maupun duka kita lewati bersama. Tentunya kenangan ini akan tetap terpatri dalam sanubari penulis untuk selama-lamanya.

Terima kasih kepada kawan-kawan kelompok diskusi Astina : Adityo Anggoro Saragih, Arie Putera, Akbar "Barjow", Pratomo Hartono, Feby Hendola Kaluara, Faisal Komandobat, May Rahmadi, dan kawan-kawan Astina lainnya yang juga telah memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis bahkan disaat-saat penulis putus asa dan merasa tidak sanggup dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada Cak Tarno Institute, termasuk diantaranya Bang Daniel Hutagalung, M.Si atas segala masukan dan kritik beliau terhadap substansi skripsi penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala dan rizki yang setimpal.

Depok, Desember 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikril Hakin  
NPM : 0606095304  
Program Studi : Ilmu Politik  
Departemen : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

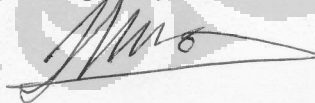
demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Dampak Transformasi Gerakan Sosial Petani Koka Penduduk Asli (*Cocaleros*)  
Menjadi Partai Politik Terhadap Penguatan Proses Demokratisasi di Bolivia  
Studi Kasus: Kemenangan Partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2005**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok  
Pada tanggal: 28 Desember 2010  
Yang menyatakan



(Zikril Hakim)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak transformasi gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) menjadi partai politik *Movimiento Al Socialismo* (MAS) terhadap penguatan proses demokratisasi di Bolivia. Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan mengenai krisis representasi demokrasi perwakilan yang terjadi di Bolivia sejak tahun 1985. Krisis representasi demokrasi perwakilan ini ditunjukkan dengan adanya oligarki partai politik tradisional dari kalangan kulit putih yang bersifat sentralistik dan gagal membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat Bolivia, khususnya dari kalangan penduduk asli. Ketimpangan sosial dan minimnya representasi politik yang dialami oleh penduduk asli Bolivia menimbulkan munculnya berbagai gerakan sosial sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah Bolivia. Salah satunya adalah *Cocaleros*, gerakan petani koka penduduk asli yang berusaha melawan kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka dengan dalih perang melawan narkoba. *Cocaleros* akhirnya bertransformasi menjadi partai politik dan terbukti menuai kesuksesan dengan terpilihnya Evo Morales sebagai presiden Bolivia yang pertama dari kalangan *indigenous* lewat pemilihan umum tahun 2005. Penelitian ini difokuskan untuk melihat dampak kemenangan partai etnik MAS terhadap proses demokratisasi di Bolivia dan upaya-upaya dari pemerintahan baru Bolivia dibawah partai MAS dalam menata ulang bangunan demokrasi Bolivia yang sempat rapuh akibat krisis legitimasi dan kepercayaan dari masyarakatnya.

**Kata Kunci: Gerakan Sosial, Penduduk Asli, Koka, Partai Etnik, Demokratisasi**

## ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the impact of *indigenous* social movement transformation of becoming a political party *Movimiento Al Socialismo* (MAS) concerning the democratization process in Bolivia. This study departs from the problems concerning the representation of the crisis of representative democracy in Bolivia since 1985. This representation crisis of the representative democracy was shown by the existence of the white oligarch traditional political party that were too centralized and failed to build a harmonious relationship with Bolivian society, particularly among the indigenous population. Social inequality and lack of political representation faced by indigenous peoples in Bolivia led to the emergence of various social movements as their basis for resistance against the Bolivian government. One of them is *Cocaleros*, movements of indigenous coca farmer who attempted extermination policy against the cultivation of coca plants on the pretext of war against narcotics. *Cocaleros* eventually turned into a political party and proved hugely successful with the election of Evo Morales as Bolivia's first president of indigenous people through general elections in 2005. This study focused on the impact of ethnic party MAS victory towards democratization process and Bolivia's new government effort to rearrange their fragile democratic institution that mostly caused by crisis of legitimacy and lack of trust in the society.

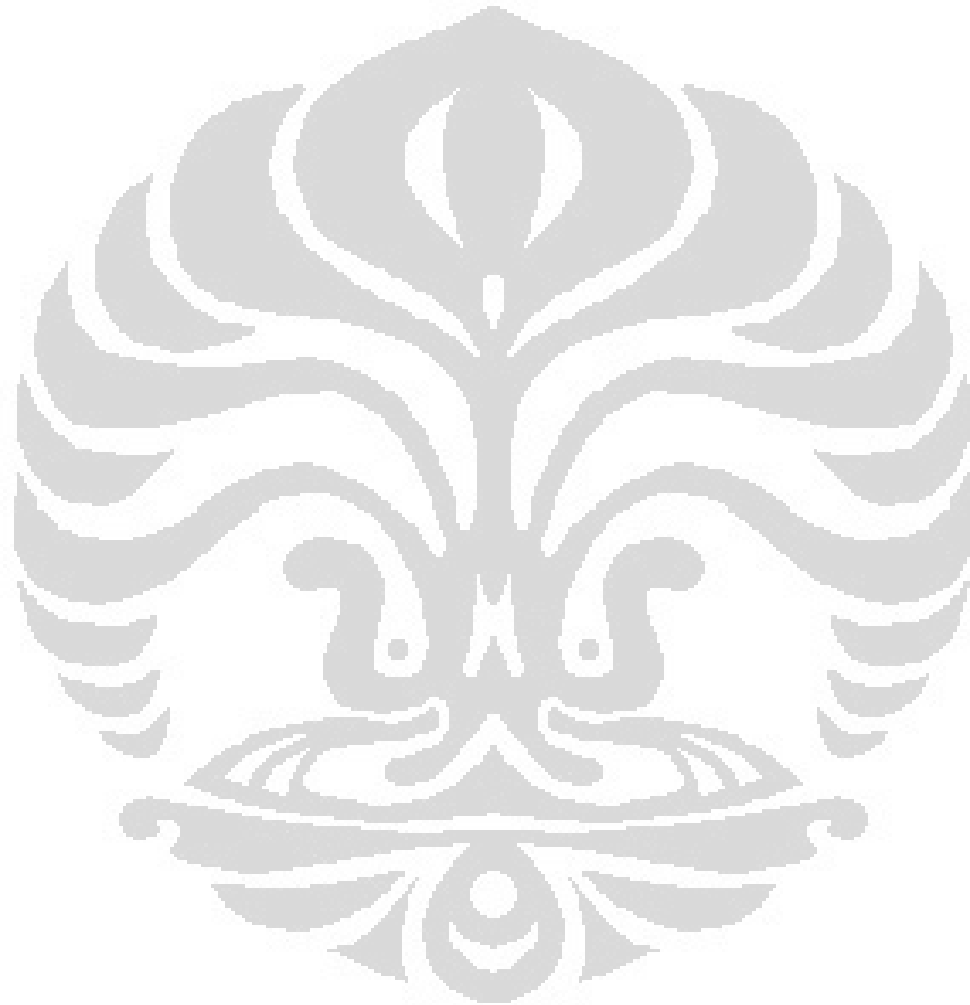
**Key Word: Social Movement, Indigenous, Coca, Ethnic Party, Democratization**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATAPENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Teori.....	12
1.5 Model Analisis.....	17
1.6 Asumsi.....	19
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.8 Sistematika Penulisan.....	21
<b>2. KONTEKS HISTORIS MOBILISASI GERAKAN PENDUDUK ASLI DI BOLIVIA.....</b>	<b>23</b>
2.1 Masa Sebelum Kemerdekaan Bolivia ( 1770-1825).....	24
2.2 Masa Setelah Kemerdekaan Bolivia (1825-1945).....	27
2.3 Masa Revolusi Kelompok Nasionalis Pimpinan MNR (1952-1964).....	31
2.4 Masa Kediktatoran Rezim Militer (1964-1982).....	34
2.5 Masa Setelah Transisi Demokrasi Hingga Penerapan Undang-Undang Partisipasi Populer 1985-1994.....	38
<b>3. KEMUNCULAN GERAKAN PETANI KOKA (COCALEROS) DAN TRANSFORMASINYA MENJADI PARTAI POLITIK.....</b>	<b>44</b>
3.1 Proses Awal Terbentuknya Gerakan Sosial Petani Koka <i>Indigenous (Cocaleros)</i> di Bolivia.....	45
3.2 Intervensi Pemerintah Bolivia Lewat Kebijakan Pemusnahan Budidaya Tanaman Koka.....	51
3.3 Transformasi <i>Cocaleros</i> Menjadi Partai Politik MAS ( <i>Movimiento Al Socialismo</i> ).....	57
3.4 Peranan MAS Dalam Melakukan Mobilisasi <i>Civil Society</i> Melawan Rezim Oligarki Politik Dan Neoliberal Di Bolivia.....	59
3.5 Kemenangan Partai MAS ( <i>Movimiento Al Socialismo</i> ) Dalam Pemilihan Umum Bolivia Tahun 2005.....	68

<b>4. ANALISIS DAMPAK KEMENANGAN PARTAI MAS (<i>MOVIMIENTO AL SOCIALISMO</i>) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGUATAN PROSES DEMOKRATISASI DI BOLIVIA.....</b>	<b>75</b>
4.1 Dampak Kemenangan Partai MAS Dan Kontribusinya Terhadap Proses Demokratisasi di Bolivia.....	75
4.2 Bentuk Kontribusi Partai MAS Dalam Upaya Memperkuat Proses Demokratisasi di Bolivia.....	87
<b>5. KESIMPULAN.....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR SINGKATAN

ADN = Accion Democratica Nationalista  
ASP = Assembly for Sovereignty of People  
BSF = Bolivia Socialist Falange  
CIA = Central Intelligence Agency  
CIDOB = Confederation Indigena del Oriente Boliviano  
COMIBOL = Corporacion Minera de Bolivia  
CRDP = Chapare Regional Development Program  
CSUCTB = Confederation Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia  
COMIBOL = Corporacion Minera de Bolivia  
GDP = Gross Domestic Product  
IMF = International Monetary Fund  
IPSP = The Political Tool for The Sovereignty of Common People  
IU = Izquierda Unida  
LPP = Law of Popular Participation  
MAS = Movimiento Al Socialismo  
MIR = Movimiento de Izquierda Revolutionario  
MNR = Movimiento Nacionalista Revolucionario  
MITKA = Movimiento Indio Tupac Katari  
MNR = Movimiento Nacionalista Revolucionario  
MIR = Movimiento de Izquierda Revolutionario  
NEP = New Economic Policy  
NGO = Non Government Organization  
NHSDA = The National Household Survey on Drugs Abuse  
USAID = US Agency for International Development  
USDEA = United States Drug Enforcement Agency  
YPFB = Yacimiento Petroliferos Fiscales Bolivianos

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Hasil Pemilihan Umum Tingkat Nasional Di Bolivia Tahun 2002.	63
Tabel 3.2	Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Di Bolivia (Sejak 1985) .....	73
Tabel 4.1	Jumlah Keanggotaan Deputi Dan Senat Dari Kalangan <i>Indigenous</i> Dalam Kongres Bolivia (Dalam %) .....	80
Tabel 4.2	Jumlah Undang-Undang Yang Berhasil Disahkan.Kongres Sesuai Dengan Tuntutan Kelompok <i>Indigenous</i> ( Dalam %)..	81
Tabel 4.7	Populasi Penduduk Miskin Yang Terjangkau Program Sosial <i>Juacinto Pinto</i> Dan <i>Renta Dignidad</i> (2006-2008) .....	90

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.3	Jumlah Partisipasi Politik Masyarakat Bolivia Dalam Pemilihan Umum Sejak 1985 (Dalam %).....	84
Bagan 4.4	Tingkat Keefektifan Dalam Sistim Kepartaian Dalam Pemilihan Umum Bolivia (1985-2006).....	85
Bagan 4.5	Tingkat Kepuasan Masyarakat Bolivia Terhadap Institusi Demokrasi .....	86

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.6	Perolehan GDP Bolivia Dari Sektor Hidrokarbon (2000-2009).....	89
------------	--	----

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kawasan Amerika Latin pada akhir dekade 1990-an hingga awal abad ke 21 telah mengalami suatu gelombang perubahan sosial-politik yang ditandai dengan bangkitnya gerakan “Kiri”<sup>1</sup> dan juga naiknya para pemimpin berhaluan “Kiri” atau “Kiri Tengah” ke panggung kekuasaan. Bukti kuatnya terlihat dengan terpilihnya Hugo Chavez sebagai presiden di Venezuela pada pemilihan umum tahun 1998, disusul oleh Luis Ignacio Lula Silva di Brazil dan Nestor Kirchner di Argentina pada tahun 2003, Tabare Vasquez di Uruguay pada tahun 2004, Evo Morales di Bolivia dan Michele Bachelet di Chile pada tahun 2006, Daniel Ortega di Nikaragua dan Rafael Correa di Ekuador pada tahun 2007 hingga Fernando Lugo di Paraguay pada tahun 2008.<sup>2</sup> Perubahan sosial politik yang terjadi di Amerika latin ini sekaligus mematahkan tesis dari Francis Fukuyama dalam bukunya ”*The End of History and The Last Man Stand*”. Fukuyama mengatakan bahwa setelah komunisme ambruk, kapitalisme berjaya dengan mengusung pasar bebas dan demokrasi liberal sebagai ikon ekonomi politiknya dan Amerika Serikat sebagai pengusung utamanya keluar sebagai pemenangnya.<sup>3</sup> Fukuyama juga mengatakan bahwa dengan berakhirnya

<sup>1</sup> Beberapa ilmuwan telah mencoba memberikan definisi mengenai “Kiri” di Amerika Latin. Secara umum “Kiri” di Amerika Latin diartikan sebagai ideologi, politik atau kebijakan yang memiliki karakteristik utama yakni: (1) adanya komitmen terhadap egalitarianism, (2) Pemberdayaan peran negara sebagai pengimbang kekuatan pasar, (3) Mengutamakan partisipasi popular. (Maxwell A. Cameron, *Latin America’s Turning Left: Parties, Populism And Social Movements In The Post-Neoliberal Era*, 2006, hlm. 2). Definisi “Kiri” di Amerika Latin lainnya diutarakan oleh Jorge Casteneda yang menjelaskan bahwa “Kiri” di Amerika Latin adalah: “Ideologi, politik dan kebijakan yang menekankan pada perbaikan kehidupan sosial-ekonomi diluar kebijakan ekonomi yang bersifat ortodok, pemerataan dalam distribusi kemakmuran, kedaulatan negara melawan korporasi internasional serta penerapan demokrasi guna mencapai pemerintahan yang efektif (Jorge Casteneda, *Latin America’s Left Turn, Foreign Affairs*, Vol. 85(3), 2006, hlm. 6).

<sup>2</sup> Emir Sader, “Neoliberalism in Latin America”, dalam *New Left Review* Vol. 5, 2008, hlm. 5-6.

<sup>3</sup> Nur Iman Subono, “Perlawanan “Kiri” Amerika Latin Terhadap Amerika Serikat dalam Era Neoliberalisme”, dalam *Jurnal Politika* Vol.2, No. 1, 2006, hlm. 1.

Komunisme maka ide-ide liberal dan ekonomi pasar telah berhasil menyingkirkan rival berat mereka selama ini dan sekaligus sebagai pertanda berakhirnya sejarah.<sup>4</sup>

Patut untuk diperhatikan bahwa kemunculan pemerintahan-pemerintahan “Kiri” yang terpilih lewat mekanisme pemilihan umum tersebut memiliki beberapa karakteristik yang utama, diantaranya: (1) Perlawanan terhadap kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal khususnya eksploitasi ekonomi terhadap negara-negara yang miskin sebagai dampak langsung dari kebijakan tersebut (2) Mayoritas gerakan dan kepemimpinan “Kiri” di Amerika Latin ini berupaya mengusung suatu bentuk reformasi sosial yang diikuti pula dengan perjuangan terhadap hak-hak masyarakat adat (*indigenous*).<sup>5</sup> Kecenderungan tersebut semakin tampak khususnya pada wilayah-wilayah di kawasan Amerika Latin dengan populasi penduduk asli yang tinggi seperti di Ekuador, Bolivia serta negara bagian Chiapas di Meksiko.<sup>6</sup>

Perjuangan di kalangan penduduk asli (*indigenous*) dan keterkaitannya terhadap bangkitnya kepemimpinan “Kiri” Amerika Latin inilah yang telah dibuktikan di Bolivia dengan kemenangan Evo Morales sebagai presiden pertama dari kelompok penduduk asli (*indigenous*) pada pemilihan umum tahun 2005. Kemenangan Evo Morales beserta instrumen politiknya yakni partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) tentunya menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dengan situasi sosial dan politik di Bolivia. Pertanyaan mendasar tersebut adalah : Mengapa kepemimpinan “Kiri” Amerika Latin yang didentikan perjuangan hak-hak penduduk asli bisa muncul di Bolivia? Dalam menjawab pertanyaan mendasar tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu gambaran umum mengenai negara Bolivia itu sendiri. Bolivia adalah salah satu negara di kawasan Amerika Latin yang memperlihatkan sebuah bentuk perpecahan dalam struktur masyarakatnya. Hal tersebut diakibatkan oleh sejarah panjang diskriminasi ras peninggalan pemerintah kolonial Spanyol serta penjajahan elit internal semenjak Bolivia merdeka pada tahun

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Julia McCall, “Pacha Mama’s Belly: An Analysis of Indigenous Discourse in Modern Bolivia”, dalam Barbara Hogenboom, *Revolutionary Politics : Bolivia New Natural Resource Policy*, (Amsterdam: Center For Latin America Research and Documentations, 2009), hlm. 127 .

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 127.



1885.<sup>7</sup> Ketidakstabilan politik dalam negeri juga kerap terjadi di Bolivia. Dari tahun 1964 hingga tahun 1982 Bolivia telah mengalami serangkaian kudeta dan pengendalian pemerintahan dibawah rezim militer sayap kanan.<sup>8</sup>

Bolivia juga memperlihatkan diri sebagai negara dengan kasus nyata mengenai relasi antara kemiskinan dan ketimpangan sosial-politik dengan mayoritas penduduk asli (*indigenos*).<sup>9</sup> Sebagai catatan penting, keterpinggiran penduduk asli dari dinamika pembangunan sosial politik dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari permasalahan mengenai krisis representasi demokrasi yang terjadi dalam pemerintahan Bolivia. Permasalahan inilah yang melanda hampir seluruh kawasan Amerika Latin terutama negara-negara di kawasan Andes seperti Bolivia, Venezuela, Ekuador dan Peru setelah bergulirnya gelombang transisi demokrasi di berbagai belahan dunia pada dekade 1980-an.<sup>10</sup> Bolivia sendiri semenjak tahun 1985 menerapkan sistem multipartai dengan kekuatan tiga partai utama yang beraliansi memegang tampuk pemerintahan secara bergantian. Partai-partai utama yang beraliansi tersebut antara lain: partai MNR (*Movimiento Nacionalista Revolucionario*), partai MIR (*Movimiento de Izquierda Revolucionario*) atau *Revolutionary Left Movement*) dan juga partai ADN (*Accion Democratica Nacionalista*).<sup>11</sup> Ketiga partai "tradisional" di Bolivia ini memiliki karakteristik yang sama yakni: menerapkan praktik klientelisme dan patronase politik, meningkatkan peranan kaum teknokrat, kebijakan yang bersifat *top-down* (dari atas ke bawah), dan mengikuti agenda kebijakan berkarakteristik neoliberal dari agen-agen internasional khususnya Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya.<sup>12</sup> Partai-partai tradisional tersebut juga mencerminkan buruknya prestise dan kepopuleran partai-partai politik Bolivia karena mereka tetap mempertahankan bentuk pemerintahan yang

<sup>7</sup> Jeffrey R. Webber, "Left Indegenous Struggles in Bolivia: Searching For Revolutionary Democracy", dalam *Monthly Review*, Vol. 57, no.4, 2005, diunduh dalam situs:

<http://www.monthlyreview.org/0905webber.htm>, pada tanggal 30 Maret 2009, pukul: 22:01 WIB

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>9</sup> McCall, *op.cit.*, hlm. 127.

<sup>10</sup> Scott Mainwaring, *The Crisis of Democratic Representation in The Andes* (California: Stanford University Press, 2006), hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>12</sup> Denis Lucy Avile's Irahola, *Popular Participation, Decentralization, and Local Power Relation in Bolivia*, (Gottingen: Cuvillier Verlag Press, 2005), hlm.65.

vertikal, sentralistik dan berbagai praktik klientelisme oleh pemimpin-pemimpinnya yang dengan segala cara berusaha mencegah perbaikan internal dan proses demokratisasi di Bolivia.<sup>13</sup> Tidak hanya itu saja, elit-elit partai tradisional tersebut juga melakukan berbagai tindakan yang semakin memperburuk citra partai politik. Banyak dari anggota-anggota parlemen yang memperkaya diri dengan gaji mereka yang sudah tinggi, pengeluaran yang berlebihan, maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>14</sup>

Krisis representasi demokrasi di Bolivia juga ditunjukkan dengan ketidakmampuan elit-elit partai tradisional yang ada di dalam pemerintahan Bolivia untuk menjembatani kepentingan dan aspirasi dengan kelompok-kelompok dalam struktur masyarakat khususnya penduduk asli. Dalam catatan panjang sejarah berdirinya negara Bolivia, penduduk asli justru menjadi kelompok yang diabaikan dalam proses demokrasi yang bersifat deliberatif dan pembuatan kebijakan dalam pemerintahan.<sup>15</sup> Hal tersebut ditegaskan oleh ilmuwan politik Ton Salman yang melihat bahwa telah terjadi hubungan yang bersifat antagonistik antara populasi masyarakat dengan para elit pemerintahan Bolivia. Salman menambahkan bahwa sejarah panjang terpinggirnya mayoritas penduduk asli dari upaya mempengaruhi konstelasi politik nyata di Bolivia telah berakibat meskipun disatu sisi demokrasi yang bersifat prosedural telah dijalankan akan tetapi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri.<sup>16</sup> Buruknya representasi demokrasi yang dikombinasikan dengan praktik korupsi, klientelisme dan oligarki kepartaian telah membawa perpecahan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok di masyarakat (*civil society*). Kelompok-kelompok dalam masyarakat juga tidak mampu membangun blok politik alternatif diakibatkan mereka tidak dapat mengartikulasikan

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Gabriela Hoberman, "Politics of Dealignment and Ethnic Parties in Bolivia", makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional MPSA, Palmer House Hotel, Hilton, Chicago, Illinois, 2008, hlm. 9 diunduh pada situs : [http://www.allacademic.com/meta/p268410\\_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p268410_index.html)>, pada tanggal 30 Maret 2009, pukul: 22.42 WIB.

<sup>16</sup> Sian Lazar, John Andrew McNeish, "The Millions Return? Democracy in Bolivia at the Start of the Twenty First Century", dalam *Bulletin of Latin America Research*, Vol.25, No.2, hlm.158. Diunduh pada situs: <http://www.cmi.no/publications/file/2450-the-millions-return.pdf>, pada tanggal 30 Maret 2009, pukul: 23.10 WIB.

kepentingan, merumuskan keputusan yang bersifat strategis hingga upaya bernegosiasi dengan anggota-anggota dalam struktur pemerintahan. Konsekuensi yang ditimbulkan dari akibat-akibat tersebut adalah apa yang distilahkan oleh Salman sebagai kebuntuan demokrasi di Bolivia.<sup>17</sup>

Praktik oligarki partai politik tradisional dan buruknya representasi demokrasi bagi warga negara Bolivia khususnya penduduk asli semakin diperparah dengan kebijakan berkarakteristik neoliberal yang dilaksanakan oleh ketiga partai tradisional tersebut sejak tahun 1985 hingga tahun 2005. Pada tahun 1985 ditengah-tengah kondisi hutang dalam negeri yang mencapai US\$ 4 miliar serta laju inflasi yang sangat tinggi, pemerintah Bolivia yang terdiri dari gabungan partai politik tradisional pimpinan MNR (*Movimiento Nacional Revolutionario*) memutuskan untuk melakukan kebijakan ekonomi yang radikal atau *New Economic Policy* (NEP) berdasarkan saran dari Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*).<sup>18</sup> Kebijakan tersebut antara lain : (1) kebijakan devaluasi yang sangat tajam diikuti dengan adopsi yang lebih realistis terhadap laju pertukaran barang dan jasa, (2) Liberalisasi perusahaan milik negara ke tangan pihak swasta dan kebijakan modal lepas guna menarik investor luar negeri, (3) Penghilangan aturan dan subsidi pemerintah dalam sistem perekonomian, (4) Penutupan tambang dan pengurangan subsidi pemerintah di bidang sektor pelayanan publik, tenaga kerja dan program sosial, (5) Pengurangan secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah begitu juga dengan konsumsi pribadi dan publik.<sup>19</sup> Langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintah Bolivia tersebut mengundang decak kagum dari komunitas keuangan internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*) atau Bank Dunia (*World Bank*). Mereka memuji Bolivia sebagai salah satu negara yang dianggap sukses menjalankan program penyesuaian ekonomi (*economic adjustment*) di era setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Namun pada kenyataannya, langkah-langkah yang dilakukan oleh

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.158.

<sup>18</sup> James Petras, Henry Veltmeyer, *Social Movement and State Power :Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador* (London: Pluto Press, 2005), hlm. 183.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

gabungan partai politik tradisional tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja dan upaya menghapuskan kemiskinan di Bolivia.

Buktinya, dalam *survey* yang dilakukan tahun 2002, Bolivia tercatat sebagai negara dengan tingkat ketimpangan sosial tertinggi di kawasan Amerika Latin dan menempati urutan ketujuh dari negara-negara dengan tingkat ketimpangan sosial tertinggi di dunia.<sup>20</sup> Data dari *World Bank* juga menunjukkan 65% penduduk Bolivia hidup dibawah garis kemiskinan dan 40% diantaranya berada dalam kemiskinan yang sangat ekstrim.<sup>21</sup> Kemiskinan dan ketimpangan sosial terlebih lagi dirasakan oleh kelompok penduduk asli (*indigenous*) yang merupakan penduduk mayoritas di Bolivia. Sebagai catatan penting, Bolivia merupakan negara dengan jumlah penduduk asli (*indigenous*) tertinggi di kawasan Amerika Latin. Dalam sensus penduduk tahun 2001 tercatat hampir dari dua pertiga penduduk Bolivia merupakan penduduk asli yang tersebar diantara 3 suku besar yakni *Quechua* (2,5 juta orang), *Aymara* (2 juta orang), dan *Chiquitano* (180 ribu orang).<sup>22</sup> Namun mayoritas sebagai penduduk tidak diikuti dengan kesejahteraan atau taraf hidup yang layak bagi kelompok *indigenous*. Ironisnya, fakta yang ada justru menunjukkan bahwa kemiskinan tersebut tersebar luas di daerah pedesaan (*rural area*) yang didiami oleh mayoritas masyarakat *indigenous* yakni sebanyak 82,07% penduduk hidup dibawah garis kemiskinan.<sup>23</sup>

Berbagai indikator ketimpangan sosial, politik dan ekonomi yang dirasakan khususnya oleh masyarakat adat tersebut menurut Eduardo Gamarra telah mengakibatkan terjadinya tragedi demokrasi di Bolivia.<sup>24</sup> Tragedi demokrasi di Bolivia tersebut yakni di satu sisi ingin merangkul mayoritas penduduk asli namun di lain pihak gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi mereka.

<sup>20</sup> *Development and Social Statistic in Bolivia*, dalam: <http://www.boliviainfoforum.org.uk/inside-page.asp?section=2&page=3>, diakses tanggal 10 September 2009, pukul 21.14 WIB.

<sup>21</sup> Omar Arias, Marcus Robles, *The Geography of Monetary Poverty in Bolivia: The Lesson of Poverty Maps*, hlm. 69, diunduh pada situs: [http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1092157888460/493860-1192739384563/10412-04\\_p067-089.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1092157888460/493860-1192739384563/10412-04_p067-089.pdf), pada tanggal 9 September 2010, pukul:19: 56 WIB

<sup>22</sup> *Background Note: Bolivia*, diunduh dalam situs: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35751.htm>, pada tanggal 10 September 2009, pukul 21:20 WIB.

<sup>23</sup> Ivan Castellanos, *Extreme Poverty: Vulnerability and Coping Strategies Among Indigenous People in Rural Areas of Bolivia* (Bonn: Bonn University, 2005), hlm.41.

<sup>24</sup> Eduardo Gamarra, *Bolivia on The Brink* (New York: Council on Foreign Relation Inc, 2007), hlm.9.

Kemiskinan, pengangguran dan tereklusinya penduduk asli dalam institusi pemerintahan telah menciptakan negara Bolivia yang terpecah menjadi dua: di satu sisi kelompok masyarakat perkotaan, *mestizo* dan kelompok-kelompok lainnya yang diuntungkan dengan sistem oligarki kepartaian Bolivia juga reformasi ekonomi dan di lain pihak kelompok penduduk asli (*indigenous*), masyarakat *mestizo* yang miskin dan kelompok-kelompok lainnya yang menjadi korban dari kebijakan pembangunan ekonomi.<sup>25</sup>

Bukti kuat adanya krisis representasi demokrasi yang terjadi di Bolivia inilah yang mengakibatkan munculnya berbagai bentuk perlawanan penduduk asli terhadap negara dan struktur sosial yang salah satunya terwujud melalui pendirian gerakan sosial. Suatu fakta yang sangat menarik adalah Bolivia tergolong sebagai negara dengan catatan sejarah perlawanan penduduk asli (*indigenous*) yang cukup kuat.<sup>26</sup> Benih-benih perlawanan penduduk asli terhadap negara dan struktur sosial di Bolivia sudah terlihat terutama sejak era 1970-an dengan hadirnya gerakan Katarista (*Katarista Movement*) yang dipimpin oleh kelompok intelektual suku Aymara.<sup>27</sup> Mereka berusaha untuk memperjuangkan kepentingan kelas-kelas dalam stuktur masyarakat yang terabaikan sekaligus melawan penindasan negara dan stuktur sosial terhadap penduduk asli di Bolivia.<sup>28</sup> Pada dekade 1990-an dan memasuki abad ke 21, perlawanan gerakan sosial penduduk asli beserta komponen gerakan-gerakan sosial lainnya terhadap negara semakin meningkat. Dalam menyuarakan tuntutan menyangkut hak-hak penduduk asli, kelompok miskin perkotaan dan pedesaan, serikat buruh dan organisasi berbasis sosial lainnya, berbagai gerakan sosial termasuk gerakan sosial penduduk asli melakukan berbagai bentuk perlawanan seperti strategi blokade jalan hingga serangkaian protes sosial yang terwujud lewat demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan pemerintah.<sup>29</sup> Bahkan, gerakan sosial penduduk

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>27</sup> Rachel M. Gisselquist, "Ethnicity, Class, and Party System Change in Bolivia", dalam *Tinkazos* Vol.1, No. 18,, 2005, hlm. 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>29</sup> Jennifer M. Cyr, *The Political Party System and Democratic Crisis in Bolivia: El Sistema de Partidos Politicos, Y La Crisis Democratica En Bolivia*, makalah yang disampaikan dalam VII

asli di Bolivia mulai berusaha masuk ke jalur politik dengan mendirikan partai politik dan bertarung dalam kompetisi elektoral (pemilihan umum). Salah satu contohnya adalah *Cocaleros*, gerakan sosial petani koka penduduk asli yang bertransformasi menjadi partai politik yakni MAS (*Movimiento Al Socialismo*) semenjak tahun 1995. Sebagai catatan penting, ada beberapa faktor yang turut mendorong masuknya gerakan sosial penduduk asli ke dalam konstelasi politik lewat pendirian partai politik di Bolivia, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menjadi momentum adalah pelaksanaan undang-undang partisipasi populer (desentralisasi) yang diberlakukan mulai tahun 1995. Undang-undang ini membuka kesempatan bagi organisasi gerakan sosial penduduk asli untuk berpartisipasi dalam arena politik di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, faktor eksternal turut pula memainkan peranan penting yakni gelombang demokratisasi di Negara Dunia Ketiga dengan tuntutan penerapan demokrasi yang bersifat substansial dibandingkan prosedural.<sup>30</sup> Hal ini juga ditandai dengan adanya keinginan mendirikan partai politik yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat tertentu (misalnya penduduk asli atau *indigenous*) sehingga mereka dapat membuat kebijakan yang lebih baik atau sarana penengah konflik.<sup>31</sup>

Bersamaan dengan menguatnya mobilisasi gerakan sosial penduduk asli, kekecewaan dan krisis legitimasi terhadap pemerintah Bolivia semakin terlihat jelas. Krisis legitimasi tersebut mengakibatkan maraknya gelombang demonstrasi masyarakat dan gerakan-gerakan sosial di Bolivia yang berakibat jatuhnya dua presiden Bolivia dalam kurun waktu yang berdekatan yakni pada tahun 2003 dan 2005.<sup>32</sup> Pada pemilihan umum tahun 2002 partai *indigenous* yakni MAS (*Movimiento*

*Congreso Espanol de Ciencia Politica y de la Administracion: Democracia y Buen Gobierno*, hlm. 16, diunduh dalam situs: [http://www.aecpa.es/archivos/congresos/congreso\\_07/area06/GT23/CYRLATIN%28AmericanandCaribbeanCenter-LACCFloridaIntern.pdf](http://www.aecpa.es/archivos/congresos/congreso_07/area06/GT23/CYRLATIN%28AmericanandCaribbeanCenter-LACCFloridaIntern.pdf), pada tanggal 11 April 2010, pukul : 13.32 WIB.

<sup>30</sup>Jeff Haynes, *Democracy and Civil Society in The Third World: Politics and New Political Movement* (Cambridge: Polity Press, 1997), hlm. 78.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

<sup>32</sup>Sven Harten, *Redifining Citizenship-Realising Unthinkable: The Social Movement of Coca Producers and Democracy in Bolivia* (UK:Departement of Government London School of Economics, 2005), hlm.1, diunduh pada situs:



*A Socialismo*) yang bertransformasi dari gerakan sosial petani koka (*Cocaleros*) berhasil memberikan kejutan terhadap dominasi partai politik tradisional dengan menempati peringkat kedua dalam perolehan suara pemilih dengan jumlah suara 20,94%.<sup>33</sup>

Puncak dari rangkaian panjang perjuangan gerakan sosial penduduk asli akhirnya terjadi di Bolivia dengan keberhasilan partai *indigenous* mendobrak dominasi kelompok keturunan kulit putih dan *mestizo* (campuran kulit putih keturunan Spanyol) dalam sistem politik Bolivia. Partai *indigenous* MAS (*Movimiento A Socialismo*) pimpinan Evo Morales yang merupakan partai yang berasal dari gerakan sosial petani koka berhasil memenangkan pemilihan umum Bolivia pada tahun 2005 dengan meraih 53,7 % suara pemilih. Kemenangan Evo Morales dengan partai MAS dinilai sangat bersejarah karena: (1) Dalam konteks Bolivia yang kerap diwarnai ketidakstabilan politik dan buruknya citra partai-partai politik tradisional, yang bahkan tidak pernah memperoleh setengah dari jumlah perolehan suara pemilih, keberhasilan MAS meraih suara mayoritas merupakan sebuah lompatan besar dalam sistem politik Bolivia. Perolehan suara partai MAS dalam pemilihan umum tahun 2005 juga merupakan angka tertinggi semenjak Bolivia mengalami gelombang transisi demokrasi pada tahun 1982. (2) Pemilihan umum tahun 2005 telah membuka lembaran sejarah baru Bolivia karena untuk pertama kalinya wakil dari masyarakat *indigenous* berhasil terpilih sebagai presiden di negara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat namun menjadi kelompok masyarakat yang dimarginalkan dalam sistem politik sejak masa penjajahan Spanyol.<sup>34</sup> Kemenangan partai MAS pimpinan Evo Morales ini sekaligus memberikan pelajaran berharga terhadap negara dan juga sistem politik Bolivia mengenai tantangan intelektual terhadap proses demokratisasi di Bolivia. Pelajaran berharga bagi proses demokratisasi di Bolivia tersebut terkait dengan keberhasilan partai MAS dalam

[http://en.fondazionefeltrinelli.it/dm\\_0/FF/FeltrinelliCmsPortale/0070.pdf](http://en.fondazionefeltrinelli.it/dm_0/FF/FeltrinelliCmsPortale/0070.pdf), pada tanggal 7 April 2010, pukul 17:21 WIB.

<sup>33</sup> Santiago Anria, *Party Politics and The Bolivian Constituent Assembly: MAS Constraints To Become Dominant Party* (Canada: Simon Fraser University, 2008) hlm. 6.

<sup>34</sup> Harten, *loc.cit.*, hlm. 1.

membangun kekuatan sosial dan konstruksi kekuasaan yang langsung berasal dari bawah (masyarakat).<sup>35</sup>

## I.2 Permasalahan Penelitian

Bukti kuat adanya krisis representasi demokrasi yang dihadapi oleh kelompok penduduk asli (*indigenous*) telah mendorong mereka untuk melakukan resistensi atau perlawanan dengan wujudnya yakni gerakan sosial penduduk asli (*indigenous*). Di Bolivia, salah satu gerakan sosial penduduk asli yakni *Cocaleros* (serikat petani koka) berhasil melakukan mobilisasi politik dengan bertransformasi menjadi partai MAS (*Movimiento A Socialismo*). *Cocaleros* sebagai basis awal terbentuknya partai MAS merupakan merupakan gerakan sosial penduduk asli yang didirikan dengan latar belakang perjuangan kelompok petani penanam koka (*indigenous*) dalam menolak pembasmian tanaman koka oleh pemerintah Bolivia yang didukung oleh Amerika Serikat lewat slogan pemberantasan narkoba internasional.<sup>36</sup>

Keberhasilan partai *indigenous* (MAS) memenangkan pemilihan umum tahun 2005 telah menarik minat penulis untuk meneliti faktor-faktor utama yang berperan penting dibalik kesuksesan mobilisasi gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) yang ditunjukkan dengan transformasinya menjadi partai politik MAS. Selain itu penulis tertarik untuk meneliti dampak maupun kontribusi yang dihasilkan dari keberhasilan partai *indigenous* (MAS) yang berkuasa setelah memenangkan pemilihan umum di Bolivia pada tahun 2005 dalam upaya memperkuat proses demokratisasi di Bolivia. Ketertarikan penulis tersebut didasarkan atas fakta sejarah yang terjadi di Amerika Latin bahwa selama beberapa dekade terakhir kelompok penduduk asli telah memainkan peranan sangat penting dalam hal penguatan proses demokratisasi mulai dari tingkat lokal hingga global (dunia).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Francois Polet, *The State of Resistance: Popular Struggles in The Global South* (London: Zed Books, 2007), hlm. 31.

<sup>36</sup> Vibeke Andersson, "Social Movement and Political Strategy: *Cocaleros* in Bolivia", makalah disampaikan dalam kongres tentang gerakan sosial di masa post kolonial, pembangunan dan gerakan perlawanan Negara Selatan, Nottingham, Juni 2008.

<sup>37</sup> William D. Smith, "Multiculturalism, Identity, And The Articulation of Citizenship: "The Indian Question Now", hlm. 1, dalam *Latin America Research Review*, Vol. 42, No. 1, 2007 .

Berdasarkan permasalahan inilah, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Faktor apakah yang berperan penting mendorong kemunculan gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) dan transformasinya menjadi partai politik MAS (*Movimiento Al Socialismo*)?**
- 2. Bagaimanakah peranan gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) beserta pimpinan organisasinya dalam melakukan mobilisasi gerakan sosial sehingga mampu menjadi kekuatan politik yakni partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) yang berhasil memenangkan pemilihan umum di Bolivia pada tahun 2005?**
- 3. Bagaimanakah kontribusi dari kemenangan partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) pada pemilihan umum tahun 2005 terhadap penguatan proses demokratisasi di Bolivia ?**

### **1.3 Tujuan Dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan keberhasilan gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) dalam melakukan mobilisasi politik yang terwujud lewat pendirian partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*). Selain itu penelitian ini mencoba mengkaji dampak dari kemenangan partai MAS dalam pemilihan umum tahun 2005 dan kontribusi pemerintahan partai MAS dibawah presiden Evo Morales dalam upaya memperkuat proses demokratisasi di Bolivia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kajian mengenai politik di kawasan Amerika Latin dan juga gerakan sosial khususnya di kalangan penduduk asli (*indigenous*). Selain itu penelitian ini juga berusaha memperkaya kajian-kajian mengenai politik penduduk asli (*indigenous*) di kawasan Amerika Latin yang telah dilakukan oleh berbagai ilmuwan seperti : Scott Mainwaring, Donna Lee Van Cott, Raul Madrid, dan lain-lainnya.

## 1.4 Kerangka Teori

### 1.4.1. Gerakan Sosial

Para ilmuwan sosial telah menghasilkan pemaparan teoritis menyangkut tema penelitian yang penulis lakukan ini. Perspektif teori yang penulis gunakan terutama didapat dari studi tentang gerakan sosial. Edward F. Borgatta dan Marie L. Borgatta mendefinisikan pengertian dari gerakan sosial sebagai aksi yang dilakukan secara kolektif untuk mempromosikan atau melawan perubahan didalam masyarakat atau suatu kelompok.<sup>38</sup> Dalam pandangan Sidney Tarrow, gerakan sosial merupakan politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.<sup>39</sup> Allan Scott juga memberikan penjelasan bahwa gerakan sosial muncul sebagai akibat dari kegagalan ataupun ketidakmampuan institusi negara menjalankan peranannya sebagai jembatan penghubung aspirasi dan kepentingan masyarakat (*institutions of interest intermediation*). Ketika kelompok kepentingan dan partai politik yang ada tidak mampu merespon tuntutan yang bersifat populer di masyarakat (*popular demand*), gerakan sosial bangkit untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan tersebut.<sup>40</sup>

Munculnya gerakan sosial sebagai suatu aksi kolektif melawan pemerintah inilah yang marak terjadi di Amerika Latin. Menariknya, banyak gerakan-gerakan sosial di Amerika Latin mampu melakukan strategi mobilisasi menjadi gerakan yang bersifat politik seperti mendirikan partai. Salah satu contohnya terjadi di Bolivia dimana gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) bertransformasi

<sup>38</sup> Edgar F. Borgatta, Marie L. Borgatta (et.al.), *Encyclopedia of Sociology. Volume 4* (New York: MacMillan Publishing Company, 1992), hlm.1880.

<sup>39</sup> Fadillah Putra, (et al.), *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, (Malang: Averroes Press, 2006), hlm. 2.

<sup>40</sup> Joe Foweraker, *Theorizing Social Movements* (London: Pluto Press, 1995), hlm.10.

menjadi partai politik dan berhasil memenangkan pemilihan umum tingkat nasional pada tahun 2005. Untuk membantu menganalisis fenomena transformasi gerakan sosial menjadi partai politik seperti di Bolivia, penulis akan menggunakan konsep-konsep dari studi gerakan sosial yakni:

#### **1.4.1.1 Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*)**

Konsep struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) merupakan konsep yang digunakan oleh teoritis gerakan sosial untuk melihat variabel-variabel utama yang dapat mendukung ketepatan waktu (timing) ataupun tingkat kesuksesan mobilisasi suatu gerakan sosial. Kesempatan politik dilihat sebagai dimensi dari kondisi politik yang menyediakan insentif bagi masyarakat untuk melakukan aksi kolektif yang dapat berjalan sukses atau mengalami kegagalan.<sup>41</sup> Variabel-variabel yang dapat mendukung terbukanya kesempatan politik bagi suatu gerakan sosial antara lain : (1) Kemampuan aktor-aktor politik yang ada untuk menjalin aliansi, 2) Perpecahan diantara elit yang berkuasa ataupun stabilitas aliansi internal diantara elit yang berkuasa. 3) Adanya perubahan di suatu negara berikut institusi didalamnya yang dapat membuka akses untuk masuk kedalam institusi politik formal, 4) Pengaruh dari aktor-aktor dan kekuatan sosial internasional, dan 5) penggunaan tindakan represif yang dilakukan oleh negara.<sup>42</sup> Variabel-variabel kesempatan politik tersebut ikut membentuk konteks bagi interaksi strategis dari suatu gerakan sosial baik dengan aliansi maupun lawannya didalam struktur masyarakat (*civil society*) atau negara.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Mark I. Lichbach, "Contending Theories of Contentious Politics and The Structure-Action Problem of Social Order" dalam *Annual Review of Political Science*. 1998. 1:401-24, hlm. 406, diunduh dalam situs: <http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lichbach/publications/lichbachx.98.pdf>, pada tanggal 5 Januari 2011, pukul: 08:55 WIB.

<sup>42</sup> Foweraker, *op.cit*, hlm. 71.

<sup>43</sup> Lichbach, *loc.cit.*, hlm. 406.

#### 1.4.1.2 Mobilisasi Sumberdaya Dan *Framing (Collective Action Frame)* Gerakan Sosial

Dalam konsep mobilisasi sumberdaya gerakan sosial dijelaskan bahwa suatu aksi kolektif sangat sulit untuk dilakukan dan suatu gerakan sosial membutuhkan sumberdaya finansial, organisasi, kultural dan sumber daya manusia untuk membentuk, mempertahankan dan mencapai keefektifan secara politik.<sup>44</sup> Keberlangsungan perlawanan suatu gerakan sosial sangat bergantung pada kemampuan gerakan sosial untuk menciptakan atau mempertahankan dua faktor utama yakni persatuan internal dan dukungan eksternal.<sup>45</sup> Untuk mencegah adanya perpecahan internal dan membentuk kesatuan internal dalam suatu gerakan sosial dibutuhkan adanya suatu identitas kolektif. Pemimpin gerakan sosial harus bisa mengkonstruksi atau membentuk suatu identitas bersama agar dapat memobilisasi aktor-aktor lainnya dalam gerakan sosial untuk melakukan aksi yang bersifat kolektif. Menurut Sidney Tarrow, nasionalisme, etnisitas dan agama dapat menjadi sumberdaya yang mampu memobilisasi aksi kolektif.<sup>46</sup> Dukungan eksternal dapat diperoleh lewat cara meraih dukungan serta menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lain atau meraih simpati dari masyarakat untuk menjaga gerakan sosial dari perubahan yang tidak diinginkan dalam struktur kesempatan politik seperti munculnya rezim represif dan hilangnya dukungan elit politik terhadap gerakan sosial.<sup>47</sup>

Salah satu unsur penting lainnya yang digunakan oleh gerakan sosial untuk meraih dukungan adalah lewat pembentukan *framing* (proses pembedaan). Snow dan Benford menjelaskan terminologi *framing* sebagai upaya strategis dari suatu gerakan sosial untuk mempengaruhi pandangan seseorang terhadap diri dan dunia disekitarnya. Snow dan Benford menyebut hasil dari proses pembentukan framing ini

<sup>44</sup> Foweraker, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>45</sup> Ursula Duran, *The Defence of Coca as a Source of Political Empowerment*, hlm.3, diunduh dalam situs: [www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2010/217\\_589.pdf](http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2010/217_589.pdf), pada tanggal 5 Januari 2011, pukul: 09:16 WIB.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>47</sup> *Ibid.*



sebagai *collective action frame*.<sup>48</sup> Lebih jauh lagi, Snow dan Benford mengidentifikasi proses framing dalam tiga tahapan : 1) *Diagnostic Framing*, yang merujuk pada identifikasi masalah dan pengatribusian atau penimpahan kesalahan dan tanggung jawab kepada aktor-aktor politik, proses dan struktur tertentu. 2) *Prognostic Frame*, merujuk pada proses artikulasi sebagai langkah untuk melakukan kritik terhadap permasalahan yang ada. 3) *Motivational Framing*, merujuk pada alasan untuk terlibat dalam suatu aksi kolektif. Pada umumnya *collective action frame* terbatas pada kepentingan suatu kelompok ataupun tujuan tertentu saja. Namun *collective action frame* ada pula yang bersifat lebih luas dan mampu mempengaruhi aksi kolektif bagi gerakan-gerakan sosial lainnya. Snow dan Benford mendefinisikannya sebagai *masterframes*.<sup>49</sup> Prasyarat untuk memfungsikan *masterframes* sebagai alat bagi aksi kolektif antara lain bersifat inklusif, fleksibel dan memiliki gaung yang luas sehingga mampu menggerakkan aksi kolektif, contohnya permasalahan mengenai keadilan atau hak-hak asasi manusia.<sup>50</sup>

#### **1.4.1.3 Penguatan Demokratisasi**

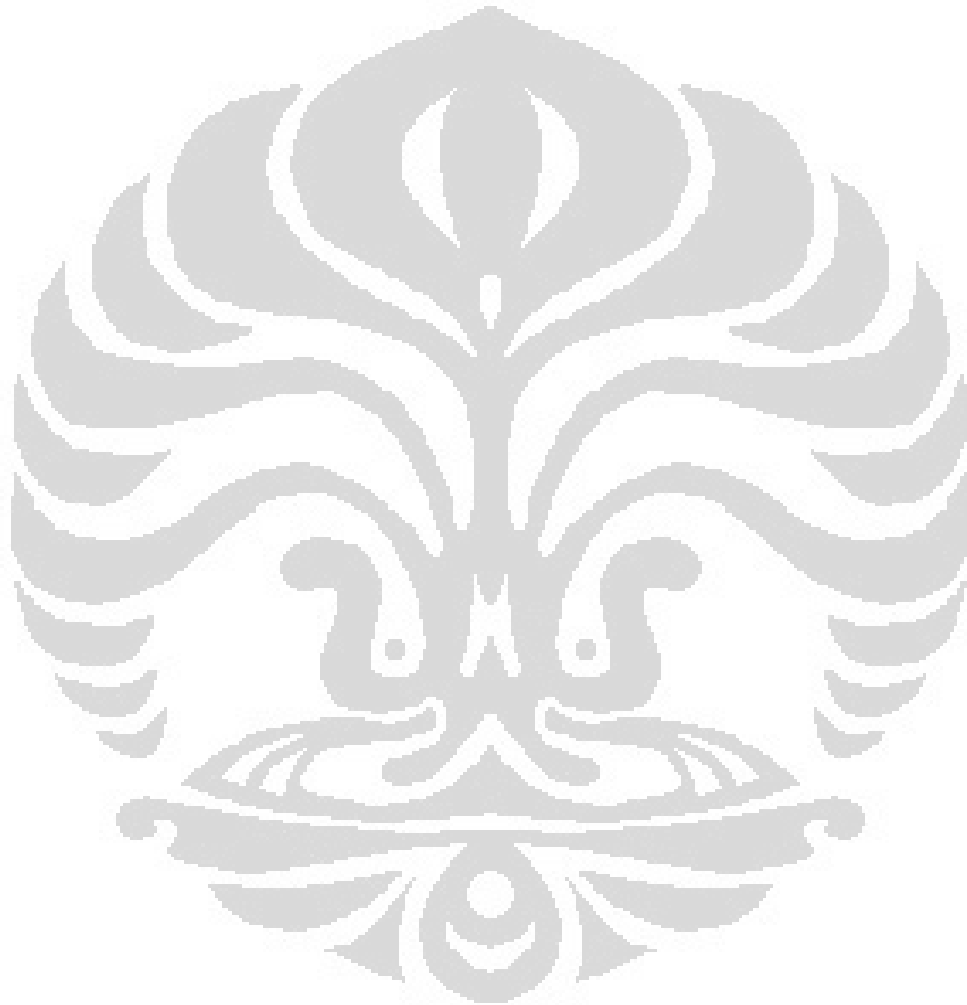
Para ilmuwan politik yang mempelajari studi demokratisasi telah memberikan penjelasan teoritis tentang bagaimana suatu sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik dan stabil hingga dapat menciptakan proses konsolidasi demokrasi. Juan Linz dan Alfred Stepan menjelaskan mengenai prasyarat kondisi yang harus terpenuhi agar institusionalisasi demokrasi dapat berjalan dengan baik. Kondisi-kondisi tersebut antara lain: 1) Pembentukan masyarakat sipil yang independen dan relatif otonom, 2) Hadirnya masyarakat politik yang relatif otonom, 3) Adanya pemerintahan yang mengutamakan pelaksanaan hukum (*government law*), 4) Mempromosikan birokrasi negara yang melayani otoritas demokratik dan hak-hak warga masyarakat, 5)

<sup>48</sup> Suzanne Kruyt, "Between Pachakuti and Another World is Possible: Global and Interactions in Social Movement Frames in Bolivia", *makalah yang dipublikasikan oleh Vrije Univesriteit, Amsterdam Juli, 2006*, hlm. 14, diunduh dalam situs: [chakana.nl/files/pub/Kruyt\\_Localandglobalinteractions\\_2006.pdf](http://chakana.nl/files/pub/Kruyt_Localandglobalinteractions_2006.pdf), pada tanggal 5 Januari 2011, pukul: 09:28 WIB.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>50</sup> *Ibid*.

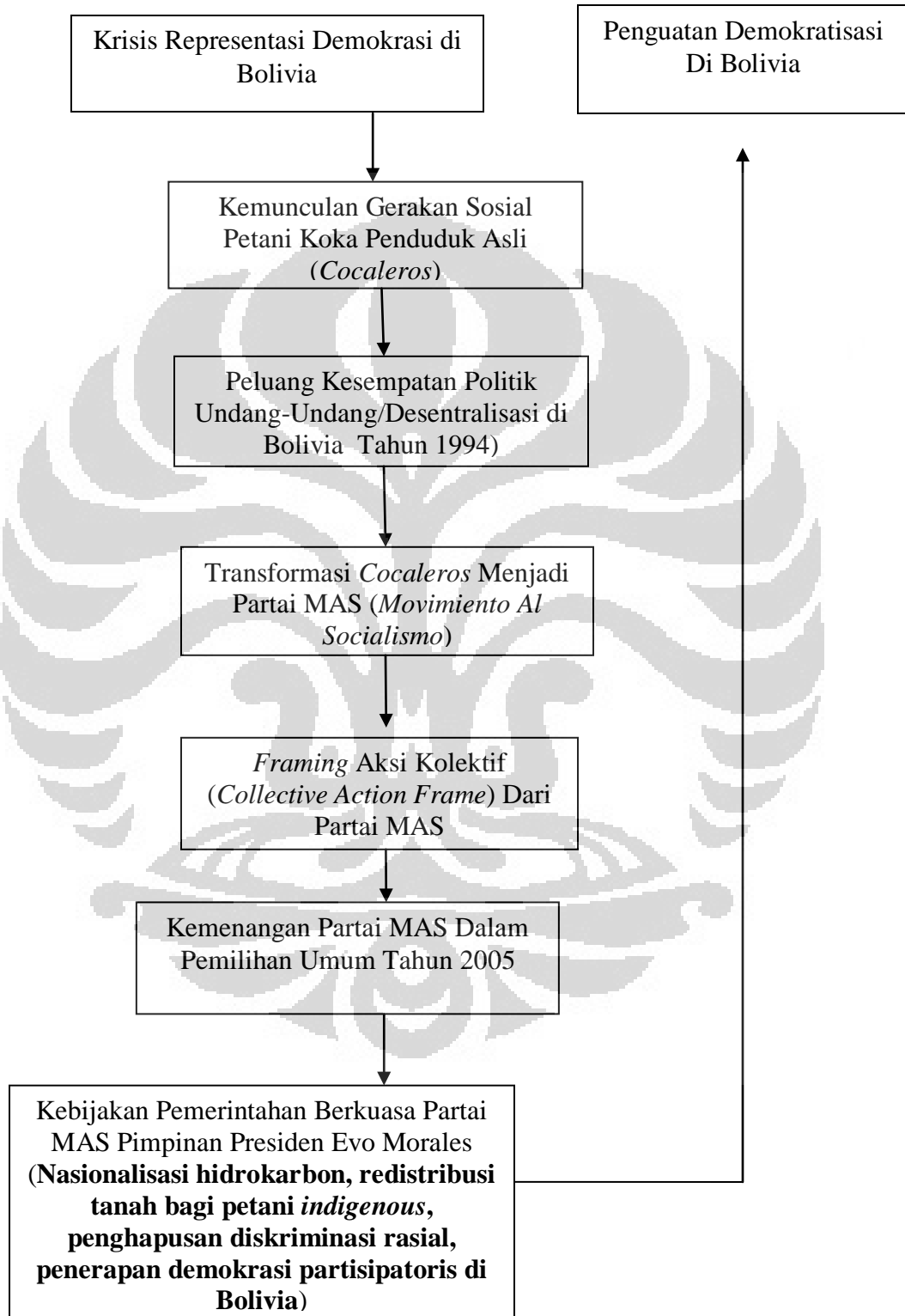
Mendorong institusionalisasi ekonomi.<sup>51</sup> Teoritisi tentang konsolidasi demokrasi lainnya juga diungkapkan oleh Ole Tornquist menekankan bahwa salah satu aspek penting dalam konsolidasi demokrasi adalah kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik dengan basis kesetaraan politik. Inilah yang disebut proses demokrasi yang lebih bermakna (*meaningful democracy*) yang tidak sekadar bersifat prosedural (*procedural democracy*).<sup>52</sup>



<sup>51</sup> Darmawan Triwibowo, Nur Iman Subono, “Mengarusutamakan Reformasi Kebijakan Sosial: Tantangan Konsolidasi Demokrasi Indonesia”, dalam Darmawan Triwibowo, Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2009) hlm. 12.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 13.

## I.5 Model Analisa



### **Penjelasan Model Analisa:**

Adanya permasalahan mengenai krisis representasi demokrasi di Bolivia mendorong bertumbuhkembangnya gerakan-gerakan sosial di Bolivia khususnya di kalangan penduduk asli. Salah satu gerakan sosial penduduk asli yang muncul adalah *Cocaleros* yakni gerakan petani koka yang berusaha melawan kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka oleh pemerintah Bolivia yang didukung oleh Amerika Serikat. Momentum kesempatan politik bagi gerakan sosial penduduk asli di Bolivia terjadi pada tahun 1994 saat diberlakukannya undang-undang partisipasi populer (*Law of Popular Participation*). *Cocaleros* berhasil memanfaatkan momentum kesempatan politik ini dengan bertransformasi menjadi partai politik MAS. Setelah terbentuk menjadi partai politik, MAS berusaha meluaskan basis perjuangannya. Salah satu caranya adalah lewat pembentukan *masterframing* atau *collective action frame* berupa perjuangan terhadap demokratisasi, perlawanan terhadap kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal hingga pemenuhan kesejahteraan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya bagi kalangan *indigenous* di Bolivia.

Pembentukan *framing* ini sukses memobilisasi penduduk asli dan juga elemen-elemen *civil society* lainnya di Bolivia untuk melakukan kritik dan perlawanan terhadap pemerintah Bolivia. Selain itu, pembentukan *framing* ini membuat popularitas MAS dan pemimpinnya Evo Morales semakin meningkat dan akhirnya berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2005. Keberhasilan partai MAS yang terbentuk dari perjuangan gerakan sosial penduduk asli (*Cocaleros*) di tataran grass-root dalam memegang tampuk pemerintahan Bolivia berpotensi memberikan kontribusi positif bagi penguatan proses demokratisasi di Bolivia yang sebelumnya dilanda oleh krisis legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena *framing* perjuangan MAS untuk memperkuat demokratisasi, anti neoliberal dan pemenuhan kesejahteraan dan hak-hak bagi kelompok marjinal di Bolivia secara konsisten diwujudkan lewat kebijakan-kebijakan pemerintahan presiden Evo Morales. Kebijakan-kebijakan penting pemerintahan Evo Morales yang berpotensi memberikan kontribusi bagi penguatan demokratisasi di Bolivia antara

lain: Nasionalisasi hidrokarbon, redistribusi tanah bagi kalangan petani penduduk asli (*indigenous*), penghapusan diskriminasi rasial di Bolivia, penerapan demokrasi yang partisipatoris dan melibatkan elemen *civil society* dalam proses pengambilan kebijakan.

## 1.6 Asumsi

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka analisa yang penulis jelaskan diatas, ada beberapa asumsi yang dapat dibangun antara lain:

1. Undang-Undang Partisipasi Popular (desentralisasi) yang diberlakukan oleh pemerintah Bolivia pada tahun 1994 memberikan peluang bagi gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) untuk bertransformasi menjadi partai politik (*Movimiento Al Socialismo*).
2. Setelah bertransformasi menjadi partai politik, MAS dan *Cocaleros* sebagai basis massanya berhasil memobilisasi masyarakat Bolivia untuk melawan pemerintah Bolivia dan meraih dukungan publik lewat menggunakan proses pembentukan *framing* krisis representasi demokrasi, etnisitas dan perlawanan terhadap neoliberalisme di Bolivia.
3. Sebagai partai berkuasa setelah memenangkan pemilihan umum tahun 2005, partai MAS berpeluang untuk berkontribusi memperkuat proses demokratisasi di Bolivia lewat kebijakan-kebijakan pemerintahan presiden Evo Morales.

## 1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada berbagai definisi mengenai metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln memberikan definisi metode kualitatif sebagai berikut: Metode kualitatif adalah suatu aktivitas yang membawa peneliti untuk menelusuri dunia yang ada di sekelilingnya. Kegiatan tersebut berisikan seperangkat interpretasi, dan penerapan material yang membuat dunia terlihat lebih jelas. Aktifitas peneliti membawa dunia disekelilingnya kedalam berbagai wujudnya seperti: data di lapangan penelitian,

*interview* atau wawancara, percakapan, foto-foto, rekaman percakapan ataupun pesan (memo). Pada level ini, penelitian kualitatif melibatkan interpretasi dan pendekatan alamiah terhadap dunia di sekelilingnya. Hal tersebut berarti, para peneliti kualitatif mempelajari suatu fenomena yang ada berdasarkan ketentuan alamiah, menempatkan perasaan dan kepekaan mereka, ataupun menginterpretasikan fenomena yang diberikan orang-orang disekitarnya kepada mereka.<sup>53</sup> Pengertian lain dari metode penelitian kualitatif adalah langkah yang dilakukan dimana objek penelitian bisa memahami dan menginterpretasikan salah satu motif sentral dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif juga dapat dipahami sebagai aneka macam penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik ataupun kuantifikasi.

Penulis melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Pengertian dari studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>54</sup> Sebagai catatan penting, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>55</sup> Penulis menggunakan data dalam penelitian ini bersandarkan pada sumber buku, jurnal ilmiah ataupun website dan tidak turun langsung mengumpulkan data melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Sumber-sumber yang penulis gunakan antara lain literatur mengenai krisis representasi demokrasi perwakilan di Bolivia buku yang ditulis oleh Scott Mainwaring yakni: *The Crisis of Democratic Representation in The Andes* untuk pembahasan latar belakang masalah pada bab 1. Dalam penjelasan bab 2 mengenai konteks historis mobilisasi gerakan sosial penduduk asli, penulis menggunakan literatur antara lain tesis dari Richard J. Schmidt mengenai mobilisasi perlawanan masyarakat *indigenous* di Bolivia yakni *Indigenous Competition for Control Bolivia*, Walter Morales dengan bukunya berjudul *A Brief History of Bolivia*. Dalam bab ini penulis juga menggunakan literatur tentang pelaksanaan kebijakan undang-undang

<sup>53</sup> Jane Lewis, Jane Ritchie, *Qualitative Research Practice: A Guide For Social Sciences Students and Researcher* (London: Sage Publications, 2003), hlm. 3.

<sup>54</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 2.



partisipasi populer seperti Dalam bab 3 tentang kemunculan gerakan sosial petani koka (*Cocaleros*) dan transformasinya menjadi partai politik, penulis menggunakan referensi pembahasan mengenai perlawanan gerakan petani koka penduduk asli terhadap kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Zachery Boyd, Benjamin Dangl, Harry Sanabria, dan lain-lainnya. Dalam bab ini penulis juga menggunakan referensi mengenai peranan MAS dan Cocaleros sebagai basis massanya dalam memobilisasi masyarakat Bolivia menentang kebijakan pemerintah seperti literatur dari Oscar Olivera dan Tom Lewis mengenai kasus perang air (*Water War*) di provinsi Cochabamba. Sedangkan untuk bab 4 yang menjelaskan mengenai analisis dampak kemenangan MAS dan kontribusinya terhadap penguatan proses demokratisasi, penulis menggunakan literatur pembahasan mengenai dampak kemunculan partai etnik terhadap demokrasi di Bolivia dari ilmuwan politik seperti Donna Lee Van Cott, Raul Madrid dan lain-lainnya. Penulis juga menggunakan literatur, jurnal ilmiah atau laporan penelitian mengenai kinerja pemerintahan Evo Morales antara lain dari Donna Lee Van Cott James Rochlin dan Rebecca Ray.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam sub-bab ini, saya akan menguraikan rencana penulisan penelitian saya yang berjudul : Dampak Transformasi Gerakan Sosial Petani Koka Penduduk Asli (*Cocaleros*) Menjadi Partai Politik Terhadap Penguatan Proses Demokratisasi Di Bolivia: Studi Kasus Kemenangan Partai MAS (*Movimiento A Socialismo*) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2005 kedalam beberapa bab dan sub-bab yang terdiri dari:

- Bab 1, yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab yakni: latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, kerangka teori, alur berfikir, metode penelitian, hipotesa serta sistematika penulisan penelitian.
- Bab 2, yang merupakan bab isi penelitian yang berisi konteks historis mobilisasi gerakan sosial penduduk asli melawan pemerintah Bolivia. Penulis akan membagi penjelasan dalam bab 2 kedalam beberapa sub-bab yang terdiri dari: masa sebelum kemerdekaan Bolivia yang ditandai dengan

kebangkitan pertama perlawanan masyarakat *indigenous* yakni pemberontakan Tupac Amaru hingga kemerdekaan Bolivia (1770-1825), masa setelah kemerdekaan (1825-1945), masa revolusi kelompok nasionalis pimpinan MNR (1950-1964), masa kediktatoran rezim militer dan munculnya gerakan sosial masyarakat *indigenous* yang pertama yakni *Katarista Movement* (1964-1982), hingga masa setelah transisi demokrasi hingga kebijakan desentralisasi (undang-undang partisipasi populer) di Bolivia (1982-1994).

- Bab 3 merupakan bab isi penelitian yang menjelaskan mengenai kemunculan gerakan sosial petani koka (*Cocaleros*) dan transformasinya menjadi partai politik. Dalam bab ini, penulis akan membagi penjelasan dalam beberapa sub-bab yang terdiri dari: latar belakang kemunculan gerakan petani koka (*Cocaleros*), intervensi pemerintah Bolivia melalui kebijakan pelarangan penanaman daun koka, transformasi *Cocaleros* menjadi partai politik, peranan MAS dalam mobilisasi *civil society* melawan rezim oligarki politik dan neoliberal di Bolivia serta kemenangan MAS dalam pemilihan umum tahun 2005.
- Bab 4, merupakan bab yang berisi penjelasan mengenai analisis dampak dan kontribusi kemenangan partai MAS terhadap penguatan proses demokratisasi di Bolivia.
- Bab 5, merupakan bab penutup dalam penulisan penelitian yang berisi kesimpulan penelitian.

## BAB 2 KONTEKS HISTORIS MOBILISASI GERAKAN SOSIAL PENDUDUK ASLI (INDIGENOUS) DI BOLIVIA

Catatan sejarah mengenai penduduk asli (*indigenous*) di kawasan Amerika Latin telah lama diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan kesenjangan sosial. Mereka kerap kali menjadi korban penindasan yang dilakukan baik oleh kekaisaran Aztec dan Inca, pemerintah kolonial Spanyol, ataupun bangsa-bangsa di kawasan Amerika Utara.<sup>56</sup> Berdirinya negara bangsa (*Nation-State*) di kawasan Amerika Latin yang terjadi pada awal abad ke 19 juga secara sistematis telah mengabaikan eksistensi atau keberadaan masyarakat *indigenous* yang telah ada bahkan jauh sebelum negara-bangsa (*Nation-State*) tersebut lahir.<sup>57</sup> Sebagai catatan penting, fondasi terbentuknya negara-bangsa di kawasan Amerika Latin tidak dapat dilepaskan dari karakteristik hegemoni kelompok masyarakat *Creole/Mestizo* (kulit putih dan campuran kulit putih) yang dengan segenap cara berusaha menempatkan masyarakat *indigenous* sebagai kelompok yang termarjinalkan dalam struktur politik dan sosial.<sup>58</sup> Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dengan struktur masyarakatnya tersebut antara lain terwujud dengan berbagai praktik diskriminasi hingga asimilasi kultural yang ditujukan terhadap komunitas masyarakat adat (*indigenous*).<sup>59</sup>

Suatu hal yang menarik adalah meskipun berbagai praktik diskriminasi dan kondisi keterpinggiran yang dialami oleh masyarakat *indigenous* telah terjadi di berbagai negara di kawasan Amerika Latin, namun perlawanan masyarakat

<sup>56</sup> Richard J. Scmidth, "Indegenous Competition For Control in Bolivia", *Naval Post Graduade Thesis*, (California: Naval Post Graduate School, 2005), hlm. 1. Diunduh pada situs : <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA435600&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf>, pada tanggal 11 April 2010, pukul 13:21 WIB.

<sup>57</sup> Donna Lee Van Cott, "Turning Crisis Into Oppurtunity: Achievement of Excluded Group in The Andes", dalam Paul W. Drake, Erick Hershberg, *State and Society in Conflict : Comparative Perspective on Andean Crisis* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006), hlm. 164.

<sup>58</sup> Margarito Ruiz Hernandez, Aracely Burguete Carl y Mayor, "Indegenous People Without Political Parties: The Dilemma of Indegenous Representation in Latin America", dalam Katherine Wassendorf, *Challenging Politics: Indegenous Peoples Experiences with Political Party and Elections* (Copenhagen: IWGIA, 2001), hlm. 20.

<sup>59</sup> Van Cott, 2006, *op.cit.*, hlm. 164.

*indigenous* tidak pernah surut dari waktu ke waktu. Patut pula diperhatikan bahwa populasi masyarakat *indigenous* seperti di Ekuador, Bolivia, dan Peru sejak dahulu telah memainkan peranan penting terutama sebagai kelompok oposisi terhadap struktur negara dan masyarakat dalam upaya memperjuangkan kekuasaan atau otonomi politik.<sup>60</sup> Perlawanan gerakan sosial masyarakat *indigenous* khususnya di Bolivia mulai menguat pada dekade 1970-an dan semakin menemukan momentumnya pada dekade 1980-an dan 1990-an. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal diam menghadapi kondisi keterpinggiran yang mereka alami dan mulai memperjuangkan berbagai aspirasi dan tuntutan termasuk diantaranya partisipasi serta keterwakilan politik. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan konteks sosial-historis penyebab perpecahan berbasis etnik yang akhirnya menyebabkan perlawanan masyarakat *indigenous* di Bolivia. Penulis membagi penjelasan sosial-historis mengenai perpecahan berbasis etnis dalam struktur masyarakat Bolivia kedalam beberapa periodisasi, dimulai dari masa sebelum kemerdekaan Bolivia yang ditandai dengan kebangkitan pertama perlawanan masyarakat *indigenous* yakni pemberontakan Tupac Amaru hingga kemerdekaan Bolivia (1770-1825), masa setelah kemerdekaan Bolivia (1825-1945), masa revolusi kelompok nasionalis sosialis pimpinan MNR (1950-1964), masa kediktatoran rezim militer dan munculnya gerakan sosial masyarakat *indigenous* yang pertama yakni *Katarista Movement* (1964-1982), hingga masa setelah transisi demokrasi dan pemberlakuan undang-undang partisipasi populer (1985-1994).

## **2.1 Masa Sebelum Kemerdekaan Bolivia ( 1770-1825)**

Perlawanan masyarakat *indigenous* di Bolivia dapat ditelusuri jauh sebelum lahirnya negara Bolivia. Bahkan sebelum masa kolonial pemerintah Spanyol, salah satu dari kelompok suku terbesar di Bolivia yakni suku Aymara telah melakukan pemberontakan terhadap para penguasa kekaisaran Inca yang berusaha

<sup>60</sup> Smith, *op.cit.*, hlm. 1.

mengasimilasikan mereka kedalam struktur masyarakat Inca.<sup>61</sup> Suatu fakta yang menarik adalah bahwa kelompok suku Aymara merupakan satu-satunya kelompok suku taklukan kekaisaran Inca yang diperbolehkan mempertahankan bahasa dan juga identitas kultural mereka sendiri.<sup>62</sup> Meskipun demikian, suku Aymara diharuskan menerima migrasi besar-besaran kelompok suku lainnya yakni Quechua ke wilayah mereka sebagai konsekuensi kebijakan asimilasi secara langsung yang diberlakukan oleh kekaisaran Inca.<sup>63</sup>

Penindasan dan praktik diskriminasi terhadap masyarakat *indigenous* berlanjut di masa penjajahan bangsa Spanyol di kawasan Amerika Latin. Selama masa penjajahan pemerintah kolonial Spanyol, baik suku Aymara maupun Quechua melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial Spanyol dan beragam bentuk kebijakan mereka yang bersifat eksploitatif seperti : pemberlakuan kerja paksa (*the mining mita*), kewajiban menyerahkan upeti terhadap pemerintah kolonial dan perampasan sumber daya alam dan barang-barang berharga yang dimiliki oleh masyarakat *indigenous* (*reparto de mercancías*).<sup>64</sup>

Salah satu bentuk perlawanan masyarakat *indigenous* yang cukup besar pada masa kolonialisme bangsa Spanyol terlihat dalam pemberontakan Tupac Amaru. Pemberontakan ini dimulai pada tahun 1770 hingga tahun 1772 dan terbagi kedalam dua fase pemberontakan.<sup>65</sup> Fase pemberontakan yang pertama terjadi di wilayah keresidenan (*vicerealty*) Cuzco sedangkan fase pemberontakan yang kedua bergeser lebih jauh ke wilayah selatan yang dikenal dengan sebutan *The Upper Peru* (Bolivia).<sup>66</sup> Periode pertama pemberontakan Tupac Amaru tersebut ditujukan langsung terhadap pemerintah kolonial Spanyol. Namun perlu ditekankan bahwa fase

<sup>61</sup> Herbert S. Klein, "Prelude to The Revolution: Pre-Colombian and Colonial Bolivia" dalam James Malloy, Richard S. Thorn, (et.al), *Beyond the revolution: Bolivia since 1952*, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1971), hlm. 25.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Xavier Albo, "From MNRista to Katarista to Katari" dalam Richard J. Stern, *Resistance, Rebellions, and Consciousness in Andean Peasant World, 18<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> Centuries* (Madison: University of Wisconsin Press, 1987), hlm.381.

<sup>65</sup> Sergio Serulnikov, *Subverting colonial authority :Challenges to Spanish Rule in Eighteen-Century Southern Andes* (USA: Duke University Press, 2003), hlm.126.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

peremberontakan pertama tersebut tidaklah mencerminkan kebangkitan gerakan populis atau gerakan petani (*indigenous*) secara utuh. Menurut Leon G. Campbell, fase pemberontakan Tupac Amaru yang pertama lebih didorong dan diorganisir secara terbatas diantara para pemimpin masyarakat adat (*indigenous*).<sup>67</sup> Kelompok pemimpin *indigenous* tersebut berusaha membangkitkan semangat masyarakatnya didasarkan atas ide untuk mengembalikan utopia *indigenous* dibawah pimpinan Tomas Katari.<sup>68</sup>

Fase pemberontakan Tupac Amaru yang kedua terjadi di wilayah Oruro dan La Paz. Namun tujuan dari fase pemberontakan yang kedua tersebut berbeda dengan fase pemberontakan sebelumnya. Penyebab utama terjadinya fase pemberontakan Tupac Amaru yang kedua adalah permasalahan mengenai maraknya korupsi dan ketidakefektifan pemerintahan di tingkat lokal yang dijalankan oleh birokrat pribumi yang bekerja untuk pemerintah kolonial Spanyol dan juga kelompok *cacique* (bos lokal atau para tuan tanah lokal).<sup>69</sup> Periode kedua pemberontakan Tupac Amaru dapat dikatakan sebagai bukti menguatnya perlawanan masyarakat *indigenous*, hal ini didasarkan oleh tiga alasan utama. Pertama, pemberontakan pada fase yang kedua ini tidak lagi hanya ditujukan kepada pemerintah kolonial Spanyol saja namun juga terhadap para elit lokal di Bolivia. Kedua, pemberontakan fase kedua ini diorganisir secara umum oleh masyarakat *indigenous* sendiri. Dan ketiga, kelompok masyarakat *indigenous* telah mampu membentuk tentara hingga mencapai 40.000 orang sehingga dianggap dapat melakukan pemberontakan dalam skala yang besar dan mengobarkan pemberontakan ke wilayah lainnya secara lebih luas.<sup>70</sup> Pemberontakan Tupac Amaru akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Spanyol pada tahun 1772. Walaupun pemberontakan tersebut telah berakhir, pemerintah Spanyol memutuskan untuk tidak melakukan penghancuran total terhadap masyarakat *indigenous*. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan pemerintah kolonial Spanyol yang masih

<sup>67</sup> Leon G. Campbell, "Social Structure of The Tupac Amaru Army in Cuzco, 1780", dalam *The Hispanic, American Historical Review*, Vol. 16, No. 4, (November 1981) : 690-691.hlm. 690.

<sup>68</sup> Serunlikov, *op.cit.*, hlm.127.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>70</sup> Herbert S. Klein, *A Concise history of Bolivia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm.75.

mengizinkan otoritas komunal yang dimiliki oleh masyarakat *indigenous* untuk tetap bertahan.<sup>71</sup>

## 2.2 Masa Setelah Kemerdekaan Bolivia (1825-1945)

Bolivia akhirnya memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial Spanyol dan mendirikan negara sendiri dengan bentuk republik pada tahun 1825. Seiring dengan kemerdekaannya yang diperoleh pada tahun 1825, Bolivia dengan para elit pemerintahannya yang didominasi kelompok masyarakat kulit putih dan *mestizo* mulai melakukan serangkaian kebijakan reformasi agraria yang terwujud dengan pembagian tanah-tanah kepada kelompok *latifundia* (tuan tanah atau keluarga kaya di Bolivia) serta mengusir masyarakat adat dari wilayah tradisional yang mereka miliki.<sup>72</sup> Tidaklah mengherankan dalam situasi yang demikian, terjadi perpecahan dalam struktur masyarakat Bolivia antara kelompok masyarakat adat dengan para elit dari kalangan kulit putih dan *mestizo*. Akibatnya, semenjak Bolivia merdeka hingga revolusi nasionalis partai MNR (*Movimiento Nacional Revolucionario*) tahun 1952, telah banyak terjadi perlawanan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah yang mereka miliki. Perlawanan masyarakat adat tersebut seringkali berakhir tragis dengan pembantaian secara keji oleh aparat militer yang bekerja untuk kelompok oligarki tuan tanah (*latifundia*).<sup>73</sup>

Salah satu kebijakan reformasi agraria yang mendukung akuisisi atau pengambilalihan tanah oleh kelompok tuan tanah (*latifundia*) terlihat dalam Akta Reformasi Agraria Tahun 1874 (*Ley de Exvinculacion*).<sup>74</sup> Akta tersebut dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dasar Liberalisme dimana negara percaya bahwa siapa saja yang mampu membuat suatu tanah menjadi lebih produktif maka merekalah yang

<sup>71</sup> Schmidt, *op.cit.*, hlm 32.

<sup>72</sup> Albo, *op.cit.*, hlm.381.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 381.

<sup>74</sup> Steve Wiggins, "Institution and Agricultural Growth in Bolivia and New Zealand" (UK: University of Manchester), makalah yang dipublikasikan oleh Research Programe Consortium for Improving Institutions for Pro-Poor Growth (IPPG), Departement for International Development, 2008, hlm. 9, diunduh dalam situs : [www.ippg.org.uk/papers/dp21.pdf](http://www.ippg.org.uk/papers/dp21.pdf), pada tanggal 25 April 2010, pukul: 22:34 WIB.

harus memiliki dan mengendalikan tanah tersebut.<sup>75</sup> Akta reformasi agraria tahun 1874 tersebut juga semakin mempermudah kepemilikan tanah secara meluas untuk tujuan peningkatan produksi pertanian. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut adalah terusirnya para petani *indigenous* dari tanah yang mereka miliki.<sup>76</sup>

Kebijakan reformasi pertanian seperti yang terjadi pada tahun 1874 tidak dapat dipungkiri telah menyebabkan berbagai permasalahan sosial dalam bidang pertanian. Memasuki pertengahan abad ke 20, Bolivia tergolong sebagai salah satu negara yang paling timpang dan memiliki catatan ekonomi yang buruk dalam hal distribusi lahan atau tanah di kawasan Amerika Latin. Buktinya, sebanyak 6% dari kelompok tuan tanah kaya yang memiliki 100 hektar tanah atau lebih telah menguasai 92 % seluruh lahan pertanian yang subur di Bolivia.<sup>77</sup> Di lain pihak, berbagai bentuk kebijakan agraria telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat *indigenous*. Kelompok petani *indigenous* kerap dipekerjakan secara eksploitatif sebagai buruh lepas untuk bekerja menggarap lahan yang dimiliki oligarki kelompok tuan tanah di wilayah pedesaan.<sup>78</sup> Selain itu, sejak masa kolonialisme Spanyol, kelompok petani *indigenous* juga diharuskan untuk melakukan pelayanan secara profesional terhadap para tuan tanah kaya beserta keluarga mereka. Pelayanan secara personal terhadap kelompok tuan tanah tersebut dikenal dengan istilah *Pongo-Service*, yang salah satu bentuknya adalah keharusan kelompok petani *indigenous* menempuh perjalanan sangat jauh ke rumah-rumah tuan tanah dan keluarga kaya di wilayah perkotaan (*Urban Area*) untuk memberikan pelayanan secara personal dan menyerahkan hasil pertanian yang mereka miliki.<sup>79</sup>

Adanya perhatian terhadap permasalahan sistem oligarki dalam struktur masyarakat Bolivia dan penindasan terhadap masyarakat *indigenous* mulai berkembang seiring dengan meletusnya perang Chaco (*Chaco War*) yang berlangsung mulai tahun 1932 hingga tahun 1935. Penyebab meletusnya Perang

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Herbert S. Klein, *Bolivia the evolution of multi-ethnic society* (Oxford: Oxford University Press 1992), hlm. 228.

<sup>78</sup> Kline, 2003, *op.cit.*, hlm. 233.

<sup>79</sup> Kline, 1992, *op.cit.*, hlm. 229.



Chaco sendiri dipicu oleh sengketa perebutan wilayah atau kawasan *Grand Chaco* antara Bolivia dengan Paraguay.<sup>80</sup> Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Bolivia dengan kekuatan militernya yang dilatih oleh Jerman akan dengan mudah memenangkan peperangan, namun yang terjadi justru sebaliknya karena Bolivia menelan kekalahan dari Paraguay pada tahun 1935. Kekalahan dalam perang Chaco tidak hanya membuat Bolivia kehilangan sebagian besar dari wilayahnya tapi juga korban jiwa yang sangat besar. Tercatat sekitar 65.000 tentara dan masyarakat sipil Bolivia terbunuh dan sisanya menjadi tawanan perang dalam konflik tersebut.<sup>81</sup>

Perang Chaco dan kerugian besar yang ditimbulkannya telah membuat masyarakat Bolivia terkejut bahkan yang lebih parah lagi, korupsi dan inkompetensi telah melanda para petinggi militernya di tengah konflik yang sedang berkecamuk.<sup>82</sup> Dalam situasi keputusasaan dan rasa frustrasi yang begitu hebat, masyarakat Bolivia mulai mempertanyakan sistem politik, ekonomi dan sosial mereka yang dianggap berperan besar menyebabkan kekalahan yang memalukan dari Paraguay dalam perang Chaco.<sup>83</sup> Konsekuensi yang ditimbulkan dari evaluasi atas kekalahan Bolivia dalam Perang Chaco tersebut adalah munculnya keinginan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur sosial-politik diikuti dengan berkembangnya ide dan propaganda Kiri radikal dalam wacana atau perdebatan publik yang berkembang di Bolivia.<sup>84</sup> Setelah perang Chaco berakhir, kelompok-kelompok radikal yang terdiri dari para perwira militer muda, serikat buruh, serikat petani hingga kaum terpelajar mulai bergerak untuk menyuarakan tuntutan reformasi menyeluruh terhadap struktur sosial-politik Bolivia.<sup>85</sup> Kelompok radikal yang dipimpin oleh para perwira muda seperti Kolonel David Toro dan Kolonel German Busch tersebut berusaha mengusung reformasi sistem politik Bolivia yang baru

<sup>80</sup> Bruce W. Farcau, *The Chaco War Bolivia and Paraguay, 1932-1935* (Westport Connecticut: Green Wood Press, 1996), hlm. 9.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>82</sup> Klein, 2003, *op.cit.*, hlm. 198.

<sup>83</sup> Robert J. Alexander, *Bolivia: Past, Present, and Future of its Politics* (Stanford: Hoover Institution Press, 1982), hlm. 66.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>85</sup> Walter Q. Morales, *A Brief History of Bolivia* (New York: Lexington Associates, 2003), hlm. 109.

berdasarkan persamaan dan keadilan sosial.<sup>86</sup> Retorika nasionalisme dan anti imperialisme pun semakin menguat di kalangan kelompok radikal di Bolivia. Tuntutan kelompok reformis radikal tersebut mencapai puncaknya lewat kudeta militer Kolonel Toro dan Busch terhadap Presiden Tejana Sorzano pada tanggal 17 Mei 1936.<sup>87</sup> Setelah kudeta bergulir dan rezim junta militer sosialis pimpinan Kolonel Toro naik ke tampuk pemerintahan, mereka langsung mengadakan berbagai bentuk perubahan mendasar dalam struktur politik di Bolivia yang salah satunya ditandai dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan milik negara tahun 1937.<sup>88</sup>

Perubahan politik yang terjadi setelah berakhirnya perang Chaco juga berpengaruh terhadap menguatnya tuntutan dan protes di kalangan masyarakat *indigenous*. Dipengaruhi oleh berkembangnya ideologi Kiri, mereka bangkit untuk membentuk gerakan sosial dan retorika *pan-indianisme* mulai muncul sebagai isu utamanya.<sup>89</sup> Hal ini tidak dapat dilepaskan pula dari maraknya kemunculan partai-partai politik berhaluan sosialis setelah perang Chaco berakhir seperti MNR (*Movimiento Nacional Revolucionario*) dan BSF (*Bolivia Socialist Falange*) pada tahun 1941. Dalam kerangka kritik terhadap legitimasi sistem politik di Bolivia dan keinginan mengintegrasikan masyarakat *indigenous* kedalam struktur sosial politik di Bolivia secara utuh, masyarakat *indigenous* juga mulai membangun aliansi dengan partai-partai sosialis yang baru bermunculan tersebut.

Pada dekade 1940-an perhatian pemerintah Bolivia terhadap masyarakat *indigenous* semakin menguat. Salah satu pemerintahan pertama di Bolivia yang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masyarakat *indigenous* adalah pemerintahan Presiden Carlos Villaroel pada tahun 1945. Adanya perhatian besar dari pemerintahan Presiden Villaroel terhadap masyarakat adat (*indigenous*) ini ditunjukkan lewat pendirian secara besar-besaran organisasi serikat petani sebagai upaya untuk merebut dukungan dari kelompok masyarakat *indigenous* serta

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm.109.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm.110.

<sup>89</sup> Klein, 2003, *op.cit.*, hlm. 201.

mengintegrasikan mereka kedalam struktur sosial yang utama di Bolivia.<sup>90</sup> Pemerintahan presiden Villaroel juga memberikan kontribusi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kongres *indigenous* yang pertama pada tahun 1945.<sup>91</sup> Tujuan utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kongres *Indigenous* Pertama adalah mempromosikan secara luas konsep kebijakan pembangunan di wilayah pedesaan (*rural area*) serta otonomi bagi masyarakat *indigenous*.<sup>92</sup> Meskipun pada praktiknya tidak satu pun tuntutan masyarakat *indigenous* yang berhasil direalisasikan oleh pemerintah, Kongres *Indigenous* Pertama pada tahun 1945 tetap dianggap berperan penting sebagai tonggak konsolidasi kekuatan masyarakat *indigenous* di Bolivia.<sup>93</sup>

### **2.3 Masa Revolusi Kelompok Nasionalis Pimpinan MNR (1952-1964)**

Catatan sejarah penting lainnya yang mempengaruhi struktur sosial dan politik di Bolivia khususnya bagi masyarakat *indigenous* adalah revolusi kelompok nasionalis sosialis pimpinan partai MNR (*Movimiento Nacional Revolucionario*) pada tahun 1952. Revolusi tahun 1952 dilatarbelakangi oleh merosotnya kondisi perekonomian Bolivia di masa kepemimpinan junta militer Jenderal Humberto Torres Ortiz yang ditandai dengan tingginya tingkat inflasi dan jatuhnya harga timah di pasar internasional.<sup>94</sup> Kesepakatan yang gagal dengan Amerika Serikat menyangkut penentuan harga ekspor timah ikut berpengaruh terhadap berkurangnya neraca penerimaan dalam negeri Bolivia yang membuat perekonomian negara ini semakin hancur. Dalam sektor agraria telah terjadi kelangkaan produksi yang memicu tingginya impor Bolivia terhadap bahan-bahan pangan. Ketergantungan impor bahan pangan tersebut juga ditambah dengan persoalan ketimpangan distribusi kepemilikan tanah sebelum revolusi MNR bergulir pada tahun 1952. Sensus agraria pada tahun 1950 telah menjadi potret langsung ketimpangan distribusi tanah di wilayah pedesaan

<sup>90</sup> Stern, *op.cit.*, hlm. 383.

<sup>91</sup> Laura Gotkowitz, *A Revolution For Our Rights: Indigenous Struggle For Land and Justice in Bolivia, 1900-1952* (Durham: Duke University Press, 2007), hlm. 196.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>93</sup> Schmidt, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>94</sup> "Bolivia National History" diunduh dalam situs:

<http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/bolivia/Bolivia-national-history.htm>, pada tanggal 28 April 2010, pukul 17:38 WIB.

Bolivia dimana 8% kelompok tuan tanah menguasai 95 % kepemilikan tanah (sekitar 7000 kelompok tuan tanah memiliki lebih dari 500 hektar tanah) sedangkan 69% kelompok petani hanya memiliki 0,4% kepemilikan tanah (sekitar 60.000 petani hanya memiliki kurang dari 10 hektar tanah).<sup>95</sup>

Didorong oleh rasa ketidakpuasan yang kian memuncak akibat krisis perekonomian di Bolivia, kelompok-kelompok revolusioner pimpinan partai MNR yang terdiri dari kalangan kelas pekerja, buruh pertambangan dan intelektual kelas menengah bergerak melakukan revolusi nasional pada tanggal 9 April tahun 1952.<sup>96</sup> Revolusi bersenjata MNR tersebut ikut mendapat dukungan dari polisi militer Bolivia yang diketuai oleh Jenderal Antonio Seleme. Setelah bertempur sengit dengan kelompok pemberontak selama 3 hari, kelompok junta militer Jenderal Torres akhirnya menyerah dan tampuk kepemimpinan Bolivia beralih ke tangan MNR pada tanggal 11 April tahun 1952.

Setelah revolusi 1952 bergulir, pemerintahan MNR yang baru melakukan serangkaian kebijakan radikal diantaranya nasionalisasi terhadap 3 perusahaan timah Bolivia pada tanggal 31 Oktober 1952.<sup>97</sup> Pemerintahan MNR kemudian mendirikan COMIBOL (*Corporacion Minera de Bolivia*) sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan Bolivia dibawah pengelolaan negara. Tidak hanya dalam hal nasionalisasi saja, perubahan radikal yang diupayakan oleh pemerintahan MNR ikut menyentuh sektor pertanian khususnya menyangkut distribusi lahan di pedesaan. Pada bulan Agustus 1953, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Reformasi Agraria 1953.<sup>98</sup> Pokok-pokok Undang-Undang Reformasi Agraria tersebut antara lain berisi ketentuan penghapusan eksploitasi kerja terhadap kelas buruh dan

<sup>95</sup> George Gray Molina, "Ethnic Politics in Bolivia: Harmony of inequality 1900-2000", makalah yang dipublikasikan oleh Center For Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, University of Oxford no.15, 2007, hlm. 15, diunduh dalam situs: <http://www.crise.ox.ac.uk/pubs/workingpaper15.pdf>, pada tanggal 29 April 2010 pukul 23:14 WIB.

<sup>96</sup> Morales, *op.cit.*, hlm.171.

<sup>97</sup> "The Bolivian National Revolution 1952-1964", diunduh dalam situs: <http://www.latinamericanstudies.org/bolivian-revolution.htm>, pada tanggal 30 April 2010, pukul : 17:43 WIB.

<sup>98</sup> "Bolivia Radical Reforms: The Bolivia National Revolution, 1952-1964", diunduh dalam situs : <http://www.mongabay.com/history/bolivia/bolivia-radical-reforms-the-bolivian-national-revolution-1952-64.html>, pada tanggal 30 April 2010, pukul : 20:16 WIB.

pendistribusian secara masif lahan-lahan di wilayah pedesaan dari kelompok oligarkhi tuan tanah.<sup>99</sup>

Meskipun serangkaian kebijakan reformasi radikal yang dilakukan pemerintahan MNR telah berjalan, akan tetapi masyarakat *indigenous* di Bolivia tetap tidak memperoleh dampak yang signifikan dari kebijakan-kebijakan ini. Justru sebaliknya, pada masa pemerintahan MNR, lewat kebijakan asimilasi kultural, identitas dari masyarakat *indigenous* dihilangkan dan diganti dengan identitas sebagai kelompok petani (dari *indio*” menjadi “*Campesino*”).<sup>100</sup> Melalui kebijakan tersebut, negara berusaha untuk menghalangi klaim masyarakat *indigenous* terhadap kepemilikan tanah mereka berdasarkan sejarah dan tradisi leluhurnya.<sup>101</sup> Dengan kata lain, lewat pengakuan resmi sebagai warga negara berdasarkan kebijakan asimilasi kultural dengan sendirinya masyarakat *indigenous* kehilangan status dan hak istimewanya dalam struktur sosial masyarakat Bolivia. Fenomena kebijakan asimilasi inilah yang dijelaskan oleh sosiolog Silvia Riviera Quisacani sebagai hilangnya masyarakat *indigenous* dalam konteks homogenisasi sosial dan proyek yang bersifat politis di Bolivia.<sup>102</sup>

Dampak yang dihasilkan dari kebijakan reformasi agraria tahun 1953 juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi tanah bagi masyarakat *indigenous*.<sup>103</sup> Bahkan, pemberlakuan kebijakan reformasi agraria tahun 1953 sama sekali tidak menyebutkan terminologi *indigenous*, ras *indigenous* ataupun identitas Aymara dan Quechua dari diskursus sosial di Bolivia. Di satu sisi memang inisiatif atas redistribusi tanah telah dilakukan oleh MNR, namun yang perlu ditekankan disini adalah aturan reformasi agraria yang ada hanya berupa undang-undang yang sifatnya formalitas belaka karena inisiatif atau keterlibatan masyarakat *indigenous* sendiri

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Juliana Strobele-Gregore, Bert Hoffman, Andrew Holmes, “From Indio to Mestizo: New Indianist Movement in Bolivia”, *Latin American Perspectives*, Vol. 21, No. 2, Social Movements and Political Change in Latin America: 1 (Spring, 1994), hlm. 108.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>102</sup> Molina, *loc.cit.*, hlm. 6.

<sup>103</sup> Richard W. Patch, “Bolivia: The Restrained Revolution”, *makalah yang dipresentasikan dalam American Historical Association and The Conference on Latin America History in New York, December, 1960*, hlm. 128, diunduh dalam situs : <http://www.latinamericanstudies.org/bolivia/bolivia-revolution.pdf>, pada tanggal 2 Mei 2010, pukul: 22: 07 WIB.

dalam pelaksanaan undang-undang reformasi agraria tersebut pada kenyataannya tidak pernah terjadi.<sup>104</sup> Dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan, MNR juga berusaha mematikan militansi kelompok *indigenous* dan memasukan mereka kedalam organisasi serikat petani *indigenous (sindicatos)* dibawah kontrol pemerintah.<sup>105</sup> Dengan demikian, MNR bukanlah partai yang merepresentasikan masyarakat *indigenous* secara utuh melainkan hanya sebagai kelompok elit yang mengendalikan masyarakat *indigenous* untuk tujuan kepentingan mereka semata.<sup>106</sup>

#### **2.4 Masa Kediktatoran Rezim Militer (1964-1982)**

Periode pemerintahan revolusioner MNR berakhir pada tahun 1964, ketika rezim junta militer melakukan kudeta yang menandai dimulainya era ketidakstabilan politik di Bolivia.<sup>107</sup> Semenjak saat itu hingga rentang waktu 18 tahun berikutnya, Bolivia dikendalikan oleh rezim pemerintahan militer yang bersifat otoriter, korup dan brutal yang didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi pembendung perkembangan pengaruh paham Marxisme di kawasan Amerika Latin.<sup>108</sup> Pemerintahan pertama rezim junta militer Bolivia berada di bawah kepemimpinan Jenderal Barrientos yang berkuasa dari tahun 1964 hingga 1969. Dalam era kepemimpinan Jenderal Barrientos, peranan negara yang kuat dalam mengontrol sektor perekonomian sejak masa revolusi MNR kembali dilanjutkan.<sup>109</sup> Rezim junta militer Barrientos juga mendapat dukungan yang kuat dari Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dengan diberangkatkannya 1200 orang perwira militer Bolivia untuk

<sup>104</sup> Patch, *loc.cit.*, hlm. 128.

<sup>105</sup> Donna Lee Van Cott, "Party System Development and Indigenous Populations in Latin America: The Bolivian Case", dalam *Sage Publication*, Vol. 6, No. 2, 2000, hlm. 164, diunduh dalam situs: <http://fhs.uhk.cz/politologie/texty/sprinpa1/informace/latin-america---party-system.pdf>, pada tanggal 3 Mei 2010, pukul: 13: 11 WIB.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>107</sup> Douglas Farah, "Into The Abyss: Bolivia Under Evo Morales and The MAS", *makalah yang dipublikasikan oleh International Assessment and Strategy Center, 2009*, hlm. 3, diunduh dalam situs : [www.strategycenter.net/.../20090618\\_IASCIIntoTheAbyss061709.pdf](http://www.strategycenter.net/.../20090618_IASCIIntoTheAbyss061709.pdf) -, pada tanggal 4 Mei 2010 pukul : 00:26 WIB.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>109</sup> Benjamin Kohl, Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance* (London: Zed Books, 2006), hlm. 50.

dibina di sekolah-sekolah militer Amerika Serikat.<sup>110</sup> Dinas intelejen Amerika Serikat CIA (*Central Intelligence Agency*) dan pasukan khusus Amerika Serikat ikut pula memberikan pelatihan teknis kepada rezim militer Bolivia yang pada akhirnya memainkan peranan penting seperti dalam kasus penangkapan dan eksekusi terhadap tokoh sosialis asal Kuba, Che Guevarra dalam pelariannya ke Bolivia pada tahun 1967.<sup>111</sup>

Pada masa rezim junta militer jenderal Barrientos, pemerintah Bolivia menjalin hubungan yang kuat dengan kelompok petani. Relasi yang harmonis antara pemerintah dengan kelompok petani tersebut ditunjukkan dengan pembentukan pakta militer-kelompok petani (*The Military-Campesino Pact*).<sup>112</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pembentukan pakta militer-kelompok petani ini, Jenderal Barrientos mendapat dukungan yang cukup kuat dari masyarakat di pedesaan Bolivia. Buktinya, jenderal Barrientos berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 1966 dengan persentase perolehan suara sebanyak 63 % yang mayoritas berasal dari masyarakat di pedesaan Bolivia.<sup>113</sup> Akan tetapi, hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan kelompok petani tidak bertahan lama setelah meninggalnya jenderal Barrientos akibat kecelakaan helikopter dalam kunjungan kerjanya ke wilayah pedesaan Bolivia pada tahun 1969.<sup>114</sup>

Semenjak meninggalnya jenderal Barrientos, keretakan hubungan antara militer dengan kelompok petani mulai terjadi. Keretakan hubungan militer dengan kelompok petani semakin mencapai puncaknya di masa kepemimpinan jenderal Hugo Banzer yang berkuasa dari tahun 1971 hingga tahun 1978. Sebagai catatan penting, dalam masa kepemimpinan diktator Hugo Banzer, perekonomian Bolivia mengalami kemajuan yang berarti akibat harga mineral yang melonjak di pasaran internasional

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>112</sup> Xavier Albo, "Bolivia: From Indian and Campesino Leaders to Councillors and Parliamentary Deputies", dalam Rachel Sieder, *Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and Democracy* (London: Palgrave Mcmilan, 2002), hlm. 75.

<sup>113</sup> Kohl, Farthing, *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>114</sup> Albo, 2002, *op.cit.*, hlm. 76.

serta penemuan deposit gas yang baru.<sup>115</sup> Sektor agrikultultur di wilayah timur Bolivia dan pembangunan pabrik-pabrik di wilayah La Paz juga semakin berkembang pesat.<sup>116</sup> Namun, Di tengah pesatnya perkembangan sektor agraria tersebut pemerintah Bolivia mengambil langkah kebijakan yang tidak populer di masyarakat dengan keputusan untuk menaikkan harga hasil pertanian secara tinggi yang mengakibatkan merebaknya tuntutan dan protes di kalangan petani.<sup>117</sup> Adanya tuntutan dari di kalangan petani tersebut tidak direspon secara baik oleh pemerintahan Hugo Banzer. Justru sebaliknya, pemerintah menggunakan tindakan represif untuk menghadapi protes di kalangan petani. Salah satu contoh tindakan represif rezim junta militer terjadi pada tahun 1974 saat jenderal Hugo Banzer mengerahkan kekuatan bersenjata untuk menghadapi protes kelompok petani di wilayah Tolata, provinsi Cochamba.<sup>118</sup> Pengerahan kekuatan bersenjata tersebut berakhir tragis dengan pembantaian keji aparat militer yang menewaskan lebih dari 200 orang petani Bolivia.<sup>119</sup>

Kasus pembantaian terhadap petani di Tolata, provinsi Cochabamba telah memicu masyarakat *indigenous* untuk kembali memainkan peranan pentingnya dalam mempengaruhi struktur sosial dan politik di Bolivia. Tindakan rezim militer pimpinan jenderal Hugo Banzer yang berusaha menghambat pertumbuhan organisasi di kalangan masyarakat *indigenous* tidak serta merta membuat mobilisasi dan tuntutan masyarakat *indigenous* menjadi surut. Sebaliknya, dalam era rezim militer Hugo Banzer, kelompok masyarakat *indigenous* khususnya komunitas suku Aymara aktif melakukan perlawanan bawah tanah terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok-kelompok *indigenous* tersebut mulai melakukan konsolidasi kekuatan dibawah kepemimpinan gerakan Katarista yang bangkit di era 1970-an dan awal tahun 1980-an. Gerakan Katarista sendiri adalah gerakan masyarakat *indigenous* yang mengambil

<sup>115</sup> Sandra Salt, "Towards Hegemony: The Rise of Bolivia Indigenous Movements", *Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Master of Arts in The Department of Political Science, Canada, Simon Fraser University, 2006*, hlm. 38.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Kohl, Farthing. *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>119</sup> *Ibid.*



nama dari *Tupac Katari*, yakni pemberontakan suku Aymara pada abad ke 18.<sup>120</sup> Gerakan ini didirikan pada akhir tahun 1960-an, dilatarbelakangi oleh bangkitnya identitas *indigenous* diantara kelompok terpelajar suku Aymara dan kalangan intelektual (kelas menengah) perkotaan di La Paz.<sup>121</sup> Lewat gerakan ini, mereka mulai menekankan pentingnya identitas, kultur budaya dan konsep kosmologi dari masyarakat *indigenous*.<sup>122</sup> Pada era 1970-an dan 1980-an, kelompok kelas menengah intelektual Aymara tersebut menyebarkan gerakan Katarista hingga pelosok pedesaan dan sukses memobilisasi serta mengorganisir komunitas masyarakat *indigenous* yang ada menjadi sebuah kekuatan politik yang cukup berpengaruh di Bolivia.<sup>123</sup> Hal ini ditunjukkan dengan peranan penting gerakan Katarista dalam menjembatani aliansi antara serikat pekerja dengan serikat petani lewat pendirian *Confederation Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia* ( *Unitary Union Confederation of Bolivia Peasant Workers*, CSUTCB).<sup>124</sup> Gerakan Katarista juga mulai mencoba menyalurkan aspirasi dan tuntutan masyarakat *indigenous* dengan mendirikan partai politik. Pertama, mereka mendirikan *Partido Accion Nacional* pada tahun 1960 yang setelah dilakukan reorganisasi berubah namanya menjadi *Movimiento Nacional Tupac Katari* pada tahun 1968 dan terakhir pada tahun 1978 menjadi *Movimiento Indio Tupac Katari* (MITKA).<sup>125</sup>

Meskipun gerakan Katarista telah menjadi pemimpin utama dari gerakan-gerakan sosial yang bermunculan di masa rezim militer serta mencoba masuk ke ranah politik, gerakan ini terbukti masih gagal membangun dukungan publik yang kuat dan menjadi partai politik yang bersatu. Perpecahan internal yang ditunjukkan dengan munculnya berbagai faksi ditambah dengan buruknya kepemimpinan dalam struktur organisasi telah membuat gerakan Katarista beserta partai politik yang

<sup>120</sup> Donna Lee Van Cott, *From Movement to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 53.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>122</sup> Deborah J. Yashar, *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and The Post Liberal Challenge* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm.154.

<sup>123</sup> Salt, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>124</sup> Willem Assies, Ton Salmana, "Ethnicity and Politics in Bolivia" dalam *Ethnopolitics*, Vol. 4, No. 3, 269-297, 2005, hlm. 273.

<sup>125</sup> Yashar, *op.cit.*, hlm. 168.

didirikannya tidak pernah bisa meraih lebih dari 3 % suara pemilih dalam pemilihan umum di Bolivia.<sup>126</sup>

## **2.5 Masa Setelah Transisi Demokrasi Hingga Pemberlakuan Undang-Undang Partisipasi Populer (1985-1994)**

Memasuki tahun 1977, legitimasi pemerintahan diktator militer jenderal Hugo Banzer mulai goyah akibat adanya resesi perekonomian dan juga tekanan dari kelompok oposisi dalam struktur politik Bolivia untuk menerapkan proses demokratisasi secara penuh.<sup>127</sup> Pada saat yang bersamaan, konteks politik internasional yang ditandai oleh adanya gelombang demokratisasi ketiga (*The Third Wave of Democratization*) di berbagai belahan dunia semakin mendesak dipromosikannya nilai-nilai hak asasi manusia secara universal serta diakhirinya kepemimpinan rezim militer khususnya di kawasan Amerika Latin.<sup>128</sup> Desakan yang kuat untuk menerapkan proses demokratisasi di Bolivia tersebut berujung dengan tumbangannya kepemimpinan diktator militer jenderal Hugo Banzer melalui kudeta pada tahun 1978. Meskipun demikian, berakhirnya rezim militer jenderal Hugo Banzer ternyata tidak membuat proses menuju transisi demokrasi berjalan dengan mudah di Bolivia. Dalam periode menuju transisi demokrasi yang dimulai pada bulan Januari tahun 1978 hingga bulan Oktober 1982, Bolivia tercatat telah mengalami lima pemerintahan transisi di kalangan sipil dan militer ditambah dengan pelaksanaan dua pemilu yang gagal dan empat kali percobaan kudeta.<sup>129</sup> Setelah dilanda berbagai bentuk ketidakstabilan politik, lembaran sejarah baru di Bolivia akhirnya terjadi setelah pemerintahan militer transisi jenderal Guido Vildoso Calderon menyerahkan sepenuhnya pemerintahan Bolivia ke tangan kelompok sipil pada bulan Juli tahun

<sup>126</sup> George Gray Molina, "The Crisis in Bolivia : Challenges of Democracy, Conflict and Human Security", makalah yang dipublikasikan oleh *International IDEA*, hlm. 29.

<sup>127</sup> Rene Antonio Mayorga, "Bolivia's Democracy at The Crossroads", dalam Frances Hagopian, Scott Mainwaring, *The Third Wave of Democratization in Latin America: Advance and Setbacks*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 151.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>129</sup> *Ibid.*

1982.<sup>130</sup> Kongres Bolivia melantik Hernan Siles Suazo sebagai presiden terpilih pada tanggal 10 Oktober tahun 1982 yang sekaligus menandai dimulainya era transisi demokrasi di Bolivia setelah 18 tahun lamanya berada dalam kepemimpinan rezim militer.

Setelah transisi demokrasi bergulir di Bolivia, pemerintahan sipil pimpinan Hernan Siles Suazo segera dihadapkan oleh tantangan sosial-ekonomi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Tantangan tersebut adalah jatuhnya perekonomian Bolivia akibat krisis fiskal dan membengkaknya hutang luar negeri hingga mencapai US\$ 5 triliun warisan dari korupsi dan salah urus penyelenggaraan pemerintahan pada masa rezim militer jenderal Hugo Banzer dan Luis Garcia Mezza. Menurut laporan dari berbagai pakar ekonomi, pada pertengahan tahun 1985, Bolivia telah mengalami laju tingkat inflasi yang paling tinggi dalam sejarah berdirinya negara tersebut yakni berkisar antara 14,000 hingga 25,000 %.<sup>131</sup> Krisis perekonomian yang mengguncang Bolivia tersebut menyebabkan derasnya tuntutan agar Hernan Siles Suazo mundur dari jabatannya sebagai presiden serta mempercepat pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1985.<sup>132</sup>

Pemilihan umum Bolivia akhirnya berhasil diselenggarakan pada tahun 1985. Partai ADN berhasil meraih suara sebanyak 32,8 % diikuti dengan partai MNR yang meraih suara sebanyak 30,4%.<sup>133</sup> Meskipun tidak ada satupun partai yang mampu meraih lebih dari setengah jumlah pemilih, pemerintahan baru dapat terbentuk setelah terjadi negoisasi antar partai politik didalam Kongres Bolivia. Negoisasi tersebut melahirkan sebuah pakta politik yang dikenal dengan istilah *Pacted Democracy* (Pakta Demokrasi) bentukan partai MNR dan ADN untuk menjembatani koalisi dan membangun dukungan yang kuat di dalam Kongres Bolivia.<sup>134</sup> Setelah pakta

<sup>130</sup> Morales, *op.cit.*, hlm. 194.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>132</sup> Miguel Cantellas, *The Consolidation of Bolivian Poliarchy, 1985-1997*, makalah yang dipresentasikan dalam *57th Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 15-17 April 1999*, hlm. 8.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>134</sup> George Gray Molina, Gonzalo Chavez, "The Political Economy of The Crisis in Andean Region : The Case of Bolivia" dalam Andres Solimano, *Political Crises, Social Conflict and Economic*

demokrasi terbentuk, Banzer Suarez dari partai ADN sepakat untuk menyerahkan kepemimpinan koalisi partai kepada wakil dari partai MNR yakni Victor Paz Estensoro. Penyerahan kursi kepresidenan Banzer Suarez kepada Victor Paz Estensoro menjadi catatan sejarah tersendiri dalam sistim politik Bolivia dimana untuk pertama kalinya sejak tahun 1964, proses transisi pemerintahan sipil dapat berlangsung secara damai lewat mekanisme pemilihan umum.<sup>135</sup>

Pembentukan pemerintahan yang baru lewat pemberlakuan pakta demokrasi dibawah kepemimpinan Victor Paz Espanstoro dari Partai MNR segera diikuti oleh kebijakan ekonomi yang agresif untuk mengatasi dampak meledaknya tingkat inflasi dan krisis perekonomian di Bolivia. Berdasarkan saran dari IMF (*International Monetary Fund*) dan juga ekonom dari Universitas Harvard yakni Jeffrey Sachs, presiden Victor Pazz Espanstoro mengumumkan pemberlakuan dekrit 21060 yang dikenal pula dengan sebutan Nueva Politica Economica (NPE) atau *New Economic Policy* (NEP) pada tanggal 29 Agustus 1985.<sup>136</sup> Kebijakan ekonomi baru atau *New Economic Policy* (NEP) tersebut ditopang oleh tiga pilar utama yakni : (1) Kontrol atas defisit fiskal dan pembekuan terhadap harga dan gaji, (2) Liberalisasi perekonomian, (3) Pelimpahan peranan yang progresif kepada sektor swasta untuk mengelola perekonomian.<sup>137</sup>

Pada masa-masa awal pemberlakuannya, kebijakan NEP terbukti sukses mengatasi inflasi dan memicu pertumbuhan ekonomi Bolivia. Memasuki tahun 1987, laju inflasi yang pada tahun 1985 mencapai lebih dari 20 % berhasil ditekan hingga sebesar 14,5 %. Pertumbuhan ekonomi Bolivia juga berada pada angka positif yakni sebesar 4,7% diikuti dengan naiknya penerimaan dalam negeri yang mencapai US\$

*Development: The Political Economy of The Andean Region*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc, 2005) hlm. 78.

<sup>135</sup> Cantellas, *loc.cit*, hlm. 8.

<sup>136</sup> Jennifer M. Cyr, "The Political Party System and Democratic Crisis in Bolivia (El Sistema De Partidos Politicos Y La Crisis Democratica En Bolivia)", *makalah yang dipresentasikan dalam VII Congreso Espanol de Ciencia Politica y de la Administracion: Democracia y Buen Gobierno*, hlm. 9

<sup>137</sup> Solimano, *loc.cit.*, hlm. 78.

200.00 dibandingkan pada tahun 1985 yang hanya sebesar US\$ 620.00.<sup>138</sup> Kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal yang diterapkan di masa pemerintahan Presiden Victor Pazz Espantoro kembali dilanjutkan pada masa pemerintahan presiden Jaime Pazz Zamora yang berkuasa dari tahun 1989 hingga tahun 1993. Contohnya terlihat dengan pemberlakuan *dekrit* 22407 pada tahun 1990 yang intinya melanjutkan kebijakan privatisasi industri dan pengurangan anggaran bagi sektor publik. Pada tahun 1992, sebanyak 100 dari 159 perusahaan milik negara telah dijual kepada pihak swasta.<sup>139</sup>

Meskipun laju inflasi dapat dikendalikan lewat pemberlakuan kebijakan NEP, namun ternyata kebijakan ini gagal memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor mikro ekonomi. Hal ini terbukti dari semakin tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan dan juga ketimpangan sosial di Bolivia. Sebagai contoh, pada masa pemberlakuan kebijakan NEP, presiden Victor Pazz Espantoro memutuskan untuk membekukan serikat buruh, menangkap pemimpinnya serta menutup perusahaan milik negara di bidang pertambangan yakni CONMIBOL, yang akhirnya berdampak terhadap pemutusan kerja bagi 23.000 dari total sebanyak 28.000 orang buruh pertambangan.<sup>140</sup> Antara tahun 1985 hingga tahun 1987, total jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan milik negara berkurang drastis dari 32.000 orang menjadi 7000 orang.<sup>141</sup> Pada tahun 1988, alokasi bagi pembukaan lapangan kerja juga telah dikurangi sebesar 17 %.<sup>142</sup>

Memasuki tahun 1993, Bolivia kembali melaksanakan pemilihan umum yang berhasil dimenangkan oleh Gonzalo Sanchez de Lozada dari partai MNR. Administrasi pemerintahan Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada menandai dimulainya serangkaian kebijakan reformasi politik dan ekonomi yang dianggap ambisius, antara lain : kapitalisasi bisnis publik, dan reformasi pendidikan (1993),

<sup>138</sup> Merile Grindele, "Shadowing The Past? Policy Reform in Bolivia, 1985-2002 ", dalam Merile Grindele, Juan Domingo Pilar, *Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective* (Cambridge: Harvard University Press), hlm. 324.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Stephan Haggard, Robert R. Kaufman, *The Political Economy of Democratic Transitions* (Princeton: Princeton University Press, 1995), hlm. 203.

<sup>142</sup> Grindele, *op.cit.*, hlm. 324.

Undang-Undang Partisipasi Populer (1994), kebijakan desentralisasi (1995) dan reformasi dana pensiun, privatisasi bisnis ke tangan swasta serta reformasi kepemilikan tanah (1996).<sup>143</sup> Salah satu kebijakan pemerintahan Gonzalo Sanchez de Lozada yang cukup fundamental adalah kebijakan undang-undang partisipasi populer (*Law of Popular Participation*) pada tahun 1994. Pelaksanaan Undang-Undang Partisipasi Populer yang dilaksanakan di masa pemerintahan Gonzalo Sanchez de Lozada bertujuan untuk : (1) Mengurangi laju urbanisasi penduduk pedesaan ke perkotaan, (2) Menghilangkan ketimpangan dalam struktur sosial dan wilayah di Bolivia, (3) Untuk mempromosikan partisipasi warga negara terlepas dari perbedaan struktur sosial dan etnik di Bolivia, (4) Redistribusi sumber daya ekonomi secara merata di Bolivia.<sup>144</sup>

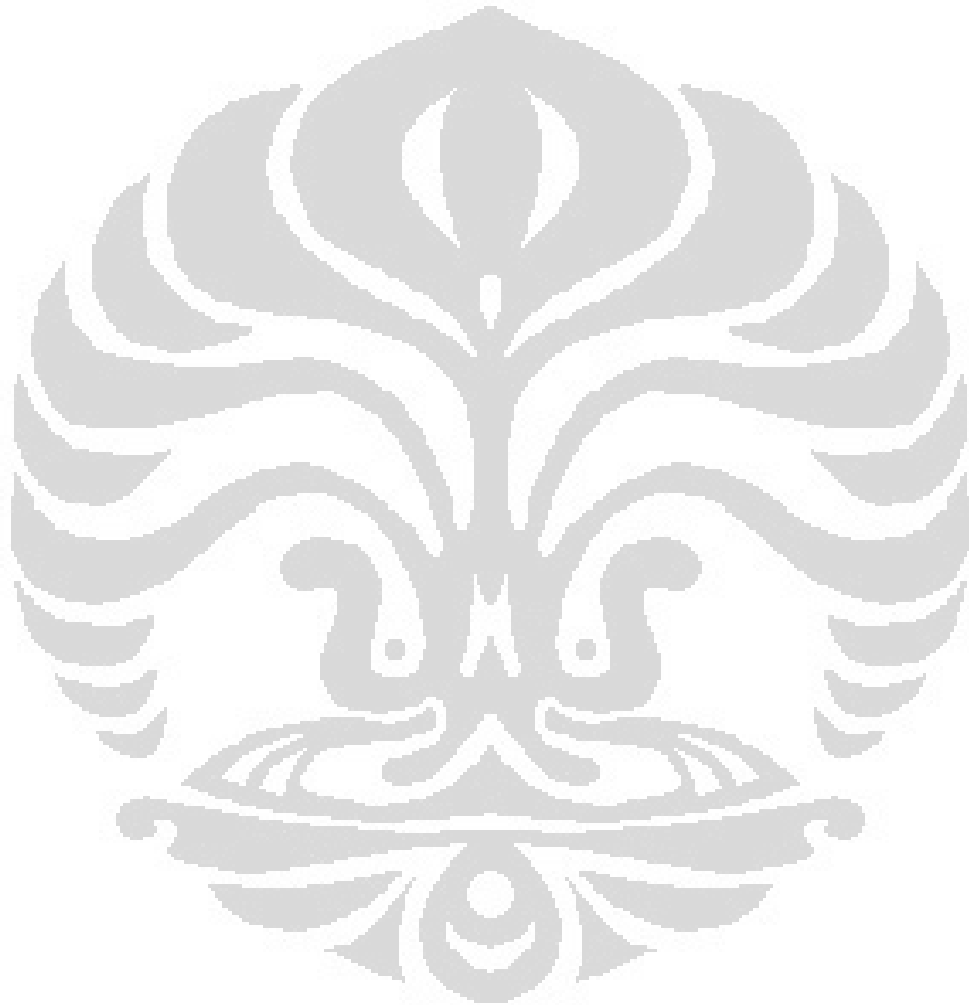
Undang-undang partisipasi populer ini tidak saja ditujukan bagi pembangunan yang lebih merata di tingkat lokal tapi juga membuka ruang bagi partisipasi politik warga negara dalam proses pengambilan kebijakan.<sup>145</sup> Implementasi dari kebijakan undang-undang partisipasi populer oleh pemerintah Bolivia diwujudkan dengan pemberian pengakuan resmi terhadap berbagai organisasi gerakan sosial yang telah berdiri sejak lama atau memfasilitasi pembentukan organisasi di tingkat akar rumput (*grass-root*), organisasi sosial masyarakat perkotaan, gerakan sosial penduduk asli, dan serikat petani modern. Selain itu, adanya LPP juga telah membuka kesempatan bagi kekuatan-kekuatan politik yang selama ini dimarginalisasikan dalam struktur masyarakat Bolivia untuk masuk kedalam arena pertarungan kekuasaan melalui pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kabupaten dan kota. Hal inilah yang menjadi momentum emas bagi gerakan sosial penduduk asli untuk semakin mempertajam tuntutan dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan. Undang-undang partisipasi populer ini pula yang selanjutnya dimanfaatkan oleh gerakan sosial penduduk asli di Bolivia untuk mendirikan partai politik. Salah

<sup>143</sup> Cyr, *loc.cit.*, hlm. 9.

<sup>144</sup> Cantelas, *loc.cit.*, hlm. 8.

<sup>145</sup> Penjelasan yang lebih lengkap mengenai kebijakan desentralisasi atau LPP dapat dilihat dalam : Kathleen O'neill, *Decentralizing State: Election, Parties and Local Power in Andes*, (Cambridge:Cambridge University Press, 2005).

satunya adalah gerakan petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) yang akan penulis jelaskan dalam pembabakan selanjutnya dari penelitian ini.



### BAB 3

## KEMUNCULAN GERAKAN PETANI KOKA (*COCALEROS*) DAN TRANSFORMASINYA MENJADI PARTAI POLITIK

Sebagaimana penjelasan penulis dalam bab sebelumnya, sistem oligarki kepartaian di Bolivia yang ikut ditopang oleh kebijakan berkarakteristik neoliberal telah terbukti membawa dampak yang merugikan bagi warga negara khususnya komunitas penduduk asli (*indigenous*) di Bolivia. Sebagai akibat dari oligarki kepartaian dan berbagai praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat *indigenous* tersebut, berbagai gerakan sosial muncul untuk menyuarakan tuntutan maupun aspirasi masyarakat yang selama ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Bolivia. Kecenderungan menguatnya peranan gerakan sosial khususnya gerakan sosial penduduk asli di Bolivia mulai terjadi di era 1980-an. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya berbagai gerakan sosial di Bolivia seperti Cocaleros (serikat petani koka *indigenous*), gerakan *indigenous* di kawasan Amazon (*The Indigenous Movement of the Amazon Region*), *The Confederation Indigena del Oriente Boliviano* (CIDOB), *Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CSUCTB), serta beberapa gerakan lainnya yang bersifat lokal di dataran tinggi Bolivia yang berusaha untuk mempertahankan atau menguatkan kultur budaya masyarakat *indigenous*.<sup>146</sup>

Memasuki akhir dekade 1990-an beberapa gerakan sosial di kalangan masyarakat *indigenous* seperti CIDOB mengalami perpecahan internal dan pada waktu yang bersamaan, gerakan-gerakan sosio-kultural masyarakat *indigenous* di wilayah dataran tinggi Bolivia masih memfokuskan perjuangannya di tingkat komunitas lokal saja.<sup>147</sup> Meskipun demikian, gerakan sosial petani koka *indigenous* (*Cocaleros*) terus menemukan momentumnya dengan memimpin konfederasi petani

<sup>146</sup> Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai munculnya berbagai gerakan sosial masyarakat *indigenous* di kawasan Amerika Latin, khususnya Bolivia, dapat dilihat dalam: Deborah J. Yashar, Democracy, "Indigenous Movement and the Postliberal Challenge in Latin America", *World Politics*, Vol 52, No.1, pp. 76-104, 1999.

<sup>147</sup> Salt, *loc.cit.*, hlm. 117.



Bolivia atau *The Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CSUTCB) dan selanjutnya mendirikan partai politik yakni *The Assamblea de la Soberania de Los Pueblos (Assembly for Sovereignty of People /ASP)*.<sup>148</sup> ASP berhasil memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan umum di tingkat lokal (Chapare) pada tahun 1995 dan meraih empat kursi dalam parlemen Bolivia dalam pemilihan umum legislatif tahun 1999. Pada tahun 1999, ASP berubah nama menjadi partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) dan berhasil meraup suara pemilih sebanyak 22,46% sedikit dibawah partai politik tradisional MNR pada pemilihan umum tahun 2002. Puncak keberhasilan partai MAS akhirnya terjadi pada pemilihan umum tahun 2005 dengan perolehan suara mayoritas sebanyak 53,7% suara pemilih.<sup>149</sup>

Tentunya menarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai konteks sosial-politik yang berperan membentuk gerakan sosial petani koka *indigenous (Cocaleros)* hingga perkembangannya menjadi partai politik di tingkat nasional (MAS). Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan menjelaskan proses awal pembentukan gerakan petani koka (*Cocaleros*), proses transformasinya menjadi partai politik MAS hingga kemenangannya melalui pemilihan umum tahun 2005.

### **3.1 Proses Awal Terbentuknya Gerakan Sosial Petani Koka Indigenous (Cocaleros) di Bolivia**

Wilayah Chapare yang terletak di utara provinsi Cochabamba, Bolivia merupakan basis awal terbentuknya serikat petani koka *indigenous (Cocaleros)*. Dikenal pula dengan istilah “El Chapare”, topografi wilayah ini sebagian besar didominasi oleh lembah hutan hujan tropis dan dialiri sungai Chapare sepanjang 278 km yang bermuara hingga ke sungai Amazon.<sup>150</sup> Wilayah ini pada awalnya sering digambarkan oleh banyak orang sebagai wilayah yang tidak subur, miskin sumber

<sup>148</sup>Fauzia Mahmoud, *Evo Morales From the Andes: New Vision, New Voices*, diunduh dalam situs: [http://www.watsoninstitute.org/events\\_detail.cfm?id=1127](http://www.watsoninstitute.org/events_detail.cfm?id=1127), pada tanggal 6 Agustus 2010, pukul: 19:12 WIB.

<sup>149</sup>Federico Fuentes, *Bolivia Communitarian Socialism*, diunduh dalam situs: <http://links.org.au/node/988>, pada tanggal 6 Agustus 2010, pukul: 19:17 WIB.

<sup>150</sup>Zachery Boyd, “From Saboteur to Politician: Bolivia’s Cocaleros of El Chapare”, *Master's thesis on resistance and political empowerment of Bolivia's coca growers, 2008*, hlm. 26.

daya alam dan rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir karena sebagian besar merupakan hutan hujan tropis. Hingga pertengahan abad ke 20, wilayah Chapare sangat jarang ditempati oleh penduduk dan cenderung terisolir dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Bolivia. Situasi tersebut baru berubah setelah revolusi nasionalis pimpinan MNR pada tahun 1952 ketika pemerintah Bolivia memutuskan untuk membuka lahan dan pemukiman penduduk di kawasan Chapare. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan reformasi agraria yang ditandai dengan pembagian tanah secara masif kepada para petani tanpa tanah, dan membuat berbagai insentif untuk mengembangkan wilayah Chapare sebagai wilayah pertanian dan pemukiman penduduk.<sup>151</sup>

Sebagai respon atas diberlakukannya kebijakan reformasi agraria dan pembukaan lahan untuk pertanian, para petani Bolivia mulai bermigrasi ke wilayah Chapare. Hingga tahun 1967, jumlah imigran di wilayah Chapare tercatat mencapai angka 24.000 jiwa. Jumlah imigran ini terus bertambah hingga tahun 1987 yang mencapai angka 250.000 jiwa.<sup>152</sup> Sebanyak 62 % dari imigran yang menempati wilayah Chapare merupakan petani tanpa tanah dan berasal dari wilayah miskin perkotaan serta wilayah pertanian besar milik para tuan tanah (*Hacienda*) di wilayah timur Bolivia.<sup>153</sup> Sedangkan 38 % imigran lainnya pernah memiliki tanah, namun sebagian besar hanya memiliki tidak lebih dari satu hektar tanah. Didorong oleh adanya reformasi agraria, para imigran ini terus berdatangan ke wilayah Chapare yang meskipun tidak begitu subur namun tetap menyediakan kesempatan bagi mereka untuk membuka lahan pertanian dalam skala kecil (*smallholding*).<sup>154</sup>

Pada awalnya, para imigran petani yang tinggal di wilayah Chapare menanam beberapa komoditas pertanian seperti pisang, citrus, padi, jagung dan dalam taraf yang terbatas koka dan gula. Akan tetapi kontur alam yang kurang subur di Chapare yang ditandai dengan tingginya kadar keasaman tanah dan rendahnya kandungan

<sup>151</sup> Morales, *op.cit.*, hlm. 147.

<sup>152</sup> Salt, *loc.cit.*, hlm. 65.

<sup>153</sup> Filipe E. Mac Gregor, *Coca and Cocaine: An Andean Perspective*, (West Port: Green Wood Press, 1993), hlm. 5.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

fosfor dan nitrogen membuat sebagian besar komoditas pertanian tersebut tidak berkembang dengan baik. Hal ini ditambah lagi dengan sarana transportasi seperti jalan raya yang buruk serta ketidakmampuan petani Chapare yang miskin untuk mengelola komoditas pertanian yang ada karena minimnya alat pertanian yang modern.<sup>155</sup>

Dalam situasi sulit yang dialami oleh para petani tersebut, tanaman koka menyediakan alternatif yang menjanjikan untuk menyambung hidup atau menopang penghasilan mereka sehari-hari. Menurut Liliana Ayelde, ketua dari agen bantuan internasional Amerika Serikat untuk pembangunan di Bolivia atau *US Agency for International Development (USAID)*: “Tanaman koka dapat terus tumbuh bahkan dalam kondisi iklim yang tidak menguntungkan”. “Petani juga tidak perlu dikhawatirkan oleh jatuhnya harga di pasaran dan wabah/hama pertanian yang merusak dan tanaman ini juga menghasilkan harga yang tinggi di pasaran”.<sup>156</sup> Berbagai studi yang dilakukan oleh para ilmuwan juga membuktikan bahwa nilai jual tanaman koka menguntungkan dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Sebagai contoh, dalam tahun 1985 saja, sebanyak 100 pound tanaman koka 30 kali lipat lebih banyak menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan 225 pound kentang (yang merupakan komoditi pertanian terbesar di dataran tinggi Bolivia).<sup>157</sup> Tanaman ini juga bisa dipanen beberapa kali dalam setahun, mudah dikeringkan, sangat ringan dan mudah didistribusikan.

Kecenderungan petani Chapare untuk mengandalkan tanaman koka sebagai komoditas pertanian semakin menguat terutama sejak terjadinya *Coca Boom* atau melonjaknya produksi tanaman koka pada era 1970-an dan 1980-an. Terjadinya *Coca Boom* sendiri dilatarbelakangi oleh jatuhnya harga berbagai komoditas pertanian di Bolivia. Pada awal tahun 1970-an, pemerintah Bolivia menggantungkan diri pada kapas sebagai komoditas pertanian utama dan berhasil memberikan insentif terhadap

<sup>155</sup> Boyd, *loc.cit.*, hlm. 28.

<sup>156</sup> Noam Lupu, “Towards a New Articulation of Alternative Development: Lessons From Coca Supply Reduction in Bolivia”, dalam *Development Policy Review*, Vol. 22, No. 4, pp. 405-421, hlm. 408.

<sup>157</sup> Harry Sanabria, *The Coca Boom and Rural Social Change in Bolivia*, (An Arbor: University of Michigan Press, 1993), hlm. 57.

petani. Hal tersebut ditandai dengan upaya dari bank agrikultur Bolivia (Banco Agricola) untuk menginvestasikan dana sebesar 52% untuk pembangunan industri kapas pada tahun 1974.<sup>158</sup> Akan tetapi pada tahun yang sama, harga kapas di pasaran dunia menurun secara drastis yang mengakibatkan para petani harus mencari jalan alternatif untuk menekan kerugian hasil pertanian.<sup>159</sup> Pada akhirnya pilihan para petani terhadap komoditas pertanian alternatif jatuh kepada tanaman koka dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya. Tingkat permintaan terhadap koka dari Amerika Serikat dan Eropa (yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kokain) juga semakin meningkat dan dengan sendirinya menaikkan harga koka di pasaran internasional.

Sebagai catatan penting, tanaman koka ternyata tidak hanya digunakan sebagai komoditas pertanian andalan yang digunakan oleh para petani di wilayah Chapare saja. Tanaman koka bukanlah sekadar komoditas pertanian yang menghasilkan keuntungan bagi para petani namun lebih jauh lagi, tanaman ini merepresentasikan simbol kultural terutama bagi masyarakat *indigenous* di Bolivia. Tanaman ini sejak berabad-abad yang lalu telah digunakan sebagai obat penahan rasa lapar, kelelahan, berbagai penyakit, meningkatkan produksi oksigen kedalam otak manusia di wilayah dataran tinggi serta simbol kultural dan religius bagi masyarakat *indigenous* di Bolivia.<sup>160</sup> Disamping itu, tanaman koka juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat anastesi, sirup, anggur, permen karet, pasta gigi dan minuman berkarbonasi atau Coca-Cola.<sup>161</sup>

Mengingat begitu pentingnya tanaman koka sebagai sumber utama penghasilan utama para petani dan sebagai sebuah simbol kultural bagi kalangan *indigenous*, tidaklah berlebihan apabila Alisson Spedding, seorang antropolog menyebut bahwa produksi tanaman koka merupakan suatu fakta sosial yang utuh (*total social fact*) terkait dalam kontes ekologi dan struktur sosial komunitas atau

<sup>158</sup> Dominic Streatfield, *Cocaine: An Unauthorized Biography* (New York: Picador, 2001), hlm. 81.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>160</sup> Benjamin Dangl, *The Price of Fire: Resource War and Social Movements in Bolivia* (Edinburgh: AK Press, 2007), hlm. 37.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

keluarga petani di Bolivia (Chapare).<sup>162</sup> Fakta sosial yang utuh ini disebabkan karena kegiatan penanaman koka merupakan aktivitas penting bagi komunitas masyarakat migran di Chapare. Imigran-imigran baru yang berdatangan ke wilayah ini menemukan berbagai komunitas yang telah menetap sebelumnya dan bersedia membantu mereka membuka lahan pertanian koka yang baru. Adanya komunitas para petani migran di wilayah Chapare menjadi sangat penting karena didorong oleh dua alasan utama yakni : (1) pembentukan komunitas diantara para petani merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan mengingat kondisi alam yang keras di wilayah Chapare yang mengharuskan mereka untuk bekerjasama agar dapat bertahan hidup di wilayah ini. (2) Pembentukan komunitas merupakan tradisi kultural bagi para petani. Identitas mereka diikat secara komunal dibandingkan dengan individual. Nilai nilai tersebut diterapkan pertama di lingkungan keluarga dan kedua di lingkungan komunitas mereka.<sup>163</sup> Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa mayoritas para petani migran di wilayah Chapare berasal dari komunitas masyarakat adat (*indigenous*) di Bolivia terutama suku Aymara dan Quechua yang sangat terikat dengan nilai-nilai komunal (kebersamaan) dan secara bersama-sama mempertahankan tradisi menanam tanaman koka sebagai budaya turun-temurun serta praktik yang bersifat religius sesuai dengan keyakinan mereka.<sup>164</sup>

Seiring dengan meningkatnya jumlah imigran petani ke wilayah Chapare dan semakin pentingnya tanaman koka sebagai komoditas ekonomi dan simbol kultural, maka para migrant petani di wilayah Chapare sepakat untuk membentuk serikat petani (*peasant union*). Dimulai sejak tahun 1960-an, mereka berusaha memberikan pengaruh dalam pemerintahan di tingkat lokal sekaligus mengambil tanggung jawab dalam berbagai tugas penting mulai dari upaya pendistribusian tanah, penyelesaian sengketa tanah hingga pembangunan beberapa fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit dan jalan raya. Peranan para petani tersebut diwujudkan lewat pembentukan

<sup>162</sup> Alisson Spedding, "The Coca Field is a Total Social Fact" dalam Madeline Barbara Leons, Harry Sanabria, *Coca, Cocaine and the Bolivian Reality*, (New York: State University of New York Press, 1997), hlm. 47.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>164</sup> Donna Lee Van Cott, "From Exclusion to Inclusion: Bolivia's 2002 Elections", dalam *Journal of Latin America Studies*, Vol. 35, No. 4, 2003, (November) 751-776, hlm. 762.

serikat petani atau *Sindicatos of the Chapare* yang terbagi lewat berbagai komunitas dalam naungan ranting organisasi besar yang dinamakan *centrales* dan akhirnya terorganisir kedalam enam federasi besar serikat petani (*Federacion*). Enam federasi petani koka (*Cocaleros*) ini mewakili sekitar 45.000 keluarga petani yang terorganisir hingga kurang lebih 700 serikat petani lokal dengan dua federasi serikat petani terbesar yakni *Federacion Especial de Trabajadores Campesinos del Tropico de Cochamba* dan *Federacion de Carrasco* yang menempati sekitar 85% dari keanggotaan serikat petani koka (*Cocaleros*) yang ada di wilayah Chapare.<sup>165</sup>

Mobilisasi di kalangan petani indigenous lewat pendirian gerakan petani koka (*Cocaleros*) semakin diperkuat oleh situasi perekonomian Bolivia yang jatuh pada tahun 1980-an. Akibat laju inflasi yang tinggi diikuti dengan jatuhnya harga timah di pasaran internasional, pemerintahan Bolivia yang terdiri dari koalisi partai-partai politik tradisional pimpinan MNR menerapkan kebijakan berkarakteristik neoliberal berdasarkan saran Amerika Serikat dan lembaga keuangan dunia. Salah satu langkah kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal tersebut adalah privatisasi perusahaan tambang timah milik negara (CONMIBOL) ke tangan pihak swasta. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Bolivia dengan menutup perusahaan pertambangan milik negara (CONMIBOL) yang berhujung terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap sedikitnya 23.000 orang buruh.<sup>166</sup>

Pemutusan kerja yang berakibat terhadap pengangguran bagi para buruh tambang tersebut membuat mereka mencari alternatif pekerjaan untuk bertahan hidup di tengah situasi perekonomian yang sedang diterpa krisis. Para buruh ini akhirnya memutuskan untuk bermigrasi ke wilayah Chapare dan beralih profesi menjadi petani koka.<sup>167</sup> Dari sinilah mobilisasi gerakan petani koka (*Cocaleros*) semakin menguat. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa para mantan buruh-buruh perusahaan tambang ini memiliki basis organisasi serikat buruh yang kuat (COB atau

<sup>165</sup> Linda Farthing, Kathryn Ledebur, "The Beat Goes On: The US War on Coca", dalam *Nacla Report on the Americas: Report on Bolivia*, November-December, 2004, pp. 34-41, hlm. 37.

<sup>166</sup> Kohl, Farthing, *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>167</sup> Federico Fuentes, "Cocaleros Will Not To Be Eradicated", diunduh dalam situs : <http://www.greenleft.org.au/node/31273>, pada tanggal 8 Agustus 2010 pukul 10:05 WIB.

*Bolivian Worker Center* yang merupakan organisasi serikat buruh terbesar di Bolivia) serta akar sejarah panjang tradisi perlawanan terhadap struktur negara.<sup>168</sup> Kebanyakan dari para buruh tambang ini juga berasal dari komunitas masyarakat *indigenous* di Bolivia.

Faktor penting lainnya yang ikut mempengaruhi penguatan mobilisasi terhadap gerakan petani koka (*Cocaleros*) adalah intervensi negara lewat kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka yang juga dimulai pada saat Bolivia memasuki era rezim pemerintahan berkarakteristik neoliberal pada dekade 1980-an. Akibat intervensi negara tersebut, kegiatan penanaman daun koka oleh para petani dan mantan para buruh perusahaan negara ini semakin berkembang tidak hanya sebagai upaya untuk bertahan hidup dan simbol pemersatu secara kultural saja namun lebih jauh lagi sebagai upaya perlawanan terhadap struktur negara yang dianggap tidak mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Khusus mengenai penjelasan terhadap intervensi pemerintah Bolivia tersebut akan dijelaskan lebih jauh dalam pembabakan selanjutnya dari tulisan ini.

### **3.2 Intervensi Pemerintah Bolivia Lewat Kebijakan Pemusnahan Budidaya Tanaman Koka**

Sebagaimana penjelasan penulis pada bagian awal bab ini bahwa tanaman koka terbukti memegang peranan penting baik dalam sisi perekonomian Bolivia khususnya bagi para petani *indigenous* sekaligus sebagai simbol pemersatu kultural diantara mereka. Namun berbanding terbalik dengan vitalnya peranan koka sebagai sumber mata pencaharian dan kontinuitas kultural bagi petani *indigenous*, Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia justru memandang tanaman koka sebagai bahan baku pembuatan kokain yang merupakan zat adiktif berbahaya (narkotika). Pandangan negatif dari Amerika Serikat terhadap produksi tanaman koka berujung terhadap intervensi negara ini terhadap pemerintah Bolivia dalam upaya memberantas produksi tanaman koka. Alasan utama dibalik intervensi Amerika Serikat terhadap Bolivia lewat pemusnahan budidaya koka adalah peningkatan yang signifikan dari

<sup>168</sup> *Ibid.*

pengguna zat adiktif terlarang yakni kokain (yang bahan bakunya berasal dari tanaman koka) di Amerika Serikat. Menurut survey yang dipublikasikan oleh lembaga penanggulangan narkoba atau *The National Household Survey on Drugs Abuse* (NHSDA) tercatat adanya presentase peningkatan pemakai kokain di Amerika Serikat dari sebanyak 10,2 % pemakai pada tahun 1977 hingga mencapai 18,8 % pemakai pada tahun 1982.<sup>169</sup> Memasuki tahun 1996 diperkirakan terdapat hampir 2 juta orang pemakai kokain di Amerika Serikat.<sup>170</sup>

Amerika Serikat memulai intervensinya terhadap Bolivia dalam upaya pemberantasan tanaman koka pada awal dekade 1980-an. Upaya awal intervensi Amerika Serikat ini diwujudkan secara terselubung dengan wujudnya berupa pengiriman agen bantuan Amerika Serikat untuk pembangunan di Bolivia (USAID) yang disahkan lewat perjanjian dengan pemerintah Bolivia pada tahun 1983 atau dikenal dengan sebutan *Chapare Regional Development Program (CRDP)*.<sup>171</sup>

CRDP dan program alternatif pembangunan lainnya yang dirancang oleh USAID bertujuan untuk membantu para petani koka mengembangkan produksi pertanian alternatif dengan model pendayagunaan ekspor produksi pertanian (*export oriented model*).<sup>172</sup> Berbagai insentif dan bantuan teknis dijanjikan oleh USAID kepada para petani dengan syarat berupa pengurangan produksi tanaman koka yang telah menjadi tulang punggung mata pencaharian mereka. Program USAID berupa CRDP tersebut dianggap sebagai solusi yang ideal untuk mengatasi permasalahan mengenai narkoba (kokain). Produksi kokain akan dapat ditekan karena bahan baku untuk membuatnya yakni tanaman koka telah dikurangi secara drastis dan disisi

<sup>169</sup> Data yang penulis peroleh didapat dari hasil studi yang pernah dipublikasikan oleh *National Institute on Drug Abuse di Amerika Serikat pada tahun 1984*. Penjelasan yang lebih komprehensif dapat dilihat dalam : Nicholas J. Kozel, Edgar H. Adams, *Cocaine Used in America : Epidemiologic and Clinical Perspective*, diunduh dalam situs: <http://archives.drugabuse.gov/pdf/monographs/61.pdf>, pada tanggal 8 Agustus 2010, pukul 11: 00 WIB.

<sup>170</sup> William L. Marcy, Jorrit Kamminga, *The Politics of Cocaine: How US Policy Has Created a Thriving Drug Industry in Central and South America* (Chicago: Lawrence Hill Books, 2010), hlm. 230.

<sup>171</sup> Fernando Garcia Argaranas, "The Drug War at the Supply End : The Case of Bolivia", dalam *Latin America Perspective: Neoliberal Policies and Resistance*, Vol. 24, No. 5, pp. 59-80, 1997, hlm. 63

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 63.



lainnya petani juga akan mendapatkan kompensasi serta bantuan sehingga mereka bisa keluar dari jerat perdagangan narkoba.

Harapan Amerika Serikat untuk menekan produksi koka melalui instrumen kebijakan komoditas pertanian alternatif ternyata tidak menemui sasaran. Hal ini disebabkan karena program pembangunan alternatif tersebut dirancang secara serampangan dan tidak dipersiapkan dengan matang.<sup>173</sup> Berbagai contoh keserampangan program alternatif pembangunan tersebut misalnya terlihat dengan buruknya rencana pembangunan jalan raya sebagai sarana yang akan digunakan para petani untuk mengeksport hasil-hasil produksi pertanian alternatif. Selain itu, para petani didorong untuk menginvestasikan usahanya kepada komoditas pertanian alternatif seperti buah-buahan tropis atau kopi, akan tetapi, alat-alat pertanian seperti mesin pengering tidak pernah sampai kepada mereka. Para petani juga diberikan jaminan bahwa komoditas pertanian alternatif jauh menghasilkan keuntungan bagi mereka. Namun lagi-lagi janji dari pemerintah Bolivia ini tidak terealisasi karena terbukti komoditas pertanian alternatif gagal bersaing di pasar internasional maupun domestik serta tidak menghasilkan keuntungan yang besar untuk para petani. Masalah ini ditambah dengan buruknya koordinasi antara pemerintah Amerika Serikat dan Bolivia sehingga dana yang ditujukan untuk program pembangunan alternatif banyak yang hanya sampai di tingkat aparat pemerintah pusat baik di La Paz maupun Washington.

Akibat berbagai bentuk keserampangan rencana dan pelaksanaan yang buruk dari program pembangunan alternatif ini, Amerika Serikat dan pemerintah Bolivia gagal memenuhi target pengurangan produksi tanaman koka sebesar 70%. Kegagalan tersebut membuat Amerika Serikat terus menekan pemerintah Bolivia dalam upaya pengurangan produksi koka. Setelah program pembangunan alternatif gagal, pemerintah Amerika Serikat mulai beralih menggunakan strategi pemusnahan budidaya tanaman koka secara paksa (*Force Eradication*) dalam kerangka kebijakan

<sup>173</sup> Penjelasan secara lebih lengkap dan komprehensif mengenai buruknya perencanaan program pembangunan pertanian alternatif yang dirancang oleh USAID dapat dilihat dalam : Francisco Thoumy, *Illegal Drugs, Economy and Society in the Andes*, (Baltimore: The John Hopkins University Press, 2003) .

perang melawan narkoba (*War on Drugs*). Pemerintah Amerika Serikat juga membentuk *United States Drug Enforcement Agency* (USDEA) sebagai upaya memberantas produksi tanaman koka lewat pengerahan kekuatan militer yang represif.<sup>174</sup>

Dengan dimulainya kampanye perang melawan narkoba, Amerika Serikat semakin meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah Bolivia. Amerika Serikat secara terus menerus memberikan bantuan dana kepada pemerintah Bolivia diikuti pemaksaan untuk memusnahkan produksi tanaman koka di wilayah Chapare yang merupakan sentral produksi koka. Puncak keberhasilan Amerika Serikat untuk menekan pemerintah Bolivia akhirnya berujung dengan disahkannya undang-undang pemberantasan budidaya tanaman koka atau Law 1008 (*Ley del Regimen de la Coca y Sustancias Controladas*) oleh Kongres Bolivia pada tahun 1988. Undang-Undang ini berisi ketentuan bahwa seluruh tanaman koka di wilayah Chapare harus dimusnahkan dan hanya 12 hektar tanah di Yungas (wilayah Bolivia) yang diizinkan untuk ditanami koka.<sup>175</sup> Lebih jauh lagi, menurut ketentuan Law 108 seluruh tanaman koka yang ditanam setelah berlakunya undang-undang ini dianggap ilegal namun demikian petani akan dijanjikan kompensasi dan bantuan dana dari kebijakan pemberantasan budidaya koka tersebut.

Amerika Serikat dan pemerintah Bolivia mengklaim bahwa undang-undang pemberantasan budidaya tanaman koka (Law 1008) tidak akan menelantarkan nasib petani dan yakin bahwa para petani akan dengan sukarela memusnahkan ladang-ladang koka yang mereka tanami. Seperti pada kebijakan pembangunan alternatif yang diberlakukan sebelum undang-undang ini, para petani dijanjikan kompensasi

<sup>174</sup> Sebagai bentuk pelampiasan atas kegagalan program pembangunan alternatif pertanian yang dirancang oleh USAID, Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah Bolivia mulai beralih menggunakan kekuatan militer dan cara-cara yang bersifat koersif dalam kampanye pemberantasan budidaya tanaman koka. *Operation Blast Furnace* dan *Operation Snowcap* merupakan beberapa contoh operasi militer yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah Bolivia dalam upaya pemberantasan budidaya tanaman koka. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat dalam Ted Gallen Carpenter, *Bad Neighbor Policy : Washington's Futile War on Drugs in Latin America* (New York: Palgrave Macmillan, 2003).

<sup>175</sup> Medeline Barbara Leons, Harry Sanabria, "Coca and Cocaine in Bolivia: Reality and Policy Illusion" dalam *Madeline Barbara Leons, Harry Sanabria, Coca, Cocaine and the Bolivian Reality* (New York: State University of New York Press, 1997), hlm. 22.

untuk setiap ladang koka yang mereka musnahkan dan uang tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan produksi pertanian lainnya.<sup>176</sup> Akan tetapi, dibandingkan dengan langkah damai dan kompensasi yang dijanjikan kepada petani, pemerintah Amerika Serikat dan Bolivia justru lebih mengedepankan cara-cara kekerasan dalam upaya pemberantasan budidaya tanaman koka. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pengerahan kekuatan militer dalam mengurangi produksi tanaman koka serta banyak para petani beserta keluarganya yang dipenjarakan oleh aparat militer Bolivia.<sup>177</sup> Pengerahan kekuatan militer lewat cara yang represif tersebut akhirnya mendorong para petani untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Bolivia yang didukung oleh Amerika Serikat. Perlawanan para petani koka tersebut diorganisir dalam wadah berdirinya serikat petani koka (*Cocaleros*) yang mobilisasinya diperkuat oleh para mantan buruh perusahaan negara yang terkena imbas dari kebijakan privatisasi pada tahun 1985. Serentak setelah undang-undang pemusnahan koka (Law 1008) diberlakukan pada tahun 1988, *Cocaleros* mengorganisir sedikitnya 15.000 orang petani untuk melakukan serangkaian blokade jalan di wilayah Cochabamba, Bolivia.<sup>178</sup> Tindakan yang dilakukan oleh *Cocaleros* tersebut langsung direspon oleh pemerintah Bolivia dengan mengirimkan pasukan dan polisi bersenjata untuk membubarkan mobilisasi di Cochabamba yang berujung dengan tewasnya 6 orang petani dan belasan lainnya luka-luka.

<sup>176</sup> Boyd, *loc.cit.*, hlm. 38. Para petani koka dijanjikan kompensasi dana sebesar US\$ 2000 dari setiap hektar ladang koka yang mereka musnahkan secara sukarela. Idealnya, kompensasi yang diterima para petani tersebut akan digunakan untuk membantu mereka mengembangkan komoditas pertanian alternatif diluar dari tanaman koka.

<sup>177</sup> Dalam pelaksanaan undang-undang pemberantasan budidaya tanaman koka lewat pemberlakuan *Law 1008*, banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Bolivia terhadap para petani koka *indigenous*. Pada tahun 1987 saja, di penjara San Sebastian yang terletak di wilayah Cochabamba tercatat 8 orang petani koka laki-laki dan 2 petani koka perempuan mendekam dalam penjara ini. Jumlah tersebut terus bertambah pada tahun 1994 dimana 175 orang petani koka laki-laki dan 80 orang petani koka perempuan dipenjarakan oleh aparat militer pemerintah Bolivia. Diperkirakan jumlah total petani yang dipenjarakan selama pemberlakuan Law 1008 tercatat mencapai angka 1400 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1000 orang petani dipenjarakan tanpa proses pengadilan dan tidak memperoleh kesempatan mengajukan pembelaan dalam persidangan. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam: James Patton, "Counter Development and Bolivian Coca War", dalam *The Fletcher Journal of Development Studies*, Vol. 17, 2002, hlm. 5.

<sup>178</sup> Boyd, *loc.cit.*, hlm. 39.

Tindakan represif pemerintah Bolivia tersebut tidak menyurutkan perlawanan para petani koka. Perlawanan *Cocaleros* justru semakin menguat dan berkembang melalui berbagai cara yang mereka lakukan di tengah terbatasnya kekuatan mereka yang harus berhadapan dengan aparat pemerintah yang bersenjata lengkap. Selain mengorganisir blokade jalan sebagai langkah alternatif menghadapi kekerasan militer, perlawanan *Cocaleros* terhadap aparatus pemerintah Bolivia juga dilakukan antara lain dengan cara : (1) Melancarkan perang yang bersifat psikologis (*psy war*) kepada aparat pemerintah Bolivia. Salah satu bentuk *psy war* yang dilakukan oleh *Cocaleros* yakni mengerahkan para perempuan anggota *Cocaleros* untuk menghadang upaya para petugas keamanan pemerintah Bolivia yang sedang bertugas memusnahkan ladang koka milik para petani sambil mengejek dan menantang para petugas keamanan pemerintah yang dianggap telah menindas budaya dan identitas penduduk asli (*indigenous*). (2) Melakukan pemusnahan ladang koka namun membuka ladang koka di tempat lainnya dengan memanfaatkan modal insentif yang didapat dari pemerintah sebagai ganti rugi pemusnahan ladang koka yang dilakukan oleh petani secara sukarela. (3) Melakukan perlawanan gerilya terhadap aparat keamanan pemerintah Bolivia yang bersenjata lengkap lewat berbagai bentuk sabotase terhadap alat-alat transportasi yang digunakan oleh para aparat keamanan dalam pemusnahan ladang koka seperti tank gas atau menawarkan makanan yang sudah diracuni sebelumnya kepada para petugas keamanan pemerintah. (4) Para petani secara terus-menerus menyebarluaskan berbagai kabar mengenai tindak kekerasan serta kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam hal kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka kepada kelompok petani lainnya sehingga memudahkan mobilisasi perlawanan terhadap aparat pemerintah Bolivia.<sup>179</sup>

Akibat gigihnya perlawanan petani koka, berbagai intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan pemerintah Bolivia dalam upaya memberantas budidaya tanaman koka seperti yang terlihat dengan penerapan Law 1008 terus menemui kegagalan. Sebaliknya, memasuki dekade 1990-an, *Cocaleros* semakin bertumbuhkembang menjadi organisasi gerakan petani koka yang militan dan

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

terorganisir dengan baik. Pada tahun 1990, *Cocaleros* telah berhasil mengembangkan jaringan luas dalam gerakan mereka dengan mendirikan 160 basis gerakan petani (*Sindicatos*) dibawah naungan 30 sub-federasi yang tergabung dalam 5 federasi besar *Cocaleros*.<sup>180</sup> Tahun 1994, ditenggarai oleh kegagalan undang-undang pemberantasan budidaya koka (Law 1008) dan berbagai program alternatif pembangunan lainnya, pemerintahan baru Bolivia dibawah presiden Gonzalo Sanchez de Lozada memberlakukan kebijakan baru dalam hal pemberantasan budidaya tanaman koka yang dikenal dengan istilah “*Zero Option*”.<sup>181</sup> Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengubah kawasan Chapare dari posisinya sebagai sentral produksi koka menjadi kawasan industri.<sup>182</sup> Amerika Serikat mendukung penuh kebijakan “*Zero Option*” dengan menjanjikan pencairan dana kepada pemerintah Bolivia guna keberhasilan program tersebut. Akan tetapi dana yang dijanjikan Amerika Serikat tidak pernah sampai kepada pemerintah Bolivia yang akhirnya terpaksa membatalkan kebijakan “*Zero Option*”. Peningkatan kekuatan militer pemerintah Bolivia atas dukungan Amerika Serikat juga tidak terbukti mampu menekan mobilisasi *Cocaleros* yang semakin meningkat dan target pemusnahan budidaya tanaman koka kembali gagal menemui sasaran yang ingin dicapai.

### **3.3 Transformasi *Cocaleros* Menjadi Partai Politik MAS (*Movimiento Al Socialismo*)**

Setelah melalui rangkaian panjang perlawanan terhadap pemerintah Bolivia dalam upaya pemusnahan budidaya tanaman koka, gerakan petani *Cocaleros* akhirnya menyadari bahwa mereka membutuhkan adanya suatu instrument politik yang memungkinkan mereka untuk merubah kebijakan pemerintah yang dianggap telah menyengsarakan kehidupan mereka. Upaya *Cocaleros* untuk mencoba masuk

<sup>180</sup> Kevin Healy, “Political Ascent of Bolivia Peasant Coca Leaf Producers”, dalam *Journal of Intraamerican Studies and World Affairs*, Vol. 31, No. 1, pp : 87-122, 1991, hlm. 88 .

<sup>181</sup> Harry Sanabria, “The State and the Ongoing Struggle Over Coca in Bolivia : Legitimacy, Hegemony and the Exercise of Power” dalam Mickael K. Steinberg, Joseph John Hobbs, Kent Mathewson, *Dangerous Harvest : Drug Plants and the Transformation of Indigenous Landscape*, (Oxford : Oxford University Press, 2004), hlm. 158.

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

melalui jalur politik ini mulai dilakukan semenjak tahun 1989 ketika mereka memutuskan beraliansi dengan partai politik “Kiri” *Izquierda Unida* (IU) dalam pemilihan umum di tingkat lokal. Dalam pemilihan umum di tingkat lokal tersebut, aliansi *Cocaleros* dan IU berhasil meraup suara 42 % pemilih. Wakil dari serikat petani koka, Juan Evo Morales Ayma juga berhasil menduduki kursi parlemen di tingkat lokal bersama dengan Roman Lozaya dari Konfederasi Nasional Petani Bolivia (CSUSCTB).<sup>183</sup> Keberhasilan *Cocaleros* yang beraliansi dengan IU dalam menempatkan wakilnya dalam pemerintahan daerah ini dapat dikatakan menjadi titik awal dirintisnya mobilisasi politik bagi *Cocaleros* yang kelak akan menjadi kekuatan utama partai berbasis gerakan sosial penduduk asli (*indigenous*) dibawah nama *Movimiento Al Socialismo* (MAS).

Momentum bagi *Cocaleros* untuk mendirikan instrumen politik yang mandiri dan terlepas dari aliansi dengan partai kiri di Bolivia terjadi disaat pemerintah Bolivia mengeluarkan kebijakan undang-undang partisipasi populer atau desentralisasi pada tahun 1994 (*The Law of Popular Participation*).<sup>184</sup> Pada intinya, tujuan utama pemerintah Bolivia menerapkan kebijakan undang-undang partisipasi populer adalah menciptakan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota yang mampu mengemban tanggung jawab mengelola infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal.

<sup>183</sup> Juan Evo Morales Ayma merupakan pemimpin serikat petani koka Bolivia (*Cocaleros*) yang kelak terpilih menjadi presiden *indigenous* pertama di Bolivia dalam pemilihan umum tahun 2005. Morales dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1959 dan berasal dari keluarga miskin petani *indigenous* suku Aymara. Pada usia 18 tahun, ia dan keluarganya bermigrasi ke wilayah Chapare, Cochabamba sebagai konsekuensi atas pembukaan lahan di wilayah ini berdasarkan kebijakan agraria yang membagikan tanah kepada para petani miskin. Morales melakukan aktivitas sebagai petani koka dan masuk kedalam keanggotaan organisasi serikat petani koka (*Cocaleros*) sejak dekade awal 1980-an. Pada tahun 1985 ia dipercaya menjadi sekretaris jendral federasi petani koka. Kemampuan berorganisasi yang baik membuat Morales terpilih sebagai presiden pusat federasi petani koka Bolivia pada tahun 1996. Setelah *Cocaleros* bertransformasi menjadi partai politik, Evo Morales mulai menapaki karir di bidang politik yang ditandai dengan terpilihnya ia menjadi anggota Senat Bolivia mewakili wilayah Chapare pada tahun 1997. Lihat dalam : *Who is Evo Morales and What is the MAS ?*, diunduh dalam situs: <http://www.boliviainfoforum.org.uk/inside-page.asp?section=3&page=31>, pada tanggal 13 Agustus 2010, pukul: 13:41 WIB

<sup>184</sup> Kebijakan desentralisasi atau *The Law of Popular Participation* (LPP) yang dilaksanakan pada masa pemerintahan presiden Gonzalo Sanchez de Lozada sejak tahun 1994 telah membuka ruang bagi pembentukan pemerintahan yang otonom di tingkat lokal serta partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat Bolivia, khususnya bagi kalangan penduduk asli (*indigenous*). Untuk penjelasan yang lebih lengkap dapat dilihat dalam: Benjamin Kohl, “Democratizing Decentralization in Bolivia : The Law of Popular Participation”, dalam *Journal of Planning Education and Research* 23: 153-164, 2003.

Implementasi dari kebijakan undang-undang partisipasi populer oleh pemerintah Bolivia diwujudkan dengan pemberian pengakuan resmi terhadap berbagai organisasi gerakan sosial yang telah berdiri sejak lama atau memfasilitasi pembentukan 15.000 organisasi di tingkat akar rumput (*grass-root*), organisasi sosial masyarakat perkotaan, gerakan sosial penduduk asli, dan serikat petani modern. Melalui undang-undang desentralisasi ini pula, pemerintah Bolivia membuka ruang bagi partisipasi politik masyarakat khususnya kalangan penduduk asli (*indigenous*) yang selama ini terabaikan. Lewat pembentukan sebanyak 311 pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, reformasi LPP memudahkan pendirian partai berbasis *indigenous* untuk mendaftarkan diri dan bertarung lewat mekanisme electoral atau pemilihan umum.

*Cocaleros* sebagai salah satu organisasi gerakan sosial penduduk asli telah berhasil memanfaatkan peluang dari kebijakan desentralisasi ini. Pada bulan maret 1995, *Cocaleros* mendirikan ASP (*Assembly for The Sovereignty of Common People*) dan IPSP (*The Political Tool for The Sovereignty of Common People*).<sup>185</sup> Pada tahun 1999 IPSP berubah nama menjadi *Movimiento Al Socialismo* (MAS) dan pada tahun yang sama berhasil meraih suara pemilih pada pemilihan umum di tingkat nasional sebesar 3,27% serta merebut 10 kursi gubernur dan 79 kursi dewan perwakilan daerah (*Municipal Council*).<sup>186</sup>

### **3.4 Peranan MAS Dalam Mobilisasi *Civil Society* Melawan Rezim Oligarki Politik Dan Neoliberal Di Bolivia**

Setelah bertransformasi dari gerakan sosial petani koka (*Cocaleros*), partai politik, MAS mulai berupaya untuk meluaskan basis perjuangan mereka. MAS tidak lagi hanya berupaya untuk memperjuangkan nasib para petani koka penduduk asli saja tapi juga membentuk proses pembingkaihan wacana mengenai demokratisasi, pemenuhan hak-hak kelompok penduduk asli hingga kritik terhadap kebijakan berkarakteristik neoliberalisme partai-partai politik tradisional di Bolivia. Upaya

<sup>185</sup> Federico Fuentes, "*Bolivia Communitarian Socialism*", diunduh dalam situs: <http://links.org.au/node/988>, pada tanggal 15 Agustus 2010, pukul: 09:51 WIB.

<sup>186</sup> Salt, *loc.cit.*, hlm. 128.

MAS dan *Cocaleros* (sebagai basis massanya) tersebut ikut didukung oleh kondisi sosial-politik di Bolivia yang ditandai dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Bolivia yang ditopang oleh kebijakan berkarakteristik neoliberal dalam penghujung abad ke dua puluh hingga paruh awal abad ke duapuluh satu. Berbagai protes dan tuntutan dari masyarakat dan gerakan-gerakan sosial terhadap pemerintah Bolivia yang menerapkan kebijakan pemberantasan budidaya tanaman koka serta kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal seperti privatisasi asset-asset milik publik pun semakin menguat. Disinilah proses pemingkakan wacana aksi kolektif yang dibangun oleh MAS menemui keberhasilan. MAS tidak saja mampu menjalin aliansi dan menggerakkan aksi kolektif masyarakat Bolivia dalam melakukan perlawanan terhadap rezim oligarki dan neoliberal di Bolivia tapi juga

Salah satu wujud peranan MAS dan *Cocaleros* sebagai basis masanya dalam memainkan peranan mobilisasi kolektif *civil society* melawan pemerintah Bolivia terlihat dalam kasus privatisasi air atau dikenal istilah *Water War* di provinsi Cochabamba pada tahun 2000.<sup>187</sup> Kasus privatisasi air atau water war di wilayah Cochabamba ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Bolivia lewat penjualan perusahaan air milik publik (pemerintah daerah) atas desakan Bank Dunia dan IMF ke tangan *Aguas del Turnari* atau konsorsium perusahaan swasta yang dipimpin oleh Bechtel yakni salah satu perusahaan swasta raksasa yang berasal dari Amerika Serikat. Masyarakat Cochabamba melawan kebijakan privatisasi perusahaan air tersebut dengan mendirikan *Coordinora* atau *The Commite to Defend Water and Life*. Bersama dengan *Coordinora*, *Cocaleros* ikut membantu melakukan berbagai bentuk protes terhadap kebijakan privatisasi air lewat serangkaian blokade jalan raya di wilayah Cochabamba. Pemerintah Bolivia merespon protes yang dilakukan oleh *Coordinora* dan *Cocaleros* tersebut dengan mengerahkan pasukan bersenjata dan berhasil membubarkan demonstran pada tanggal 8 April 2000. Akibat desakan yang kuat dari gerakan-gerakan sosial tersebut, pemerintah Bolivia akhirnya membatalkan kontrak karya perusahaan air di Cochabamba dengan perusahaan Bechtel. Pembatalan

<sup>187</sup> Untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai kasus “Water War” akibat kebijakan privatisasi perusahaan air di wilayah Cochabamba Bolivia dapat dilihat dalam: Emmanuel Lobina, “Cochabamba: Water War”, *Focus (PSI) Journal*, Vol.7, No.2, 2003



kontrak karya ini dapat dikatakan sebagai titik awal kemenangan awal dari gerakan-gerakan sosial terhadap kebijakan berkarakteristik neoliberal yang diterapkan di Bolivia sejak tahun 1985.<sup>188</sup> Kasus privatisasi air di Cochabamba juga menjadi sebuah momentum emas yang berhasil dimanfaatkan oleh komponen-komponen gerakan sosial untuk bersatu melawan kebijakan berkarakteristik neoliberal yang diusung oleh pemerintah Bolivia berikut dengan intervensi Amerika Serikat dibelakangnya.

Terdorong oleh kemenangan gerakan sosial dalam kasus privatisasi air di Cochabamba, *Cocaleros* dibawah pimpinan Evo Morales semakin meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah Bolivia. Dalam tuntutan mereka kepada pemerintah Bolivia untuk segera mengakhiri kebijakan pemusnahan budidaya koka serta pembangunan yang lebih baik di wilayah Chapare, *Cocaleros* bekerjasama dengan kalangan kelas menengah seperti serikat guru (*Teachers Union*) baik dari wilayah pedesaan dan juga perkotaan Bolivia menggerakkan berbagai demonstrasi pada bulan September 2000.<sup>189</sup> Memasuki tahun 2001, eskalasi demonstrasi *Cocaleros* dan gerakan-gerakan sosial lainnya semakin meluas. *Cocaleros* beserta gerakan-gerakan sosial seperti *Coordinora* menggerakkan long march yang dimulai dari berbagai provinsi di Bolivia dan berakhir di ibu kota La Paz. Mereka menuntut diakhirinya militerisasi di wilayah Chapare (basis *Cocaleros*), pendistribusian tanah kepada petani juga pembatalan Law 1008 (undang-undang tentang pemusnahan budidaya tanaman koka) dan DS 2160 (undang-undang tentang privatisasi di Bolivia).<sup>190</sup> Pemerintah Bolivia dibawah presiden Jorge Tito Quiroga merespon berbagai demonstrasi tersebut dengan pengerahan kekuatan militer. Akibat dari tindakan represif pemerintah Bolivia ini, demonstrasi damai yang digerakan oleh *Cocaleros* kerap kali berakhir dengan konflik berdarah yang menewaskan sejumlah petani koka

<sup>188</sup> Benjamin Kohl, "Challenges to Neoliberal Hegemony in Bolivia", makalah yang dipublikasikan oleh *Geography and Urban Studies, Temple University, Philadelphia, United States, 2006*, diunduh dari situs: <http://www.temple.edu/gus/kohl/documents/ChallengesNLHegAntipode..pdf>, hlm.4.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>190</sup> Oscar Oliviera, Tom Lewis, *Cochabamba!: Water War in Bolivia*, (Cambridge: South End Press, 2004), hlm. 62.

dan aparaturnya militer seperti terjadi dalam peristiwa penutupan paksa pasar koka di wilayah Sacaba pada bulan Januari 2002.<sup>191</sup>

Sebagai buntut dari maraknya berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh *Cocaleros* dan berbagai gerakan sosial lainnya terhadap pemerintah, Evo Morales sebagai pimpinan gerakan petani koka (*Cocaleros*) yang juga merupakan anggota Kongres terpilih dari provinsi Chapare dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Bolivia.<sup>192</sup> Dikeluarkannya Evo Morales dari keanggotaan Kongres Bolivia justru mengundang simpati dari sebagian besar masyarakat Bolivia terhadap perjuangan *Cocaleros* yang berani melawan intervensi Amerika Serikat dalam politik dalam negeri mereka.<sup>193</sup> Secara bersamaan, popularitas Evo Morales ikut menjulang sebagai salah satu tokoh oposisi nasional yang dikenal luas oleh publik khususnya dari kalangan penduduk asli dan difavoritkan untuk maju sebagai kandidat presiden dalam pemilihan umum tahun 2002. Patut ditekankan pula bahwa di tahun 2002, tanaman koka mulai muncul menjadi simbol semangat perlawanan masyarakat terhadap status quo (keberlangsungan pemerintahan oligarki partai politik tradisional). Hal ini didasarkan oleh tiga alasan utama, antara lain : (1) Tanaman koka sebagai simbol perlawanan telah melukiskan penderitaan para petani *indigenous* akibat kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka. (2) Simbolisme perlawanan lewat tanaman koka juga merepresentasikan perlawanan kelas buruh yang terkena imbas kebijakan berkarakteristik neoliberal lewat privatisasi perusahaan tambang milik negara yang membuat mereka kehilangan pekerjaannya sehingga beralih profesi menjadi petani koka untuk bertahan hidup. (3) Karena tanaman koka merupakan simbolisasi ketidakberdayaan masyarakat *indigenous* untuk mendapatkan hak-hak dan kebutuhan

<sup>191</sup> Tercatat 3 orang petani koka dan 4 orang aparat keamanan pemerintah Bolivia tewas dalam peristiwa penutupan pasar koka di wilayah Sacaba. Untuk penjelasan selengkapnya lihat dalam : *War Between Coca Farmers, Bolivia Rages on* dalam : <http://www.latinamericanstudies.org/bolivia/cocawar.htm>

<sup>192</sup> Sebanyak 104 anggota Kongres yang terdiri dari 5 partai politik yang berbeda dalam parlemen Bolivia sepakat untuk menandatangani surat keputusan untuk mengeluarkan Evo Morales dari keanggotaan Kongres. Morales dituduh sebagai pengorganisir berbagai demonstrasi *Cocaleros* dan gerakan-gerakan sosial lainnya di Bolivia dalam menentang kebijakan pemerintah. Lihat dalam: Hempri Suyatna, *Evo Morales: Presiden Bolivia Menentang Arogansi Amerika*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2007), hlm. 85.

<sup>193</sup> Van Cott, 2003, *loc.cit.*, hlm. 766.

dasar yang layak dalam kehidupannya sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, tanaman ini sekaligus merepresentasikan perlawanan dari komponen masyarakat Bolivia lainnya terhadap kebijakan privatisasi aset-aset milik publik (seperti dalam kebijakan privatisasi air di Cochabamba) yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia.<sup>194</sup>

Perubahan peta kekuatan politik di Bolivia mulai bergeser seiring dengan dilangsungkannya pemilihan umum di tingkat nasional yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2002. Pada pemilihan umum presiden, kandidat dari partai MAS yakni Evo Morales berhasil memberikan kejutan berarti terhadap dominasi partai politik tradisional di Bolivia dengan meraih suara 20,94 %, terpaut tipis dibawah kandidat presiden lainnya Gonzalo Sanchez de Lozada dari partai MNR yang meraih suara sebesar 22,46 %. Partai MAS juga berhasil merebut 8 kursi keanggotaan (Senator) dalam Senat dan 27 kursi (Deputi) dari sebanyak 130 kursi keanggotaan di dalam Kongres Bolivia. **(Dapat dilihat dalam tabel 3.1)**

**Tabel 3.1 Hasil Pemilihan Umum Tingkat Nasional di Bolivia Tahun 2002**

Partai	% Suara	Senator	Deputi	2002	1997
				Kursi	Kursi
Movimiento Nacional Revolucionario	22,46	11	36	47	30
Movimiento al Socialismo (IPSP)	20,94	8	27	35	4
Nueva Fuerza Republicana	20,92	2	23	27	0
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria	16,31	5	26	31	30
Movimiento Indígena Pachakutik	6,09		6	6	0
Unidad Cívica de Solidaridad	5,51		5	5	23
Acción Democrática Nacional	3,40	1	4	5	43
Libertad y Justicia	2,72		0	0	0
Partido Socialista	0,65		1	1	0
Movimiento Ciudadano para el Cambio	0,63			0	0
Condepa	0,37			0	22
		27	130	157	152

Sumber : Van Cott (2003)

<sup>194</sup> Olivera, *op.cit.*, hlm. 63.

Kemenangan Gonzalo Sanchez de Lozada sebagai kandidat yang dianggap tidak populer di mata sebagian besar masyarakat Bolivia dengan kebijakan-kebijakannya pada pemilihan umum tahun 2002 ternyata menimbulkan krisis kepercayaan terhadap demokrasi dan juga elit-elit partai politik tradisional. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan elit partai politik tradisional yang semakin memuncak tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintahan Gonzalo Sanchez de Lozada masih tetap meneruskan berbagai pola lama dari kebijakan partai-partai politik tradisional Bolivia. Beberapa karakteristik dari pola lama kebijakan partai politik tradisional ini ditandai oleh pengabaian tuntutan dan aspirasi masyarakat di tingkat bawah dan juga dilanjutkannya kebijakan berkarakteristik neoliberal yang terbukti gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bolivia.<sup>195</sup> Akibatnya, berbagai protes dan tuntutan dari masyarakat Bolivia terhadap pemerintah terus mengemuka seperti halnya dalam kasus kebijakan privatisasi hidrokarbon (gas) pada tahun 2003. Meluapnya protes atas kebijakan privatisasi hidrokarbon inilah yang mendorong munculnya mobilisasi masyarakat dan gerakan sosial melawan pemerintah Bolivia yang dikenal dengan peristiwa perang gas (*Gas War*). Peristiwa ini menandai jatuhnya legitimasi rezim oligarki partai politik tradisional di Bolivia. Peristiwa ini dapat dikatakan menjadi momentum bagi partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) untuk naik ke dalam tampuk pemerintahan lewat pemilihan umum tahun 2005. Melalui peristiwa ini pula MAS beserta pemimpinnya Evo Morales untuk kesekian kalinya memainkan peranan penting dalam memobilisasi masyarakat Bolivia menentang kebijakan privatisasi gas baik melalui demonstrasi maupun tekanan di parlemen Bolivia.

<sup>195</sup> Menurut analisis ilmuwan politik Ton Salman, semenjak pemerintahan diktator militer runtuh dan Bolivia mulai masuk ke dalam era transisi demokrasi di era 1980-an, partai-partai politik tradisional di Bolivia terus-menerus mempertahankan pola kebijakan yang tersentralistik, adopsi kebijakan berkarakteristik neoliberal serta pengabaian aspirasi atau tuntutan dari *civil society* (masyarakat). Pada masa kepresidenan Gonzalo Sanchez de Lozada tahun 2003, pola-pola lama dari kebijakan dari partai politik tradisional terlihat dengan penjualan asset sumber daya alam Bolivia seperti gas ke tangan konsorium perusahaan swasta luar negeri antara lain : Repsol YPF (Spanyol), British dan Pan American Gas (Inggris dan Amerika Serikat). Untuk analisis yang lebih lengkap dan komprehensif dapat dilihat pada : Ton Salman, "The Jammed Democracy : Bolivia's Trouble Political Learning Process", dalam *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 25, No. 2, pp. 163- 182, 2006.

Kesepakatan pemerintah Bolivia mengenai penjualan gas yang memicu munculnya peristiwa perang gas (*Gas War*) telah dilakukan sejak tahun 2001. Pada saat itu, pemerintahan presiden Jorge Tito Quiroga mulai melakukan pembicaraan atau negoisasi terkait dengan ekspor penyulingan gas Bolivia ke California, Amerika Serikat dengan perusahaan-perusahaan swasta luar negeri seperti: Pacific LNG, Repsol, British Gas, British Petroleum, France Total dan Prisma.<sup>196</sup> Karena rute penyulingan gas dari Bolivia dianggap sulit, maka jalur transportasi penyulingan gas dialihkan melalui samudra Pasifik dan Chile (dikarenakan sebagai negara terdekat dari Bolivia dan rute yang dianggap lebih murah dalam segi biaya transportasi penyulingan gas).<sup>197</sup> Akan tetapi, keputusan ekspor gas Bolivia melalui rute Chile langsung menghadapi perlawanan dari masyarakat Bolivia. Sengketa perbatasan garis batas wilayah pantai (*coast line*) dengan Chile pada tahun 1879 ternyata masih membekas dalam ingatan masyarakat Bolivia.<sup>198</sup> Karena negara ini pernah kehilangan wilayah dan sumber daya alamnya dari Chile, ditambah dengan keputusan untuk menjual gas melalui rute penyulingan dari negara tersebut, masyarakat Bolivia menganggap kebijakan ini tidak ubahnya sebagai bentuk penodaan atas harga diri dan kedaulatan negara Bolivia.

Kebijakan privatisasi hidrokarbon kembali dilanjutkan di masa kepresidenan Gonzalo Sanchez de Lozada. Dibawah tekanan kuat dari Amerika Serikat untuk menekan harga penjualan gas, Gonzalo Sanchez de Lozada setuju untuk membebankan hanya setengah dari harga jual gas Bolivia kepada Brazil. Menurut perkiraan para pakar ekonomi, meskipun target utama penerimaan negara dari penjualan gas adalah \$ US 1, 9 triliun, namun pada kenyataannya Bolivia hanya

<sup>196</sup> Gretchen Gordon, Aaron Louma, "Oil and Gas : The Elusive Wealth Beneath Their Feet", dalam : Jim Schultz, Melissa Draper, *Dignity and Defiance : Stories From Bolivia Challenge's to Globalization* (California : University of California Press, 2008), hlm. 90.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>198</sup> Bolivia dan Chile pernah mengalami sengketa wilayah perbatasan pada tahun 1879. Dalam konflik ini Bolivia kehilangan wilayah beserta sumber daya alamnya yang akhirnya jatuh ke tangan Chile. Kasus sengketa wilayah dengan Chile tidak dapat dipisahkan dari simbol nasionalisme bangsa Bolivia dan oleh karenanya keputusan untuk menjual gas Bolivia melalui Chile mendapat perlawanan keras dari masyarakat karena dianggap sebagai bentuk hilangnya harga diri bangsa Bolivia. Untuk penjelasan yang lebih lengkap dapat dilihat dalam : Thomas Perreault, "Natural Gas, Indigenous Mobilization and Bolivian State", *makalah yang dipublikasikan oleh United Nation Research Institute for Social Development, Juli, 2008.*

memperoleh keuntungan sebesar US \$ 119 juta, sedangkan perusahaan-perusahaan swasta luar negeri yang menyalurkan gas Bolivia dari Chile ke Meksiko dapat memperoleh keuntungan hingga US \$ 1 milyar setiap tahunnya.<sup>199</sup>

Kebijakan privatisasi hidrokarbon presiden Gonzalo Sanchez de Lozada segera berkembang menjadi isu nasional yang memecah belah struktur sosial Bolivia. Pihak pemerintah dengan dukungan lembaga keuangan internasional seperti *World Bank* tetap pada keputusan untuk menjual gas kepada konsorsium perusahaan swasta luar negeri. Sedangkan di pihak masyarakat Bolivia, perlawanan atas rencana penjualan gas terus bermunculan dengan mulai dibentuknya *Estado Mayor de Pueblo* (gerakan *civil society* menentang kebijakan penjualan gas Bolivia) pada bulan Juni 2003.<sup>200</sup> Evo Morales dan Oscar Olivera yang merupakan figur kunci dalam kasus *Water War* di Cochabamba pada tahun 2000 kembali memainkan peranan penting sebagai tokoh oposisi nasional menentang kebijakan privatisasi hidrokarbon ini. Selain itu, di parlemen, partai oposisi pimpinan Evo Morales yakni MAS juga terus aktif memberikan tekanan kepada pemerintah dengan cara mengajukan proposal pelaksanaan referendum (jajak pendapat) bagi seluruh masyarakat Bolivia sebagai salah satu solusi untuk menuntaskan permasalahan mengenai kebijakan penjualan gas oleh pemerintah.<sup>201</sup>

Tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat Bolivia agar pemerintah bersedia membatalkan kebijakan privatisasi hidrokarbon tidak mendapat respon yang berarti dari presiden Gonzalo Sanchez de Lozada. Dampaknya, tuntutan masyarakat Bolivia tersebut segera bereskalasi menjadi konflik berdarah yang dikenal dengan sebutan perang gas atau *Gas War* pada bulan September 2003. Massa rakyat mulai tumpah ke jalan-jalan raya di ibu kota La Paz sambil menyuarakan tuntutan agar pemerintah membatalkan rencananya menjual gas Bolivia kepada konsorsium perusahaan swasta luar negeri dengan melakukan berbagai demonstrasi dan blokade jalan raya. Pada tanggal 19 September 2003, Evo Morales dan Oscar Olivera berikut

<sup>199</sup> Gordon, Louisa, *op.cit.*, hlm. 91.

<sup>200</sup> Willem Assies, "Bolivia: A Gasified Democracy", dalam *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* 76(April) pp.25-43, 2004, hlm. 30.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

dengan massa dari partai MAS yang juga didukung oleh *Coordinora for Defence and Recuperation of Gas* memimpin langsung mobilisasi 50.000 orang demonstran yang terdiri dari kelas buruh, petani koka dan juga kelompok terpelajar di ibu kota La Paz dan 20.000 orang di wilayah Cochabamba, Bolivia.<sup>202</sup>

Blokade jalan raya yang dilakukan di kota La Paz dan daerah Lake Titicaca telah melumpuhkan aktivitas sosial dan juga mengurung para turis mancanegara yang sedang berkunjung ke Bolivia.<sup>203</sup> Sebagai langkah penyelamatan, pemerintahan Lozada langsung mengerahkan kekuatan militer guna keperluan evakuasi para turis asing tersebut dari Bolivia. Evakuasi militer tersebut dilakukan secara tergesa-gesa di tengah situasi demonstrasi dan blokade jalan raya yang mencekam di ibu kota La Paz. Hasilnya adalah jatuhnya korban jiwa yang tidak berdosa yang terdiri dari 6 orang diantaranya lima warga sipil dan satu orang gadis berusia 8 tahun.<sup>204</sup> Jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan aparat militer Bolivia semakin memperluas eskalasi demonstrasi dan blokade jalan dari La Paz dan El Alto hingga ke wilayah Cochabamba, Sucre dan Potosi. Tanggal 12 Oktober korban jiwa kembali berjatuhan. Sebanyak 20 warga sipil tewas akibat kekerasan aparat militer yang menggunakan tank untuk mengusir para demonstran di kota La Paz. Sehari kemudian, wakil presiden Carlos Mesa mulai menarik dukungan terhadap presiden Gonzalo Sanchez de Lozada diikuti dengan derasnya tuntutan dari kalangan intelektual, aktivis hak asasi manusia dan NGO (*Non Government Organization*) agar Lozada mundur dari jabatan presiden.

Legitimasi pemerintahan Gonzalo Sanchez de Lozada semakin tergerus dengan gelombang besar protes gerakan sosial dan masyarakat Bolivia pada tanggal 16 Oktober 2003. Sekitar 500.000 massa rakyat menggelar demonstrasi menuntut turunnya Gonzalo Sanchez de Lozada di ibu kota La Paz dan kota-kota lainnya di Bolivia. Karena tidak mampu lagi menahan gelombang protes yang besar dari masyarakat dan korban jiwa di pihak sipil yang terus berjatuhan hingga mencapai 100

<sup>202</sup> Forest Hylton, Sinclair Thomson, "The Chequered Rainbow", dalam *New Left Review* 35 (*September-October*), pp. 41-64, 2005, hlm. 54.

<sup>203</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>204</sup> Assies, *loc. cit.*, hlm. 30.

orang, Gonzalo Sanchez de Lozada akhirnya mundur dari jabatan presiden dan terbang ke Miami, Amerika Serikat pada tanggal 17 Oktober 2003. Carlos Mesa sebagai wakil presiden segera dilantik sebagai presiden baru Bolivia menggantikan Gonzalo Sanchez de Lozada untuk mengisi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*).<sup>205</sup> Jatuhnya presiden Gonzalo Sanchez de Lozada sekaligus menutup rangkaian peristiwa perang gas (*Gas War*) yang terjadi di Bolivia. Sebagai catatan penting, kasus perang gas tidak hanya merepresentasikan perlawanan terhadap kebijakan penjualan gas saja, namun juga penolakan masyarakat atas sistem oligarki politik dengan kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal yang hanya menguntungkan segelintir elit dalam struktur masyarakat Bolivia.<sup>206</sup> Seiring dengan hilangnya legitimasi sistem politik dan ekonomi lama yang telah diterapkan di Bolivia, gerakan-gerakan sosial segera menyusun berbagai tuntutan mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mereka (gerakan-gerakan sosial) menamakan tuntutan tersebut sebagai “Agenda Oktober” yang mencakup nasionalisasi dan industrialisasi gas, penulisan ulang konstitusi Bolivia dibawah naungan lembaga legislatif (*Constituent Assembly*) serta diajukannya proses hukum terhadap mantan presiden Gonzalo Sanchez de Lozada.<sup>207</sup>

### **3.5 Kemenangan Partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) Dalam Pemilihan Umum Bolivia Tahun 2005.**

Dilantiknya Carlos Mesa Gisbert sebagai presiden menggantikan Gonzalo Sanchez de Lozada seolah membuka harapan baru masyarakat Bolivia terhadap perubahan sosial-politik di negaranya yang telah lama dilanda oligarki elit, perpecahan sosial serta kemiskinan akibat intervensi kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal dari Amerika Serikat dan lembaga keuangan dunia. Segera

<sup>205</sup> Victoria Beard, Farafnak Miraftab, Christopher Silver, *Planning and Decentralization: Contested Space for Public Action in Global South* (Routledge: Taylor & Francis Library, 2008), hlm. 78.

<sup>206</sup> Gordon, Louna, *op.cit.*, hlm. 94.

<sup>207</sup> Jeffrey Weber, *Bolivia Second Gas War: Hopes and Limitation for Popular Force*, diunduh dalam situs : <http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article816>, pada tanggal 23 Agustus 2010, pukul : 16:20 WIB.



setelah meduduki jabatan presiden, Carlos Mesa berjanji memenuhi tuntutan-tuntutan dari gerakan sosial di Bolivia selepas berakhirnya perang gas atau dikenal dengan istilah Agenda Oktober yang meliputi nasionalisasi gas, penulisan ulang konstitusi Bolivia lewat pembentukan lembaga perwakilan (*constituent assembly*) yang baru dan pengadilan hukum bagi para aktor-aktor politik yang bersalah atas tewasnya warga sipil dalam peristiwa perang gas (*Gas War*) tahun 2003. Tidaklah mengherankan apabila janji-janji perubahan yang diucapkan Mesa tersebut telah berhasil menaikan dukungan dan popularitasnya di mata sebagian besar masyarakat Bolivia termasuk gerakan-gerakan sosial pada masa-masa awal kepemimpinannya. Dukungan bagi Carlos Mesa tidak hanya datang dari gerakan-gerakan sosial saja bahkan partai MAS pimpinan Evo Morales setuju untuk membangun dukungan bagi kepemimpinan Carlos Mesa didalam parlemen agar dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik.<sup>208</sup>

Sayangnya, dukungan dan kepercayaan yang diberikan bagi Carlos Mesa ternyata tidak diikuti dengan realisasi janji-janjinya terhadap tuntutan “Agenda Oktober” dari gerakan-gerakan sosial. Carlos Mesa ternyata tidak berani mengambil tindakan tegas untuk menasionalisasi atau setidaknya memperbesar keuntungan yang diperoleh oleh negara dari produksi sumber daya alamnya yakni gas. Mesa juga tidak mampu meredam gejolak perpecahan sosial dalam struktur masyarakat Bolivia yang semakin memuncak di era pemerintahannya. Hal ini ditandai dengan perlawanan terhadap rencana kebijakan nasionalisasi gas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oligarki bisnis Bolivia di wilayah dataran rendah Bolivia seperti Santra Cruz, Beni, Pando dan Tarija.<sup>209</sup> Kelompok oligarki bisnis tersebut khawatir akan

<sup>208</sup> Pada masa awal kepemimpinannya, Carlos Mesa mendapat banyak dukungan dari gerakan-gerakan sosial di Bolivia termasuk partai MAS pimpinan Evo Morales didalam parlemen. Keputusan aliansi partai MAS dengan pemerintahan Carlos Mesa tersebut didorong oleh janji presiden Mesa untuk meningkatkan peranan negara dalam mengontrol sumberdaya alam khususnya minyak dan gas. Namun ketika janji ini tidak dipenuhi oleh Mesa, partai MAS mencabut dukungannya dan turut serta dengan gerakan-gerakan sosial lainnya di Bolivia mengadakan demonstrasi menuntut turunya Mesa dari jabatan presiden. Lihat dalam: Jeffrey Webber, *Red October: “Left Indigenous Struggle in Bolivia, 2000-2005”*, A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for Degree of Doctor of Philosophy Graduate of Department of Political Science, University of Toronto, Canada, 2009, hlm. 284.

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

kehilangan kesempatan pembangunan dan juga keuntungan dari penjualan gas kepada perusahaan swasta luar negeri yang mereka dapatkan selama ini karena harus berbagi penerimaan negara dari sektor migas dengan kelompok masyarakat miskin di wilayah dataran tinggi Bolivia. Atas dasar pertimbangan bahwa kebijakan nasionalisasi gas hanya membuat investor asing enggan menanamkan modalnya di Bolivia, pemerintahan Carlos Mesa akhirnya lebih memilih untuk meneruskan pola lama kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal atas saran Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional. Dalam salah satu pidatonya di tahun 2005 beberapa bulan menjelang pengunduran dirinya sebagai presiden, Carlos Mesa menyatakan:

“Saya ingin menekankan bahwa undang-undang terkait dengan kebijakan nasionalisasi hidrokarbon merupakan suatu hal yang mustahil. Komunitas internasional tidak akan dapat menerima undang-undang ini dan hanya akan membuat perusahaan-perusahaan minyak dan gas dari negara-negara lain tidak mau menjalankan perjanjian kontrak karya di Bolivia. Apakah ini keputusan yang adil atau tidak, hal ini bisa menjadi tema diskusi dan perdebatan bagi kita semua. Namun satu hal yang pasti bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari tekanan negara-negara lain dan komunitas internasional : Brazil menekan kita, Spanyol menekan kita, bahkan Bank Dunia (*World Bank*), Amerika Serikat , Inggris , IMF (*International Monetary Fund*) dan komunitas negara-negara lainnya di Eropa ikut pula menekan kita. Kepada seluruh masyarakat Bolivia saya tegaskan, terimalah undang-undang yang dapat dijalankan dan juga dapat diterima oleh komunitas internasional.”<sup>210</sup>

Ketidakmampuan Carlos Mesa merealisasikan janji-janji perubahan yang diusungnya kembali menimbulkan gelombang protes yang besar dari gerakan-gerakan sosial dan sebagian besar masyarakat Bolivia. Evo Morales dan partai MAS yang sebelumnya beraliansi dengan pemerintah akhirnya memutuskan menarik dukungan mereka dan turut serta bersama gerakan sosial lainnya mengadakan

<sup>210</sup> Benjamin Kohl, Linda Farthing, “Less Than Fully Satisfactory Development Outcomes: International Financial Institutions and Social Unrest in Bolivia”, dalam *Latin American Perspective* (May), Vol. 36, No. 3, pp: 59-78, 2009, hlm. 71.

demonstrasi besar-besaran di wilayah-wilayah Bolivia termasuk ibu kota La Paz menuntut mundurnya presiden Carlos Mesa pada tanggal 16 Mei 2005. Carlos Mesa yang tidak sanggup lagi menahan gelombang protes masyarakat yang menguat tersebut dan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada bulan Juni 2005.<sup>211</sup> Eduardo Rodriguez Veltze sebagai jaksa agung Bolivia dilantik sebagai presiden sementara untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Veltze selepas menjabat presiden sementara adalah mempercepat pelaksanaan pemilihan umum Bolivia yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2005 lebih cepat dari jadwal sebelumnya yang ditetapkan yakni pada tahun 2007.

Sebagai catatan penting, Bolivia menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2005 di tengah kondisi struktur masyarakatnya yang terus-menerus dihipnotis oleh permasalahan klasik mengenai kemiskinan, eksploitasi dan diskriminasi sosial khususnya bagi kalangan penduduk asli (*indigenous*). Pola kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal yang telah lama diterapkan oleh partai-partai politik tradisional sejak tahun 1985 juga kian menambah sulitnya upaya negara dalam hal pemenuhan kesejahteraan di tataran *civil society*. Maka sangat tepat apabila ilmuwan politik James Dunkerley memandang bahwa penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2005 dibebani mandat untuk mengembalikan harapan baru masyarakat Bolivia menyangkut perbaikan situasi perekonomian, pemenuhan otonomi dan partisipasi politik yang luas khususnya bagi kalangan masyarakat yang termarginalkan dalam tataran struktur sosial politik diantaranya kelompok penduduk asli (*indigenous*).<sup>212</sup>

Dalam situasi sosial-politik Bolivia yang semakin pelik ditandai dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap elit-elit politik dan institusi perwakilan, Evo Morales dan partai berbasis gerakan sosial penduduk asli yakni MAS berupaya memanfaatkan masa jeda sebelum penyelenggaraan pemilihan umum untuk melakukan kampanye kepada masyarakat Bolivia dalam menuju kursi

<sup>211</sup> *Bolivia Human Rights*, diunduh pada situs: <http://www.amnestyusa.org/all-countries/bolivia/page.do?id=1011120>, pada tanggal 28 Agustus 2010, pukul: 10:09 WIB.

<sup>212</sup> Eduardo Silva, *Challenging Neoliberalism in Latin America*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 143.

kepresidenan. Morales dan partai MAS dalam kampanyenya menjanjikan pada masyarakat sebuah perubahan sosial politik lewat upaya membangun kembali Bolivia (*Refounding Bolivia*). Untuk mewujudkan upaya tersebut Morales dan partai MAS akan berusaha memfokuskan kebijakan pemerintahannya kelak apabila terpilih sebagai presiden antara lain dalam hal: (1) Memperkuat peranan pemerintah untuk mengontrol sumberdaya alam seperti minyak dan gas agar negara dapat memperoleh pendapatan yang layak dari asset-aset strategis tersebut. (2) Melegalkan produksi tanaman koka yang merupakan tulang punggung ekonomi dan identitas kultural bagi masyarakat *indigenous* Bolivia. (3) Reformasi tanah (agraria) untuk peningkatan kepemilikan lahan bagi para petani miskin (4) Membentuk lembaga perwakilan baru (*Constituent Assembly*) yang bertugas menyusun konstitusi atau undang-undang yang mendukung kebijakan nasionalis dan bersifat egalitarian.<sup>213</sup>

Pada tanggal 18 Desember 2005, Bolivia akhirnya menggelar pemilihan tingkat nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, 27 senator, dan juga 130 anggota Kongres.<sup>214</sup> Dalam pemilihan umum ini, Evo Morales berhasil merebut kursi presiden Bolivia dengan meraih suara pemilih sebesar 53,7%, suatu perolehan suara yang cukup besar untuk menghindari pemungutan suara (*voting*) di Kongres. Posisi perolehan suara di bawah Evo Morales diduduki oleh Jorge Tito Quiroga dari partai politik tradisional ADN/PODEMOS dengan jumlah suara sebesar 28,6 %. Sementara wakil dari partai MNR yang juga merupakan kekuatan politik lama Bolivia yakni Michiaki Nagatani berada di posisi ketiga dengan perolehan suara pemilih sebesar 6,5 % (**dapat dilihat dalam tabel 3.2**).

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>214</sup> Betilde Munoz Pogonian, *Electoral Rules and Transformation of Bolivian Politics: The Rise of Evo Morales* (New York: Pallgrave Macmillan, 2008 ) hlm. 178.

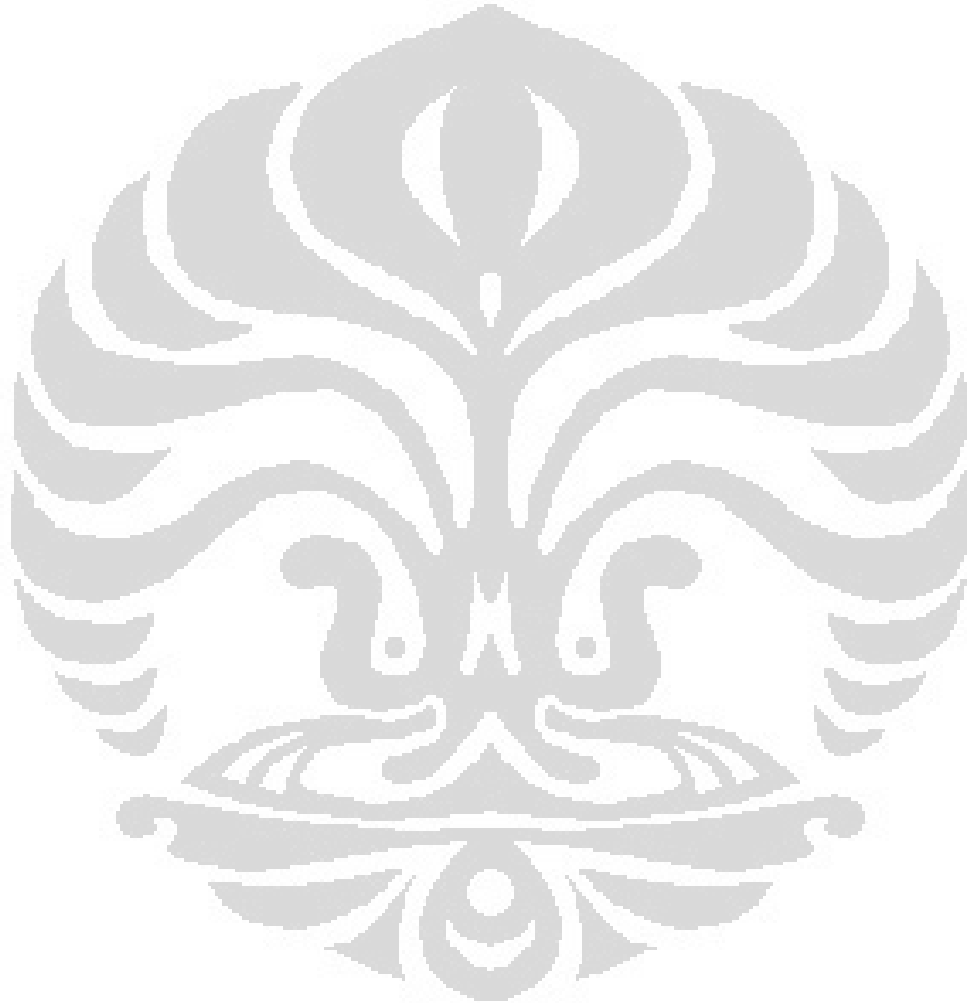
**Tabel 3.2 Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bolivia (Sejak Tahun 1985)**

Kandidat	Partai	1985	1989	1993	1997	2002	2005
Víctor Paz Estenssoro	MNR	26.4% <sup>a</sup>	-	-	-	-	-
Hugo Banzer	ADN	28.6%	-	-	-	-	-
Jaime Paz Zamora	MIR	-	19.6% <sup>b</sup>	-	-	-	-
Gonzalo Sánchez de Lozada	MNR	-	23.0%	-	-	-	-
Hugo Banzer	ADN	-	22.7%	-	-	-	-
Gonzalo Sánchez de Lozada	MNR	-	-	33.8%	-	-	-
Hugo Banzer	ADN	-	-	20.0%	-	-	-
Carlos Patenque Aviles	CONDEPA	-	-	13.6%	-	-	-
Max Fernández	UCS	-	-	13.1%	-	-	-
Antonio Aranibar Quiroga	MBL	-	-	5.1%	-	-	-
Hugo Banzer	ADN	-	-	-	22.3%	-	-
Juan Carlos Durán	MNR	-	-	-	17.7%	-	-
Jaime Paz Zamora	MIR	-	-	-	16.7%	-	-
Ivo Kuljis	UCS	-	-	-	15.9%	-	-
Remedios Loza	CONDEPA	-	-	-	15.9%	-	-
Gonzalo Sánchez de Lozada	MNR	-	-	-	-	22.5% <sup>a</sup>	-
Juan Evo Morales	MAS	-	-	-	-	20.9%	-
Manfred Reyes Villa	NFR	-	-	-	-	20.2%	-
Jaime Paz Zamora	MIR	-	-	-	-	16.3%	-
Felipe Quispe Huanca	MIP	-	-	-	-	6.1%	-
Juan Evo Morales	MAS	-	-	-	-	-	53.7%
Jorge Quiroga	PODEMOS	-	-	-	-	-	28.6%
Samuel Doria Medina	FUN	-	-	-	-	-	7.8%
Michiaki Nagatani	MNR	-	-	-	-	-	6.5%
Felipe Quispe	MIP	-	-	-	-	-	2.2%

Sumber: Silva (2009)

Hasil pemilihan umum tahun 2005 ini menjadi tonggak baru konstelasi politik Bolivia dimana wakil dari kelompok masyarakat *indigenous* terpilih sebagai presiden menggeser dominasi kekuatan politik lama partai politik tradisional yang didominasi oleh kalangan kulit putih dan *mestizo*. Setelah melalui rangkaian panjang perjuangan dari gerakan sosial masyarakat *indigenous* hingga transformasinya menjadi partai politik yang ditunjukkan dengan hadirnya partai MAS, masyarakat *indigenous* akhirnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan keterwakilan politik dan pengambilan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka dalam tatanan struktur formal. Pemilihan umum pada tahun 2005 ini juga dinilai

fantastis karena begitu tingginya tingkat partisipasi politik warga negara Bolivia untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Sebanyak 3.102.417 atau sekitar 84,5 % dari total jumlah populasi warga negara Bolivia memberikan suara dalam pemilihan umum. Menurut Komisi Pemilihan Umum Bolivia (*National Electoral Court*), partisipasi politik pada pemilihan umum tahun 2005 ini merupakan angka tertinggi sejak Bolivia kembali ke era transisi demokrasi pada tahun 1985.<sup>215</sup>



<sup>215</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

## BAB 4

### **ANALISIS DAMPAK KEMENANGAN PARTAI MAS (*MOVIMIENTO AL SOCIALISMO*) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGUATAN PROSES DEMOKRATISASI DI BOLIVIA**

Tanggal 21 Januari 2006 tercatat sebagai hari bersejarah yang kiranya akan selalu dikenang oleh seluruh masyarakat Bolivia, khususnya dari kalangan penduduk asli (*indigenous*). Bertempat di antara reruntuhan kuil Tiwanaku yang merupakan situs arkeologi kuno peninggalan kekaisaran Inca, Juan Evo Morales Ayma dari partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*) dilantik sebagai presiden Bolivia lewat upacara dan ritual suci masyarakat *indigenous* di kawasan Andean, Amerika Latin. Dalam rangkaian prosesi upacara di situs bersejarah yang telah berusia lebih dari 10.000 tahun tersebut, Evo mengenakan busana tradisional *Manta* dan *Chucu*, melakukan ritual permohonan doa kepada *Pacha Mama* (dewi kesuburan dalam kepercayaan masyarakat *indigenous*) disaksikan oleh para *Yatiri* (tetua adat suku Aymara).<sup>216</sup> Selanjutnya, Morales melangkah menuju piramida Akapana yang merupakan puncak kuil Tiwanaku untuk diangkat sebagai presiden lewat pemberkatan suci berdasarkan tradisi masyarakat *indigenous*. *Event* tersebut tidak luput dari perhatian penduduk lokal di sekitar kawasan Tiwanaku, para turis asing, wartawan dalam dan luar negeri serta ribuan masyarakat Bolivia lainnya yang berbondong-bondong datang ke ritus bersejarah tersebut untuk menyaksikan pelantikan presiden baru mereka. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2006, Evo Morales diangkat sumpahnya menjadi presiden lewat upacara resmi kenegaraan di ibu kota La Paz, Bolivia.

Pelantikan Evo Morales sebagai presiden baru Bolivia hasil pemilihan umum pada bulan Desember 2005 telah membuka lembaran baru konstelasi politik Bolivia.

<sup>216</sup> David Kojan, "Paths of Power and Politics: Historical Narratives at Bolivian Site of Tiwanaku" dalam Junko Habu, Clare P. Fawcett, John M. Matsunaga, *Evaluating Multiple Narratives: Beyond Nationalist, Colonialist, Imperialist Archeologies* (New York: Springer Science and Business Media, 2008), hlm.69.

Evo Morales merupakan presiden Bolivia yang pertama dari kalangan *indigenous* dan juga pucuk pimpinan nasional *indigenous* pertama di kawasan Amerika Latin sejak kekaisaran Inca runtuh oleh kolonialisme bangsa Spanyol 500 tahun yang lampau. Semenjak saat itu, masyarakat *indigenous* di kawasan Amerika Latin khususnya di Bolivia, hidup dalam berbagai sistem sosial politik represif peninggalan pemerintah kolonial Spanyol yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok elit minoritas dari kalangan kulit putih dan *mestizo*.<sup>217</sup> Dominasi elit tersebut bertahan sangat lama hingga Evo Morales terpilih sebagai presiden, dimana pada masa-masa sebelumnya, jabatan presiden dari kalangan *indigenous* merupakan suatu hal yang mustahil.

Adanya fakta sejarah represi dan dominasi kelompok elit terhadap kalangan *indigenous* dan kemenangan partai MAS dan Evo Morales sebagai presiden dari kalangan *indigenous* pertama melalui pemilihan umum tahun 2005 tentunya menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar terkait dengan perubahan sosial politik di Bolivia terutama dalam aspek demokratisasi. Apakah kemenangan partai *indigenous* MAS dan naiknya Evo Morales sebagai presiden Bolivia membawa perubahan berarti dalam aspek demokratisasi di negara ini, khususnya bagi kalangan *indigenous*? Apabila memang terjadi perubahan yang berarti dalam aspek demokratisasi, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah: bagaimana bentuk kontribusi pemerintahan MAS dibawah pimpinan Morales dalam upaya memperkuat proses demokratisasi di Bolivia?

#### **4.1 Dampak Kemenangan Partai Berbasis Etnik MAS Terhadap Proses Demokratisasi di Bolivia**

Berbagai studi terdahulu yang dilakukan oleh para ilmuwan politik telah memberikan kontribusi berharga bagi kajian mengenai kemunculan partai etnik dalam konstelasi kekuasaan dan kaitannya terhadap studi demokratisasi. Menarik untuk dicermati bahwa dalam melihat fenomena kemunculan partai etnik tersebut, telah terjadi perdebatan pendapat di kalangan ilmuwan politik.. Tidak sedikit dari para ilmuwan yang beranggapan bahwa kemunculan partai etnik justru berpotensi

<sup>217</sup> *Ibid.*, hlm. 69.



merusak tatanan demokrasi di suatu negara. Donald Horowitz misalnya, berpendapat bahwa dalam pemilihan umum, kandidat dari partai etnik lebih sering membingkai isu-isu terbatas mengenai etnik tertentu, menunjukkan sikap *chauvinistik* terhadap etnik-etnik lainnya dan terkukung pada wacana perbedaan entnisitas yang terus menerus dipertahankan untuk mendukung eksistensi dan dukungan terhadap partai mereka.<sup>218</sup> Kritik yang sering dilontarkan oleh sebagian ilmuwan sosial terhadap partai etnik juga terkait dengan ketidakmampuan partai etnik dalam meraih suara pemilih atau menjaring kandidat lintas etnik karena mereka selalu terjebak dalam pengkotak-kotakan etnik yang tajam dan cenderung mengutamakan kepentingan atau aspirasi dari kelompok etnik tertentu saja.<sup>219</sup> Para pimpinan partai etnik memobiliasi suara pemilih dari kalangan etnik tertentu dan kerap kali menganggap kehadiran etnik lainnya sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka. Senada dengan Horowitz, ilmuwan politik lainnya seperti Timothy D. Sisk<sup>220</sup> juga melontarkan pandangan pesimis terkait dengan bangkitnya partai berbasis etnik. Pimpinan ekstrim dari partai etnik dalam pandangan Sisk memobiliasi massa pemilih etnik tertentu dengan memanfaatkan justifikasi ketidakadilan dan perasaan direndahkan oleh etnik lainnya. Tampilan atau citra tersebut menyebabkan hubungan antar etnik menjadi rusak dan akhirnya berujung pada terjadinya konflik. Masih menurut Sisk, polarisasi etnik yang terjadi ikut pula menyulitkan pendirian partai politik non etnik yang tidak secara spesifik mengusung tuntutan dari kelompok etnik tertentu.

Di tengah kritik sebagian ilmuwan yang pesimis terhadap kehadiran partai etnik, tidak sedikit pula literatur atau kajian dari para ilmuwan politik lainnya yang berpendapat sebaliknya bahwa kemunculan partai etnik justru berpotensi memperkuat stabilitas demokrasi di suatu negara. Kanchan Chandra, misalnya, ia melakukan studi yang cukup mendalam terhadap fenomena kebangkitan partai berbasis etnik di

<sup>218</sup> Donald Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict* (Berkeley: University of California Press, 1985), hlm. 291.

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm.318.

<sup>220</sup> Timothy D. Sisk, *Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts*, (Washington D.C: Institute of Peace Press, 1996), hlm.17.

wilayah Horshiapur, India Utara.<sup>221</sup> Menurut Khancan Chandra, kemunculan partai etnik memberikan dampak yang cukup positif bagi stabilitas demokrasi terutama di suatu negara yang komposisi penduduknya terdiri dari beragam etnis. Alasannya, dengan adanya partai etnik memungkinkan terbentuknya suatu sistem politik yang inklusif atau mampu mewakili aspirasi suatu kelompok etnik tertentu yang terkadang kurang dapat diakomodir.<sup>222</sup> Lewat studi yang dilakukannya Chandra berusaha menepis kritik para ilmuwan politik lainnya bahwa kemunculan partai berbasis etnik hanya didasarkan oleh sentimen primordial yang justru dapat merusak tatanan demokrasi di suatu negara.

Menyangkut kasus Bolivia, berbagai ilmuwan politik juga berusaha meneliti fenomena munculnya partai berbasis etnik dalam konstelasi kekuasaan dan demokrasi. Sebagian ilmuwan politik mengkategorikan maraknya kemunculan pemerintahan-pemerintahan “Kiri” Amerika Latin salah satunya Evo Morales dengan partai berbasis *indigenous* MAS Bolivia sebagai bentuk dari tradisi kepemimpinan populis atau demokrasi *plebisitarian* (*plebicitarian democracy*). Pengertian dari demokrasi *plebisitarian* adalah suatu bentuk dari demokrasi dimana pimpinan kharismatik beserta partai yang dipimpinnya mengendalikan rakyat untuk tujuan melegitimasi pemerintahannya.<sup>223</sup> Selain itu, dalam bentuk demokrasi *plebisitarian*, seorang pemimpin negara yang kharismatik membutuhkan dukungan dari rakyat untuk terus bertahan dalam struktur kekuasaan formal. Banyak kritikan yang dialamatkan oleh sebagian ilmuwan politik kepada bentuk demokrasi *plebisitarian*,

<sup>221</sup> Kanchan Chandra melakukan studi komprehensif yang membahas fenomena kemunculan partai berbasis etnik *Bahujan Samaj Party* (BJP) yang berhasil meraih sukses meraup suara pemilih di pemilihan umum tingkat lokal menggeser dominasi Partai Kongres India. Partai Kongres India merupakan partai koalisi multi-etnik yang sangat dominan dalam percaturan politik di tingkat lokal dan nasional. Meskipun partai ini anggotanya terdiri dari koalisi beragam etnik, namun pada praktiknya partai ini tidak mampu menangani isu-isu sosial politik yang spesifik, tuntutan dari kelompok-kelompok etnik yang ada, serta cenderung berpihak pada salah satu etnik saja. Penjelasan yang lebih lengkap dapat dilihat pada: Khancan Chandra, “The Transformation of Ethnic Politics in India: The Decline of Congress and the Rise of the Bahujan Samaj Party in Horshiapur”, dalam *Journal of Asian Studies*, Vol. 59, No. 1, (February 2000):26-61.

<sup>222</sup> Lihat penjelasan lengkapnya dalam: Khancan Chandra, *Ethnic Party and Democratic Stability*, diunduh dalam situs: [http://www.nyu.edu/gsas/dept/politics/seminars/chandra\\_f04.pdf](http://www.nyu.edu/gsas/dept/politics/seminars/chandra_f04.pdf), pada tanggal 20 September 2010, pukul 11:03 WIB.

<sup>223</sup> Mahir A. Aziz, *Marx Weber Concept of Plebiscitary Democracy and Liberal Democracy*, diunduh dalam situs: <http://www.ulum.nl/a225.html>, pada tanggal 20 September 2010, pukul: 00:52 WIB.

yakni: 1) Bersifat *illiberal* karena bentuk dari demokrasi plebisitarian mengarah pada rezim otoritarian dan merusak mekanisme keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan, 2) Mudah tergelincir menjadi sistem yang tidak demokratis, 3) Personalisme ketokohan populis akan merusak sistem kepartaian yang sudah ada di suatu negara.<sup>224</sup> Namun apakah kritik dari sebagian ilmuwan sosial dalam melihat fenomena kemenangan partai berbasis MAS dan Evo Morales dalam pemilihan umum tahun 2005 tersebut sepenuhnya benar? Penulis berpendapat sebaliknya bahwa kemenangan MAS dan Evo Morales justru berpotensi memberikan arah positif dan kontribusi bagi upaya penguatan demokrasi di Bolivia. Untuk membuktikan hipotesa tersebut, penulis akan menjelaskan beberapa argumen yang disertai dengan studi kemunculan partai etnik di Bolivia dan para ilmuwan politik dan data-data seputar kebijakan pemerintahan berkuasa partai MAS pimpinan Evo Morales yang kiranya dapat menjelaskan dampak kemenangan partai berbasis etnik MAS di Bolivia dan pengaruhnya terhadap penguatan proses demokratisasi.

Ilmuwan politik Donna Lee Van Cott menilai bahwa kemunculan partai etnik dalam konstelasi kekuasaan seperti partai MAS di Bolivia memiliki dampak positif bagi institusi demokrasi. Menurut Van Cott, partai etnik dapat meningkatkan representasi bagi kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan hal tersebut sangat relevan terutama bagi negara-negara dengan populasi penduduk asli yang besar seperti di Bolivia.<sup>225</sup> Ketika kelompok-kelompok sosial yang termarginalkan seperti penduduk asli tersebut menemukan representasi yang seutuhnya dalam institusi politik, maka legitimasi yang diperoleh oleh institusi tersebut dari kalangan *indigenous* menjadi lebih kuat. Hal ini sesuai dengan pandangan Ernesto Laclau<sup>226</sup> bahwa merangkul kelompok-kelompok masyarakat yang marginal kedalam struktur politik dapat memperkuat proses demokratisasi yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip universal yang menjadi pilar utama demokrasi. Masih menurut Laclau, proses

<sup>224</sup> Roque Daniel Planas, "Too Much Democracy: Party Collapse, Political Outsiders, and The Andean Populist Resurgence", *makalah yang dipublikasikan oleh University of Texas, San Marco, USA, tanpa tahun*, hlm. 25.

<sup>225</sup> Van Cott, 2005, *op.cit.*, hlm. 228.

<sup>226</sup> Ernesto Laclau, *Emancipation* (London: Verso, 1995), hlm. 33.

demokratisasi dapat diperkuat dan berjalan dalam struktur masyarakat apabila sistim demokrasi bersifat akuntabel terhadap tuntutan dari kelompok masyarakat mayoritas, minoritas ataupun kelompok-kelompok etnik.

Terkait dengan peningkatan representasi politik misalnya, sebelum partai *indigenous* MAS muncul dalam peta kekuatan politik di Bolivia, masyarakat *indigenous* kurang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan kebijakan. Corak sentralistik dan kebijakan *top-down* lebih dominan muncul Partai-partai politik tradisional di Bolivia dibandingkan dengan upaya penyelesaian isu-isu utama yang menjadi aspirasi dari kelompok *indigenous* seperti reformasi agraria, peningkatan kesejahteraan dalam bidang ekonomi atau pendidikan serta pelaksanaan otonomi. Terbukti dengan kemunculan partai MAS, telah terjadi peningkatan dalam hal representasi politik di pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2005 tercatat sebanyak 55, 4% wakil dari kelompok *indigenous* berhasil menempati jabatan Deputy dan 44, 4% jabatan Senat dalam keanggotaan Kongres Bolivia. Hal ini, meningkat dari tahun 1997 dimana keanggotaan Senat dan Deputy dari kalangan *indigenous* hanya sebesar 3,1% dan 0,0 %.<sup>227</sup> (dapat dilihat dalam tabel 4.1)

**Tabel 4.1 Jumlah Keanggotaan Deputy Dan Senat Dari Kalangan *Indigenous* Dalam Kongres Bolivia (Dalam %)**

		1997		2002		2005	
		Kursi	Persen	Kursi	Persen	Kursi	Persen
<b>Bolivia</b>	Deputi	4	3.1%	27	20.8%	72	55.4%
	Senat	0	0.0%	8	29.6%	12	44.4%

Sumber: Cooke (2008)

<sup>227</sup> Erik Cooke, "Indigenous Parties and Substantive Representation in Bolivia and Ecuador: A Preliminary Assessment", makalah yang dipresentasikan dalam Annual Meeting of The Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois, USA, April 3-6, 2008, hlm. 22.

Peningkatan kursi bagi kalangan *indigenous* di Kongres juga diikuti dengan keberhasilan wakil-wakil dari partai *indigenous* mendorong Kongres Bolivia mengesahkan undang-undang yang menjadi tuntutan-tuntutan utama dari kelompok *indigenous* antara lain dalam bidang pembangunan ekonomi dan kultur budaya. Pada tahun 2003 misalnya, Kongres Bolivia berhasil meningkatkan presentase pengesahan undang-undang di bidang pembangunan ekonomi bagi masyarakat *indigenous* sebesar 25,6% (48 undang-undang) dan kultur budaya sebesar 6,1% (8 undang-undang) dibandingkan dengan tahun 2001 yang masing-masing hanya sebesar 12,9 % (11 undang-undang) dan 1,2 % (1 undang-undang).<sup>228</sup> (dapat dilihat dalam tabel 4.2)

**Tabel 4.2 Jumlah Undang Undang Yang Berhasil Disahkan Kongres Sesuai Tuntutan Kelompok *Indigenous* (dalam jumlah dan %)**

	2001-2002		2002-2003		Total		Perubahan
Tanah	2	2.4%	2	2.1%	4	2.2%	-0.3%
Otonomi	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.0%
Kultur	1	1.2%	7	7.3%	8	4.4%	+6.1%
Pembangunan	11	12.9%	37	38.5%	48	26.5%	+25.6%
HAM	5	5.9%	4	4.2%	9	5.0%	-1.7%
(Hak Lainnya	4	4.7%	2	2.1%	6	3.3%	-2.6%
Total Indigenous	23	27.1%	52	54.2%	75	41.4%	+27.1%
Non Indigenous	62	72.9%	44	45.8%	106	58.6%	-27.1%
Total	85		96		181		

Sumber: Cooke (2008)

Selain itu, kemunculan partai etnik memberikan pelajaran berharga kepada partai-partai politik lainnya terkait dengan upaya membangun hubungan yang sehat antara partai politik dengan *civil society*.<sup>229</sup> Pandangan Van Cott tersebut menurut

<sup>228</sup> *Ibid.*, hlm.22.

<sup>229</sup> Van Cott, *op.cit.*, hlm. 229.

penulis sangat tepat untuk menjelaskan kasus yang terjadi di Bolivia. Secara sepintas dalam bagian pendahuluan penelitian ini, telah penulis singgung tentang adanya permasalahan krisis representasi demokrasi di Bolivia. Semenjak era rezim otoritarian militer runtuh dan Bolivia masuk kedalam era transisi demokrasi di awal tahun 1980-an, Bolivia justru terjebak dalam lingkaran oligarki partai politik tradisional dan adopsi kebijakan ekonomi berkarakteristik neoliberal yang gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan khususnya bagi kalangan penduduk asli (*indigenous*). Sistem demokrasi yang oleh ilmuwan politik Adam Pzeworski<sup>230</sup> didefinisikan sebagai sebuah sistem pengelolaan konflik dimana setiap individu dapat berpartisipasi secara luas dan tidak adanya sifat absolutisme kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lainnya hanya menjadi makna simbolik belaka. Meskipun setelah transisi demokrasi bergulir, mayoritas negara-negara di Amerika Latin termasuk Bolivia telah menerapkan undang-undang mengenai pelaksanaan pemilihan umum sebagai bentuk mandat keterwakilan rakyat dan nilai-nilai demokrasi lainnya, pada praktiknya, pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan harapan. Alih-alih sistem demokrasi perwakilan ditegakkan, para analis politik Amerika Latin melihat bahwa fakta yang terjadi justru sebaliknya, telah terjadi sistem poliarki yakni sebuah sistem dimana hanya segelintir elit memegang kekuasaan, akses kepemilikan modal dan juga partisipasi politik warga negara yang tergerus oleh persaingan para elit lewat mekanisme pemilihan umum yang telah diatur sebelumnya.<sup>231</sup> Keadaan ini diikuti dengan adopsi kebijakan berkarakteristik neoliberal yang menyebabkan konsentrasi kemakmuran berada dalam genggamannya kelompok elit dan kelas sosial tertentu saja.

Corak oligarki partai politik tradisional di Bolivia yang sentralistik dan gagal menjadi saluran representasi bagi kelompok-kelompok dalam struktur masyarakat membuat hubungan antara *civil society* dengan partai politik menjadi sangat

<sup>230</sup> Adam Pzeworski, *Democracy and The Market: Political and The Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), hlm. 12 .

<sup>231</sup> Daniel M. Godstein, "La Mano Dura and The Violence of Civil Society in Bolivia" dalam Edward Fischer, *Indigenous Peoples, Civil Society, and The Neoliberal State* (Berghamm: Berghamm Books, 2009), hlm. 48.

renggang. Dalam situasi demikian, tidaklah mengherankan apabila kepercayaan masyarakat Bolivia khususnya dari kalangan penduduk asli (*indigenous*) kepada institusi perwakilan berada dalam titik terendahnya. Menurut ilmuwan politik, Van Cott, dengan munculnya partai berbasis gerakan penduduk asli (*indigenous*) seperti MAS dalam konstelasi kekuasaan membuat hubungan yang lebih positif antara partai politik dengan pemilih (*voters*). Hal ini disebabkan karena partai MAS memiliki ikatan yang tidak terpisahkan dengan gerakan sosial sebagai basis dukungannya, memiliki ideologi serta program kerja kepartaian yang kuat.<sup>232</sup>

Partai berbasis etnik juga mengusung tema dan agenda yang sebelumnya kurang menjadi perhatian atau bahkan tidak ditemukan dalam diskursus politik di suatu negara seperti: pengakuan dan penghormatan terhadap adanya perbedaan kultural, problem diskriminasi dan kekerasan yang bersifat rasial, ataupun keinginan dari kelompok-kelompok dalam struktur masyarakat kepada partai politik dan negara agar menerapkan otonomi yang berkeadilan.<sup>233</sup> Dalam kasus Bolivia, kita bisa melihat bahwa keberhasilan partai *indigenous* MAS meraup perolehan suara yang cukup besar dalam pemilihan umum juga ikut disebabkan karena kemampuan partai ini menata ulang konsep demokrasi Bolivia melalui ide keadilan sosial dan ekonomi.

Pendapat Van Cott diperkuat oleh Raul Madrid, profesor ilmu politik dari University of Texas, Amerika Serikat. Madrid melihat bahwa kemunculan partai berbasis *indigenous* MAS dalam pemilihan umum Bolivia pada tahun 2005 memiliki beberapa dampak yang positif bagi demokrasi antara lain: 1) Meningkatkan partisipasi pemilih khususnya dari kalangan *indigenous* pemilihan umum Bolivia. 2) Memperkuat stabilitas sistem kepartaian di Bolivia. 3) Menurunkan intensitas perpecahan sistem kepartaian dan meningkatkan keefektifan sistem kepartaian di

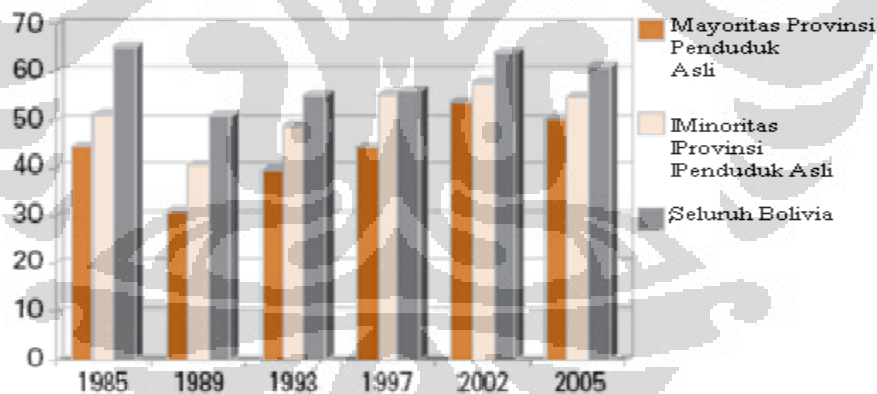
<sup>232</sup>Partai berbasis *indigenous* seperti MAS di Bolivia ataupun CONAIE di Ekuador kerap mempertahankan hubungan yang kuat dengan konstituennya yakni gerakan sosial sebagai basis awal kelahiran partai ini. Pengaruh dari kuatnya ikatan MAS dengan serikat petani koka berpengaruh terhadap pembentukan program kepartaian mereka. Partai *indigenous* seperti MAS juga konsisten mengusung agenda-agenda “Kiri” antara lain perlawanan terhadap neoliberalisme serta isu-isu strategis yang menyangkut penduduk asli seperti reformasi agraria, otonomi ataupun legalisasi kegiatan penanaman daun koka. Lihat penjelasan lengkapnya dalam: Raul Madrid, “Critical Debates: Indigenous Party and Democracy in Latin America”, dalam *Latin America Politics and Society*, Vol. 47, No. 4, 2005, pp.161-179, hlm.167.

<sup>233</sup> Van Cott, 2005, *op.cit.*, hlm.230.

Bolivia. 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap institusi demokrasi di Bolivia.<sup>234</sup> Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengurai penjelasan dari Raul Madrid tersebut sebagai berikut:

Terkait dengan dimensi peningkatan partisipasi politik pemilih dalam pemilihan umum di Bolivia menurut penjelasan Raul Madrid, terlihat bahwa selepas transisi demokrasi di Bolivia memang tidak dipungkiri bahwa angka partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Akan tetapi angka ini mengalami penurunan terutama di wilayah dengan populasi penduduk asli yang besar dari tahun 1989 sampai tahun 1997. Bangkitnya partai MAS terutama sejak tahun 2002 kembali membuat angka partisipasi politik meningkat terutama di provinsi dengan populasi penduduk asli yang besar dan juga dalam skala nasional (**Lihat dalam bagan 4.3**)

**Bagan 4.3 Jumlah Partisipasi Politik Masyarakat Bolivia dalam Pemilihan Umum Sejak 1985 (Populasi Dalam %)**



Sumber: Madrid (2008)

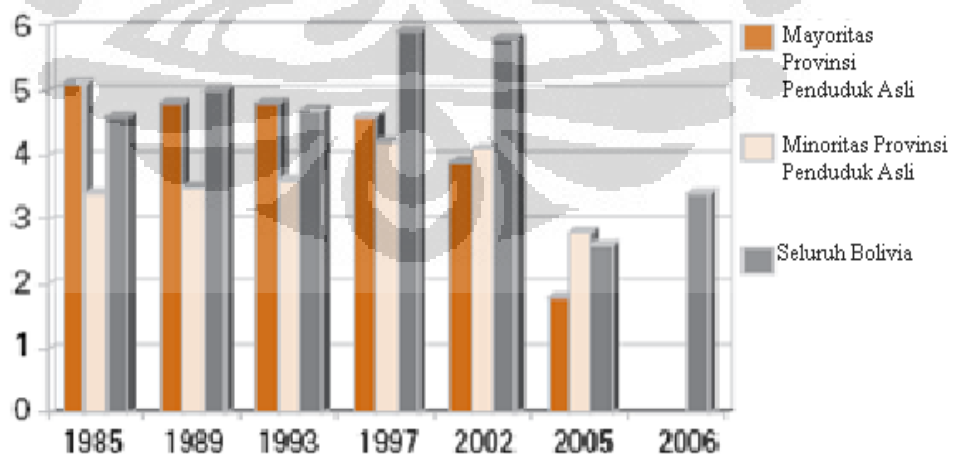
Intensitas perpecahan dalam sistim kepartaian di Bolivia juga termasuk paling tinggi di kawasan Amerika Latin. Hal ini membuat presiden Bolivia sulit untuk meraih dukungan dari berbagai partai yang ada untuk meloloskan suatu undang-

<sup>234</sup> Raul Madrid, *Indigenous Movement and Democracy in Bolivia*, dalam *Democratic Governance and The New Left*, No.2, August 2008, hlm.3.



undang. Sebelum kemunculan partai MAS, perpecahan sistim kepartaian di Bolivia terutama wilayah yang didominasi masyarakat *indigenous* begitu tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat *indigenous* cenderung memecah suara mereka dalam pemilihan umum dibandingkan dengan kelompok masyarakat Bolivia lainnya kepada bermacam-macam partai polirik. Kemunculan partai MAS telah membantu mengurangi perpecahan kepartaian terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk asli karena pemilih karena masyarakat *indigenous* memberi dukungan suara yang terkonsentrasi pada partai MAS dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya. Di sisi lainnya, lawan-lawan dari partai MAS diluar wilayah yang didiami oleh mayoritas *indigenous* berkoalisi lewat partai PODEMOS. Pada wilayah yang didominasi oleh masyarakat *indigenous* atau tidak didominasi masyarakat *indigenous*, telah terjadi penurunan tingkat perpecahan sistim kepartaian Bolivia. Lebih jauh lagi, untuk wilayah dengan populasi *indigenous* yang tinggi, sejak tahun 2005, tingkat perpecahan sistim kepartaian Bolivia jauh menurun dan menghasilkan dua partai yang efektif saja. (lihat pada bagan 4.4)

**Bagan 4.4 Tingkat Keefektifan Sistim Kepartaian Dalam Pemilihan Umum Bolivia (1985-2006)**



Sumber: Madrid (2008)

Dalam dimensi tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi demokrasi di Bolivia juga terlihat adanya peningkatan kepuasan masyarakat Bolivia khususnya dari kalangan *indigenous* dengan keberhasilan partai MAS dalam kompetisi elektoral di Bolivia pada tahun 2005. Sebagai catatan penting, Bolivia kerap dihadapkan dengan tingkat kepuasan masyarakatnya yang rendah terhadap demokrasi. Naiknya Evo Morales (lewat pemilihan umum tahun 2005) yang dianggap sebagai representasi masyarakat penduduk asli yang tereklusi dan perlawanan terhadap partai politik tradisional yang korup atau tidak merepresentasikan tuntutan masyarakat *indigenous* berhasil membuat kepuasan masyarakat Bolivia khususnya kelompok *indigenous* meningkat (seperti terlihat dalam bagan 4.5). Dimensi kepuasan terhadap demokrasi tersebut terlihat antara tahun 2004 dan 2006 dengan meningkatnya kepuasan masyarakat Bolivia terhadap demokrasi, pandangan masyarakat terhadap demokrasi dan juga penghormatan masyarakat Bolivia terhadap institusi politik.

**Bagan 4.5 Tingkat Kepuasan Masyarakat Bolivia Terhadap Institusi Demokrasi (Dalam %).**



Sumber: Madrid (2008)

## 4.2 Bentuk Kontribusi Partai MAS Dalam Upaya Memperkuat Proses Demokratisasi di Bolivia

Dalam penjelasan awal bab ini, penulis telah memaparkan dampak yang ditimbulkan dari kemenangan partai *indigenous* MAS dalam pemilihan umum tahun 2005 terhadap proses demokratisasi di Bolivia. Pendapat sebagian ilmuwan sosial yang memandang fenomena kebangkitan partai etnik khususnya di Bolivia yang berpotensi merusak tatanan demokrasi tidak sepenuhnya benar. Justru sebaliknya, lewat penelusuran penulis terhadap literatur dan penelitian dari ilmuwan sosial lainnya terbukti bahwa kemenangan partai *indigenous* MAS berdampak positif memperkuat proses demokratisasi di Bolivia. Tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana bentuk kontribusi pemerintahan partai *indigenous* MAS dibawah pimpinan Evo Morales dalam upaya memperkuat proses demokratisasi di Bolivia.

Semenjak pemerintahan partai *indigenous* MAS memegang tampuk pemerintahan pada awal tahun 2006 memang telah terjadi peningkatan signifikan dalam hal perbaikan sosial ekonomi di Bolivia khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan penduduk asli. Hal tersebut dimungkinkan karena berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan MAS pimpinan Evo Morales langsung setelah terpilih sebagai presiden salah satunya adalah kebijakan nasionalisasi hidrokarbon yang diumumkan mulai tanggal 1 Mei 2006.<sup>235</sup> Berbagai poin utama dari dekrit nasionalisasi hidrokarbon tersebut antara lain: 1) Pemerintah mengontrol seluruh sumber daya alam berupa minyak dan gas di seluruh Bolivia sebagaimana diamanatkan didalam konstitusi Bolivia, 2) Pemerintah akan membagi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asing dari sektor migas bersama dengan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor minyak dan gas yakni YPFB (*Yacimiento Petroliferos Fiscales Bolivianos*), 3) Kementerian energi Bolivia akan melakukan audit keuangan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor migas sebagai bagian dari perjanjian kontrak karya yang baru, 4)

<sup>235</sup> Kathryn MccElroy, "The Mobilization of The Left and The Nationalitation of The Hydrocarbon Sector in Bolivia: Bolivia Transition From A Pacted Democracy", *A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Master of Arts in The Faculty of Graduate Studies Political Science, The University of British Columbia, Vancouver, 2008*, hlm.38.

Pemerintah akan merenegoisasi ulang kontrak baru dengan perusahaan-perusahaan migas asing enam bulan setelah dekrit 1 Mei 2006.<sup>236</sup> Dengan adanya kebijakan nasionalisasi hidrokarbon tersebut, pemerintahan Evo Morales telah berhasil mengembalikan peran negara yang kuat dalam mengontrol sumberdaya alam utama yang dimiliki oleh Bolivia setelah sekian lamanya terus menerus berada dibawah kontrol perusahaan-perusahaan asing. Tidak hanya itu saja, dengan adanya peraturan baru tersebut, pemerintah Bolivia juga berhasil meningkatkan sumber pendapatan negara yang cukup besar dari sektor migas. Perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Bolivia diwajibkan menyerahkan keuntungan termasuk pajak dan royalti yang didapat dari sektor hidrokarbon sebesar 82% kepada YPFB.<sup>237</sup> Hasilnya, berdasarkan data yang terungkap, pada tahun 2006 saja pemerintah Bolivia berhasil memperoleh keuntungan dari penjualan gas, beserta pajak dan royaltinya sebesar \$ 1,6 miliar, meningkat sebanyak 40% dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>238</sup> Data yang serupa juga menunjukkan presentase peningkatan pendapatan dalam negeri Bolivia GDP (*Gross Domestic Product*) dari sektor migas yang cukup signifikan dari tahun 2000 yang hanya sebesar 12,8% menjadi 17,3% pada tahun 2008.<sup>239</sup> **(lihat pada grafik 4.6).**

<sup>236</sup> Nadia Martinez, *Bolivia's Nationalization: Understanding The Process and Gauging The Result*, Institute For Policy Studies, 2007, hlm. 2.

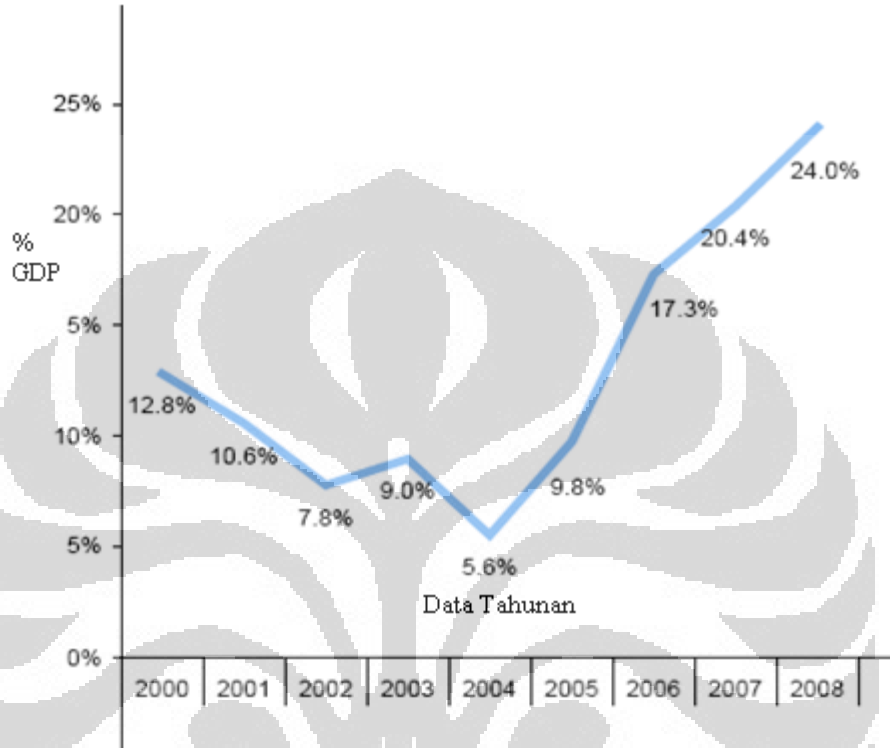
<sup>237</sup> Mceloy, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>238</sup> Martinez, *loc.cit*, hlm. 2.

<sup>239</sup> Mark Weissbrott, Rebecca Ray, Jake Johnston, *Bolivia: The Economy During The Evo Morales Administration*, laporan penelitian yang dipublikasikan oleh Center For Economic and Policy Research, 2009, hlm. 13.

### Grafik 4.6 Perolehan GDP Bolivia Dari Sektor Hidrokarbon (Tahun 2000-2009)

Bolivia: Pemasukan Keuntungan Pemerintah Dari Sektor Hidrokarbon (2000-2009)



Sumber: Weisbrott (2009)

Patut untuk dicatat bahwa keuntungan yang diperoleh dari penerimaan negara lewat sektor migas tersebut dialokasikan untuk merealisasikan agenda-agenda kebijakan sosial yang dijanjikan oleh pemerintahan MAS pimpinan Evo Morales. Hal ini terbukti dengan dialokasikannya keuntungan negara dari sektor migas untuk berbagai program kebijakan sosial diantaranya: 1) Juacinto Pinto, yakni program insentif dana pendidikan dari pemerintah kepada anak-anak dari keluarga miskin dan indigenous sebesar 200 bolivianos (US\$ 29) per tahun untuk tetap mengenyam pendidikan, 2) *Renta Dignidad*, program tunjangan sosial bagi penduduk miskin Bolivia yang berusia 60 tahun keatas untuk mencegah tingkat kemiskinan akut (*extreme poverty*), sebesar 1800 Bolivianos (US\$ 258) untuk penduduk yang telah mendapat tunjangan jaminan sosial dan 2400 Bolivianos (US\$344) untuk penduduk

yang belum memperoleh tunjangan jaminan sosial. 3) *Boana Juana Azurduy*, yakni pemberian insentif dana bagi kaum ibu yang tidak memiliki asuransi kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di masa kehamilan maupun sesudah kehamilan untuk mencegah angka kematian ibu melahirkan (*infant mortality*).<sup>240</sup> Program kebijakan sosial ini telah berhasil menjangkau populasi penduduk miskin yang besar di Bolivia. *Bono Juacinto Pinto* misalnya, telah mampu menjangkau jumlah populasi miskin Bolivia sebesar 61,8% ( 1.085.360 penduduk) pada tahun 2006 dan bahkan terus meningkat hingga tahun 2008 yakni sebesar 95,9% (1.681.135 penduduk). (**Lihat pada tabel 4.7**) Demikian halnya dengan program *Renta Dignidad* yang berhasil menjangkau jumlah populasi penduduk miskin Bolivia sebesar 76,9% (487.832 penduduk usia manula) pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 101,8% (687.962 penduduk miskin usia manula) pada tahun 2008 (**Lihat pada tabel 4.7**).

**Tabel 4.7 Populasi Penduduk Miskin Yang Terjangkau Program Sosial *Juacinto Pinto* dan *Renta Dignidad* (Tahun 2006-2008)**

Bolivia: Jumlah Rata-Rata Masyarakat Bolivia Yang Merasakan Manfaat Kebijakan Bono Juacinto Pinto Dan Renta Dignidad

	Jumlah Masyarakat Bolivia Yang Memperoleh Keuntungan		Presentase Populasi Yang Terjangkau	
	Bono Juacinto Pinto	Renta Dignidad/ Bonosol	Bono Juacinto Pinto	Renta Dignidad/Bonosol
2006	1,085,360	487,832	61.8%	76.9%
2007	1,323,999	493,437	75.1%	75.4%
2008	1,681,135	687,962	95.9%	101.8%

Sumber: Weisbrott (2009)

<sup>240</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Berbagai kebijakan penting pemerintahan Evo Morales dan partai *indigenous* MAS lainnya adalah reformasi agraria dan juga penghapusan diskriminasi sosial terhadap kelompok masyarakat *indigenous*. Dalam bidang reformasi agraria misalnya, setelah terpilih Evo Morales langsung melakukan serangkaian kebijakan land reform atau pembagian tanah kepada kelompok petani miskin khususnya dari kalangan *indigenous*. Antara bulan Januari hingga Agustus presiden Morales mendistribusikan sebanyak 7,6 juta hektar tanah kepada para petani tanpa tanah dan hal tersebut baru merupakan langkah awal dari target yang ditetapkan yakni 20 juta hektar tanah pada tahun 2011.<sup>241</sup> Pemerintahan Evo Morales juga berupaya menghapus diskriminasi sosial bagi kalangan *indigenous* dalam struktur masyarakat Bolivia. Salah satu langkah konkritnya terlihat dalam program reformasi sosial ekonomi di tubuh angkatan bersenjata Bolivia. Pada masa-masa sebelumnya, akademi kemiliteran di Bolivia hanya menerima calon prajurit dan perwira dari kalangan kelas atas dan keluarga terdekat dalam hirarki kemiliteran. Jabatan-jabatan perwira tinggi hanya dipegang oleh segelintir kalangan masyarakat kulit putih keturunan Spanyol, sedangkan kalangan *indigenous* yang miskin mayoritas hanya menjadi prajurit bawahan dalam tubuh angkatan bersenjata Bolivia.<sup>242</sup> Ketimpangan ini kerap menjadi akar konflik rasial dan kelas di Bolivia. Pemerintahan MAS pimpinan Evo Morales mengubah kebijakan di dalam tubuh angkatan bersenjata Bolivia dengan menghapus diskriminasi rasial lewat profesionalisme jenjang karir (kepangkatan) dan juga perbaikan kesejahteraan ekonomi bagi prajurit dari kalangan *indigenous*.<sup>243</sup> Upaya peningkatan profesionalisme militer tersebut ikut ditopang oleh bantuan teknis dan pelatihan dari akademi militer Kanada (*Royal Canadian Military College*).

Kontribusi partai MAS dalam memperkuat proses demokratisasi di Bolivia juga terlihat dari berbagai bentuk penerapan demokrasi yang bersifat partisipatoris atau melibatkan seluruh komponen dalam struktur masyarakat Bolivia (*civil society*). Praktik nyata dari penerapan demokrasi yang bersifat partisipatoris tersebut dapat

<sup>241</sup> James Rochlin, "Latin America's Left Turn and The New Strategic Landscape: The Case of Bolivia", dalam *Third World Quarterly*, Vol.28, No.7, 2007, pp: 1327-1342, hlm.1332 .

<sup>242</sup> *Ibid.*, hlm. 1333.

<sup>243</sup> *Ibid.*

ditemui terutama di tingkat lokal (pemerintahan daerah). Contohnya, dalam proses seleksi jabatan gubernur di tingkat provinsi, partai MAS mengedepankan proses rotasi kepemimpinan masa jabatan gubernur terpilih (dari partai MAS) yang dibatasi hanya setengah periode untuk memberikan kesempatan bagi kandidat-kandidat lainnya dari partai yang sama dalam upaya distribusi kekuasaan secara adil dan mendapatkan pengalaman politik yang cukup untuk mengemban tugas-tugas pemerintahan.<sup>244</sup>

Selain itu, partai MAS juga berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan elemen-elemen *civil society* khususnya dari kalangan penduduk asli (*indigenous*). Hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan komunitas-komunitas seperti komunitas masyarakat penduduk asli atau komunitas petani yang tergabung dalam satu wadah berupa majelis warga (*assembly*) di level *civil society*.<sup>245</sup> Dalam wadah *assembly* tersebut, komunitas-komunitas yang ada secara rutin menggelar pertemuan untuk membahas berbagai macam permasalahan sosial-ekonomi yang mereka hadapi sekaligus merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan prasarana fasilitas yang mereka butuhkan. Dalam wadah *assembly* ini, nilai-nilai atau kultur masyarakat penduduk asli begitu kental terasa dalam penerapan atau praktik demokrasi yang dilakukan. Kelompok penduduk asli di dalam wadah majelis warga yang telah terbentuk mengadopsi praktik demokrasi yang sesuai dengan kultur budaya lokal yang mengedepankan konsensus bersama dalam pengambilan kebijakan, saling tolong-menolong dan juga mediasi terhadap konflik kepentingan. Partai MAS juga berupaya menerapkan pemerintahan di tingkat lokal yang bersifat akuntabel dan transparan. Di provinsi Chapare contohnya, partai MAS turut melibatkan serikat petani (*Sindicatos*) di level *civil society* untuk memantau transparansi anggaran publik dalam pemerintahan lokal.<sup>246</sup> Hal yang sama juga terjadi di wilayah dataran tinggi Bolivia, dimana para walikota kerap berkonsultasi dengan komunitas masyarakat penduduk asli ataupun serikat petani dalam proses

<sup>244</sup> Donna Lee Van Cott, *Radical Democracy in The Andes* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 243.

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>246</sup> *Ibid.*



pengambilan kebijakan serta melaporkan hasil kinerja pemerintah secara langsung kepada majelis warga (*assembly*) yang ada.

Fenomena keberhasilan partai MAS memenangkan pemilihan umum di Bolivia dan kontribusinya dalam memperkuat demokratisasi di Bolivia dapat dikorelasikan dengan teori kesempatan politik, struktur mobilisasi, proses *framing* gerakan sosial dan juga prasyarat konsolidasi demokrasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini.<sup>247</sup> Melalui teori kesempatan politik kita dapat melihat adanya peluang politik yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) yakni pemberlakuan undang-undang partisipasi populer (desentralisasi) pada tahun 1994. *Cocaleros* menggunakan momentum keterbukaan akses untuk berpartisipasi dalam arena politik lewat pendirian partai politik MAS (*Movimiento Al Socialismo*). Momentum kesempatan politik ini berperan penting menyediakan ruang bagi gerakan sosial petani koka penduduk asli (*Cocaleros*) untuk lebih aktif mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang sebelumnya begitu sulit dilakukan.

Perubahan gerakan sosial menjadi partai politik juga berperan penting dalam upaya MAS dan *Cocaleros* sebagai basis massanya untuk meluaskan basis perjuangan mereka secara lebih luas sehingga mampu memobilisasi dan membangun dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat atau gerakan-gerakan sosial lainnya untuk melakukan aksi kolektif berupa perlawanan terhadap rezim oligarki partai politik tradisional yang bertahan sejak transisi demokrasi bergulir di Bolivia pada tahun 1985. Upaya MAS untuk meluaskan basis perjuangannya dilakukan dengan proses pembingkaihan wacana penguatan demokratisasi diikuti dengan kritik terhadap keberlangsungan oligarki partai politik tradisional, perlawanan terhadap kebijakan ekonomi liberal hingga permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak asasi dan keterwakilan politik bagi kelompok penduduk asli di Bolivia. Contoh keberhasilan *framing* yang dilakukan oleh MAS dapat dilihat lewat simbolisasi tanaman koka sebagai upaya perlawanan terhadap pemerintah Bolivia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa kegiatan penanaman koka bukan saja menjadi mata pencaharian untuk

<sup>247</sup> Untuk penjelasan yang lebih lengkap, lihat kembali pemaparan kerangka teori dalam bab 1

bertahan hidup melainkan juga sebagai simbol kultural bagi masyarakat *indigenous* di Bolivia. Ironisnya, kegiatan penanaman koka yang merupakan sumber mata pencaharian dan simbol kultural yang dianggap sakral oleh masyarakat *indigenous* di Bolivia tersebut dilarang oleh rezim neoliberal partai-partai politik tradisional Bolivia yang berkuasa sejak transisi demokrasi bergulir di Bolivia pada tahun 1985. Pemerintah Bolivia melancarkan perang narkotika dengan dukungan Amerika Serikat yang telah membuat para petani *indigenous* Bolivia kehilangan mata pencaharian untuk bertahan hidup, identitas kultural yang terkikis bahkan jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan aparat militer pemerintah. Lewat proses *framing* etnisitas misalnya, MAS dan pemimpinnya yakni Evo Morales mencoba menyadarkan kepada seluruh komunitas penduduk asli di Bolivia bahwa mereka berada dibawah ancaman akan musnahnya kontinuitas kultural akibat kebijakan para elit oligarki politik dalam negeri dan juga intervensi asing (imperialisme Amerika Serikat) terhadap negara Bolivia.

.Dengan adanya perluasan basis perjuangan dari MAS, mereka telah mendapat dukungan baik dari kelompok masyarakat *indigenous* dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang ikut terkena imbas dari keberlangsungan rezim oligarki partai politik tradisional dan adopsi neoliberalisme di Bolivia seperti serikat buruh. Bukti kuat dari upaya MAS memperluas basis perjuangannya juga dapat dilihat dalam peranan penting mereka mengorganisir berbagai bentuk demonstrasi dan juga blokade jalan bersama dengan gerakan-gerakan sosial lainnya seperti COB (Serikat Pekerja Bolivia), CSUCTB (Serikat Petani Bolivia) ataupun *Coordinora* (gerakan sosial menentang privatisasi air dan gas) terutama dalam kasus kebijakan privatisasi air di Cochabamba pada tahun 2000 dan kebijakan privatisasi gas pada tahun 2003. Kedua kejadian penting tersebut telah mengangkat popularitas partai MAS di mata sebagian besar masyarakat Bolivia khususnya dari kalangan *indigenous* dan ikut mengantarkan Evo Morales merebut kursi kepresidenan dalam pemilihan umum tahun 2005.

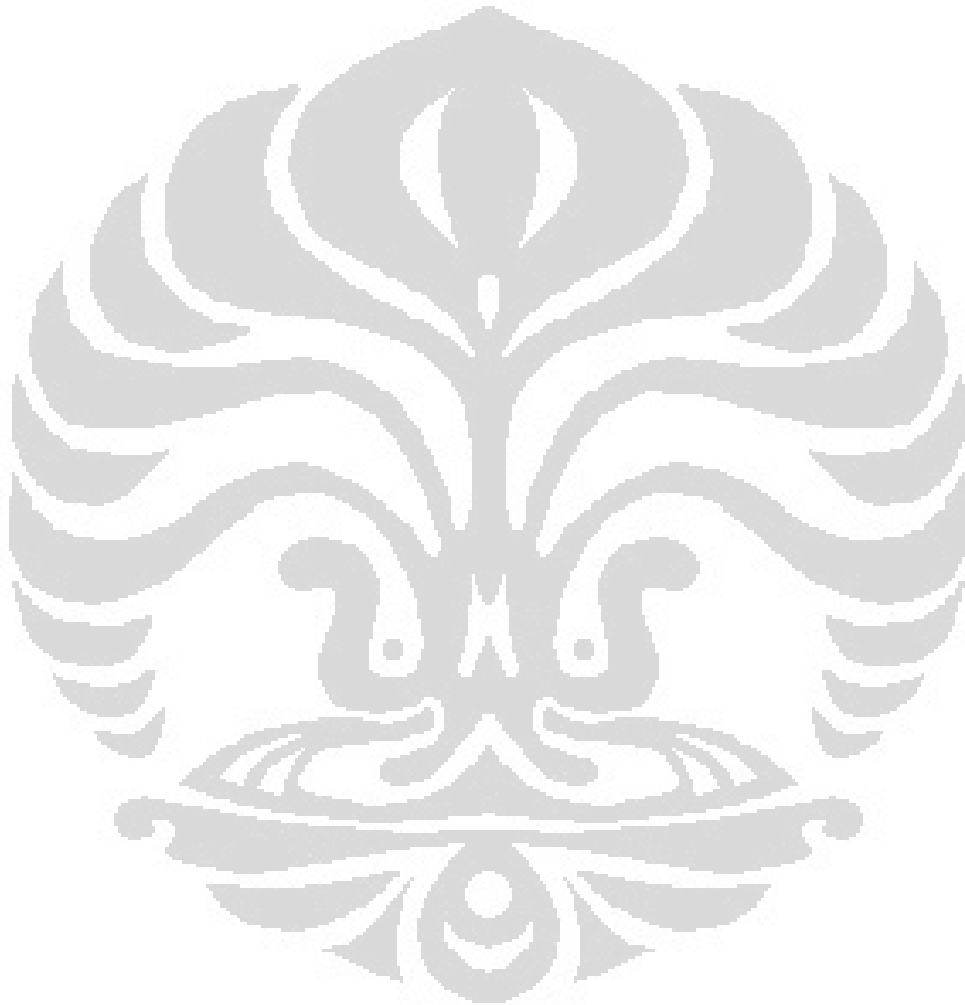
Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan sosial di Bolivia seperti partai MAS yang lahir dari gerakan sosial petani koka telah berupaya menempatkan permasalahan

mengenai ketidakadilan yang dihadapi oleh kelompok penduduk asli (*indigenous*) serta penegakan demokrasi partisipatoris yang melibatkan masyarakat secara utuh sebagai diskursus utama dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan. Mereka berusaha merubah diskursus demokrasi untuk menempatkan kembali pentingnya nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi, suatu hal yang kerap dilupakan oleh rezim oligarki partai politik tradisional di Bolivia.<sup>248</sup> Setelah memegang tampuk pemerintahan sejak pemilihan umum tahun 2005, kita juga dapat melihat bukti yang dilakukan oleh partai MAS dalam mempertahankan *framing* yang pernah digunakannya untuk menggerakkan mobilisasi kolektif masyarakat Bolivia melawan rezim oligarki politik yakni perjuangan terhadap demokratisasi dan penegakan hak-hak sosial ekonomi khususnya bagi kalangan *indigenous*. Hal ini diwujudkan dengan penerapan berbagai bentuk kebijakan pemerintahan partai berkuasa MAS yang berusaha mengakomodir aspirasi dan kepentingan bagi masyarakat *indigenous* seperti jaminan sosial-ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, reformasi agraria, penghapusan diskriminasi rasial hingga penerapan demokrasi substansial yang melibatkan seluruh komponen *civil society* dalam proses pengambilan kebijakan.

Penerapan kebijakan-kebijakan pemerintahan MAS seperti yang penulis telah sebutkan di atas kiranya juga berkorelasi kuat dengan konsep prasyarat bagi terciptanya stabilitas atau konsolidasi demokrasi yakni keterlibatan *civil society* yang kuat dalam pengambilan kebijakan ataupun kinerja pemerintahan yang baik. Satu hal yang tidak kalah pentingnya, upaya penguatan demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Evo Morales dan partai MAS telah menyadarkan kembali pentingnya penegakan pilar demokrasi yang tidak saja berdasarkan terminologi pemikiran Barat mengenai liberalisme klasik (kebebasan individu) saja, tapi juga penegakan hak-hak sosial warga negara sebagaimana diungkapkan oleh filosof T.H. Marshall. Hak-hak sosial tersebut antara lain mencakup hak atas penghidupan yang layak, akses

<sup>248</sup> Sarah Mojtchezadeh, "Indigenous Movements in Bolivia and Mexico: Expanding The Horizons of Democracy", makalah yang dipublikasikan oleh University of Toronto, Canada, 2007, hlm. 11.

pendidikan dan kesehatan serta representasi politik yang luas bagi seluruh warga negara.<sup>249</sup>



<sup>249</sup> Lihat dalam, T.H. Marshall, *Class, Citizenship and Social Development* (New York: Doubleday, 1964).

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

Kemenangan Evo Morales dan partai *indigenous* MAS (*Movimiento Al Socialismo*) dalam pemilihan umum tahun 2005 di Bolivia tidak dapat dinafikan telah menjadi tonggak sejarah baru di Bolivia. Untuk pertama kalinya wakil dari kelompok penduduk asli (*indigenous*) berhasil memegang tampuk pemerintahan setelah melalui rangkaian panjang perjuangan melawan diskriminasi rasial berikut ketimpangan politik dan ekonomi yang mereka hadapi semenjak kolonialisme Spanyol di Bolivia berakhir lebih dari 500 tahun yang lampau. Sungguh sebuah kenyataan yang ironis mengingat fakta bahwa sebagian besar populasi penduduk Bolivia merupakan kelompok penduduk asli (*indigenous*) yang notabnya juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang layak dan juga representasi politik yang luas.

Gelombang transisi demokrasi yang terjadi di dunia, tidak terkecuali Bolivia pada awal tahun 1980-an seolah membuka secercah harapan baru khususnya bagi kelompok penduduk asli untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, masuknya Bolivia kedalam alam demokrasi tidaklah merubah kehidupan sosial politik masyarakat penduduk asli menjadi lebih baik. Krisis representasi demokrasi perwakilan terjadi dimana partai-partai politik tradisional Bolivia yang diisi oleh segelintir elit dari kalangan penduduk kulit putih keturunan Spanyol mengendalikan konstelasi politik di negeri ini dibalik mekanisme yang menjadi paradoks dari sistim demokrasi itu sendiri yakni pemilihan umum. Meskipun mekanisme prosedural dari sistim demokrasi perwakilan telah berjalan, akan tetapi perlu dicatat bahwa esensi utama dari demokrasi yakni representasi dan hubungan yang erat antara elit partai politik dengan *civil society* (masyarakat) tidak pernah terjadi. Corak sentralistik dan vertikal dalam proses pengambilan kebijakan lebih dominan ditunjukkan oleh partai-partai politik tradisional

yang ada di Bolivia daripada upaya memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat di tingkat bawah (*grass-root*) termasuk dari kalangan penduduk asli (*indigenous*).

Kenyataan adanya krisis representasi demokrasi perwakilan semakin diperparah dengan adopsi kebijakan berkarakteristik neoliberal berdasarkan saran dari Amerika Serikat dan lembaga keuangan dunia oleh partai-partai politik tradisional di Bolivia. Adopsi neoliberal ini ternyata menjerumuskan masyarakat Bolivia kedalam jurang ketimpangan sosial ekonomi yang luas. Dampak tersebut lebih-lebih dirasakan oleh kelompok penduduk asli yang mencapai angka kemiskinan hingga 82%. Krisis representasi demokrasi perwakilan dan adopsi kebijakan berkarakteristik neoliberal ini pada akhirnya memicu munculnya krisis legitimasi terhadap pemerintah Bolivia. Gerakan-gerakan sosial khususnya dari kalangan penduduk asli pun bertumbuh kembang menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah Bolivia yang dinilai tidak mampu menjembatani aspirasi dan kepentingan mereka.

*Cocaleros*, yakni gerakan sosial petani koka penduduk asli merupakan salah satu contoh gerakan sosial yang muncul dari bawah (tataran *grass-root*), sebagai bagian dari potret ketidakadilan atas berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat Bolivia dalam hal ini kelompok penduduk asli (*indigenous*). Berangkat dari perjuangan para petani koka *indigenous* untuk bertahan hidup dan menjaga kontinuitas simbol budaya yang sakral, *Cocaleros* bangkit untuk menentang segala bentuk tindakan represif aparat pemerintah Bolivia lewat justifikasi perang melawan narkoba (*war on drugs*). Sabotase, demonstrasi hingga blokade jalan raya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlawanan *Cocaleros* atas kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka oleh pemerintah Bolivia.

Terdorong oleh adanya momentum kesempatan politik dan keinginan yang lebih kuat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan para petani koka *indigenous*, *Cocaleros* memutuskan untuk beralih memasuki jalur politik dengan mendirikan partai MAS (*Movimiento Al Socialismo*). Seiring dengan berjalannya waktu, MAS berusaha meluaskan basis perjuangannya. Tidak saja menyangkut kepentingan para petani koka namun juga penegakan demokrasi dan juga perbaikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin Bolivia terutama dari kalangan *indigenous*. Hal

tersebut didukung oleh situasi politik Bolivia yang kian dilanda krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang memuncak memasuki akhir dekade 1990-an. Dalam hal ini, kita bisa menyebutkan dua peristiwa penting yang menandai runtuhnya rezim oligarki partai politik tradisional di Bolivia yakni kasus privatisasi air di Cochabamba pada tahun 2000 dan kasus privatisasi gas oleh presiden Gonzalo Sanchez de Lozada pada tahun 2003. Dari kedua momen penting dalam sejarah Bolivia tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa MAS telah memainkan peranan penting bersama dengan komponen gerakan-gerakan sosial lainnya seperti serikat buruh dan petani. Peranan yang dilakukan oleh MAS tersebut dapat dilihat baik di parlemen Bolivia lewat tekanan terhadap pemerintah Bolivia agar membatalkan berbagai privatisasi aset milik publik, maupun menggerakkan demonstrasi dan blokade di jalan raya.

Peranan sentral MAS dalam menggerakkan berbagai demonstrasi menentang kebijakan pemerintah Bolivia seperti privatisasi dan pemusnahan budidaya tanaman koka telah membuat simpati dan dukungan masyarakat Bolivia terhadap partai ini semakin menguat. Kiranya kemenangan Evo Morales sebagai kandidat dari partai MAS dalam pemilihan umum tahun 2005 dengan perolehan suara pemilih yang cukup fantastis (53,7% suara) menjadi bukti bahwa masyarakat Bolivia khususnya dari kalangan penduduk asli telah menaruh kepercayaan yang kuat terhadap partai ini untuk membawa perubahan politik dan ekonomi yang lebih baik bagi Bolivia.

Meskipun sebagian pihak tidak terkecuali dari kalangan akademisi pada awalnya meragukan bahwa kemenangan Evo Morales dari partai berbasis etnik MAS akan membawa dampak yang positif bagi tatanan demokrasi di Bolivia, namun ternyata berdasarkan penelusuran data yang penulis temukan justru sebaliknya. Kemenangan Evo Morales dan partai berbasis etnik MAS mampu membuat sistim kepartaian Bolivia menjadi lebih solid, meningkatkan representasi politik bagi masyarakat marjinal di Bolivia khususnya penduduk asli (*indigenous*) serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi demokrasi perwakilan di Bolivia. Keberhasilan partai MAS menggeser dominasi oligarki partai politik tradisional di Bolivia juga membawa dampak yang cukup signifikan dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan penting

yang diambil oleh pemerintahan Evo Morales antara lain peningkatan peran negara yang sentral dalam menguasai sumber daya alam strategis yang dimiliki Bolivia seperti gas (hidrokarbon), penerapan kebijakan sosial yang mampu dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat marjinal Bolivia seperti tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, redistribusi tanah bagi para petani miskin serta penghapusan diskriminasi rasial bagi kalangan penduduk asli (*indigenous*). Satu hal lain yang tidak kalah pentingnya yakni upaya partai MAS untuk menata ulang konsep demokrasi yang mampu mewakili semua elemen masyarakat (*civil society*) di Bolivia. Di tingkat lokal misalnya upaya MAS untuk mendorong pelaksanaan demokrasi yang partisipatoris diwujudkan dengan memfasilitasi pembentukan majelis warga (*Assembly*) dimana seluruh masyarakat terlibat untuk berpartisipasi dan mengambil peranan aktif dalam menentukan prioritas kebijakan yang ingin mereka ambil seperti pembangunan prasarana transportasi, pendidikan atau kesehatan. MAS juga mengikutsertakan elemen-elemen utama *civil society* seperti serikat petani untuk ikut memantau transparansi anggaran publik dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan secara langsung kinerja mereka dihadapan majelis (*Assembly*) yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat lokal.

Bercermin dari keberhasilan partai MAS yang bertransformasi dari gerakan sosial penduduk asli (*Cocaleros*) dalam memenangkan pemilihan umum Bolivia tahun 2005, kiranya ada beberapa refleksi atau pembelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, antara lain: 1) pertarungan wacana sosialisme dengan kapitalisme sesungguhnya belum berakhir sebagaimana telah diprediksi sebelumnya oleh banyak pihak di dunia. Justru, wacana sosialisme yang diusung oleh pemimpin dan gerakan “Kiri” Amerika Latin seperti Bolivia semakin relevan dengan konteks kekinian khususnya di negara berkembang dimana jurang kemiskinan dan ketimpangan sosial masih sangat luas terasa. 2) Konsistensi atas *platform* perjuangan dan ideologi yang diusung seperti ditunjukkan oleh MAS di Bolivia. Partai ini berangkat dari bawah yakni gerakan sosial penduduk asli (*Cocaleros*) untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bagi kelompok *indigenous* yang tersandera oleh buruknya kinerja pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan warga negaranya. Selepas



bertransformasi menjadi partai politik, MAS berupaya untuk konsisten memperjuangkan ideologi dan *platform* yang diusungnya. Hal ini bisa terlihat dengan kinerja pemerintahan Evo Morales setelah terpilih yang berusaha mengakomodir tuntutan utama dari gerakan-gerakan sosial maupun kelompok marjinal khususnya penduduk asli lewat berbagai kebijakan yang radikal seperti reformasi agraria ataupun nasionalisasi hidrokarbon. 3) Upaya partai berbasis *indigenous* MAS untuk menata ulang konsep demokrasi Bolivia yang telah nyata dibajak oleh oligarki kepartaian yang didominasi oleh kalangan kulit putih dan *meztizo* menunjukkan bahwa sesungguhnya konsep demokrasi bukanlah sebuah konsep yang sifatnya statis. Demokrasi yang baik dan stabil ternyata tidak cukup dilihat dari sisi prosedural saja seperti lewat mekanisme pemilihan umum tapi lebih jauh lagi, sejauh mana demokrasi mampu menyediakan ruang bagi partisipasi politik warga negara secara kuat dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Upaya MAS untuk memperjuangkan demokrasi yang bersifat partisipatoris tentunya bisa menjadi contoh terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia agar sistem demokrasi tidak sekadar dijadikan arena pertarungan dan tawar-menawar kekuasaan diantara para elit politik saja sehingga esensi demokrasi yakni kedaulatan rakyat secara nyata dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alexander, Robert J. *Bolivia: Past, Present, and Future of its Politics*. Stanford: Hoover Institution Press, 1982.
- Borgatta, Edward, F, Borgatta, Marie, L. *Encyclopedia of Sociology*, Vol.4. New York: MacMillan Publishing Company, 1992.
- Beard, Victoria, Miraftab, Farafnaf, dan Silver, Christopher. *Planning and Decentralization: Contested Space for Public Action in Global South*. Routledge: Taylor & Francis Library, 2008.
- Carpenter, Ted Gallen. *Bad Neighbor Policy : Washington's Futile War on Drugs in Latin America*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Castellanos, Ivan. *Extreme Poverty: Vulnerability and Coping Strategies Among Indigenous People in Rural Areas of Bolivia*. Bonn: Bonn University, 2005.
- Dangl, Benjamin. *The Price of Fire: Resource War and Social Movements in Bolivia*. Edinburgh: AK Press, 2007.
- Drake, Paul W, Hershberg, Erick. *State and Society in Conflict : Comparative Perspective on Andean Crisis*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2006.
- Farcau, Bruce W. *The Chaco War Bolivia and Paraguay, 1932-1935*. Westport Connecticut: Green Wood Press, 1996.
- Fischer, Edward. *Indigenous Peoples, Civil Society, and The Neoliberal State*. Berghamm: Berghamm Books, 2009.
- Gamarra, Eduardo. *Bolivia on The Brink*. New York: Council on Foreign Relation Inc, 2007.
- Merile Grindele, Juan Domingo Pilar. *Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective*. Cambridge: Harvard University Press.
- Habu, Junko, Fawcett, Clare P., dan Matsunaga, John M. *Evaluating Multiple Narratives: Beyond Nationalist, Colonialist, Imperialist Archeologies*. New York: Springer Science and Bussiness Media, 2008.

- Hagopian, Frances, Mainwaring, Scott. *The Third Wave of Democratization in Latin America: Advance and Setbacks*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Hogenboom, Barbara. *Revolutionary Politics: Bolivia New Natural Resource Policy*. Amsterdam: Center For Latin America Research and Documentations, 2009.
- Horowitz, Donald. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press, 1985.
- Klein, Herbert S. *A Concise history of Bolivia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
- , *Bolivia the evolution of multi-ethnic society* (Oxford: Oxford University Press, 1992).
- Kohl, Benjamin, Farthing, Linda. *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*. London: Zed Books, 2006.
- Laclau, Ernesto. *Emancipation*. London: Verso, 1995.
- Lewis, Jane, Ritchie, Jane. *Qualitative Research Practice: A Guide For Social Sciences Students and Researcher*. London: Sage Publications, 2003.
- Leons, Madeline Barbara, Sanabria, Harry. *Coca, Cocaine and the Bolivian Reality*. New York: State University of New York Press, 1997.
- Lucy Avile's Irahola, Denis. *Popular Participation, Decentralization, and Local Power Relation in Bolivia*
- Mac Gregor, Filipe E. *Coca and Cocaine: An Andean Perspective*. West Port: Green Wood Press, 1993.
- Mainwaring, Scott. *The Crisis of Democratic Representation in The Andes*. California: Stanford University Press, 2006.
- Malloy, James, Thorn, Richard S. *Beyond the revolution: Bolivia Since 1952*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1971.
- Marcy, William L., Kamminga, Jorrit. *The Politics of Cocaine: How US Policy Has Created a Thriving Drug Industry in Central and South America*. Chicago: Lawrence Hill Books, 2010.
- Marshall, T.H. *Class, Citizenship and Social Development*. New York: Doubleday, 1964.

- Morales, Walter Q. *A Brief History of Bolivia*. New York: Lexington Associates, 2003.
- Oliviera, Oscar, Lewis, Tom. *Cochabamba!: Water War in Bolivia*. Cambridge: South End Press, 2004.
- O'Neill, Kathleen. *Decentralizing State: Election, Parties and Local Power in Andes*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Petras, James, Veltmeyer, Henry. *Social Movement and State Power :Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London: Pluto Press, 2005.
- Pogosian, Betilde Munoz. *Electoral Rules and Transformation of Bolivian Politics: The Rise of Evo Morales*. New York: Pallgrave Macmillan, 2008.
- Polet, Francois. *The State of Resistance: Popular Struggles in The Global South*. London: Zed Books, 2007.
- Putra, Fadillah, (et al.). *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Averroes Press, 2006.
- Pzeworski, Adam. *Democracy and The Market: Political and The Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Schultz, Jim, Draper, Mellisa. *Dignity and Defiance : Stories From Bolivia Challenge's to Globalization*. California: University of California Press, 2008.
- Serulnikov, Sergio. *Subverting Colonial Authority :Challenges to Spanish Rule in Eighteen-Century Southern Andes*. USA: Duke University Press, 2003.
- Sieder, Rachel. *Multiculturalism in Latin America:Indegenous Rights, Diversity and Democracy*. London: Palgrave Mcmilan, 2002.
- Silva, Eduardo. *Challenging Neoliberalism in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Solimano, Andres. *Political Crises, Social Conflict and Economic Development: The Political Economy of The Andean Region*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc, 2005.
- Stern, Richard J. *Ressistance, Rebellions, and Concioussness in Andean Peasant World, 18<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> Centuries*. Madison: University of Wisconsin Press, 1987.

- Steinberg, Mickael K., Hobbs, Joseph John., Mathewson, Kent. *Dangerous Harvest: Drug Plants and the Transformation of Indigenous Landscape*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Streatfield, Dominic. *Cocaine: An Unauthorized Biography*. New York: Picador, 2001.
- Suyatna, Hempri. *Evo Morales: Presiden Bolivia Menentang Arogansi Amerika*. Jakarta: PT.Mizan Publika, 2007.\
- Thoumy, Francisco. *Illegal Drugs, Economy and Society in the Andes*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2003.
- Triwibowo, Darmawan, Subono, Nur Iman. *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Van Cott, Donna Lee. *From Movement to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- , *Radical Democracy in The Andes* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
- Wassendorf, Katherine. *Challenging Politics: Indegenous Peoples Experiences with Political Party and Elections*. Copenhagen: IWGIA, 2001.
- Yashar, Deborah J. *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and The Post Liberal Challenge*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

## **JURNAL ILMIAH**

- Assies, Willem, Salmana, Ton. "Ethnicity and Politics in Bolivia." *Ethnopolitics*, 4:3 (2005): 269-297.
- Argaranas, F. "The Drug War at the Supply End : The Case of Bolivia." *Latin America Perspective: Neoliberal Policies and Resistance* 24: 5 (1997): 59-80.
- Assies, Willem. "Bolivia: A Gasified Democracy." *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* 76 (2004): 25-43.

- Campbell, L. "Social Structure of The Tupac Amaru Army in Cuzco, 1780." *The Hispanic, American Historical Review* 16:4 (1981) 690-691.
- Castaneda, Jorge. "Latin America's Left Turn.", *Foreign Affairs* 85:3 (2006).
- Chandra, Kanchan. "The Transformation of Ethnic Politics in India: The Decline of Congress and the Rise of the Bahujan Samaj Party in Horshiarpur." *Journal of Asian Studies* 59:1 (2000): 26-61.
- Farthing, Linda, Kathryn, Ledebur. "The Beat Goes On: The US War on Coca." *Nacla Report on the Americas: Report on Bolivia*, pp. 34-41.
- Gisselquist, Rachel M. "Ethnicity, Class, and Party System Change in Bolivia." *Tinkazos* 1:18 (2005).
- Juliana Strobele-Gregore, Bert Hoffman, Andrew Holmes, "From Indio to Mestizo: New Indianist Movement in Bolivia", *Latin American Perspectives*, 21:2 (Spring, 1994).
- Healy, Kevin. "Political Ascent of Bolivia Peasant Coca Leaf Producers." *Journal of Intraamerican Studies and World Affairs* 31:1 (1991): 87-122.
- Hylton, Forest, Thomson, S. "The Chequered Rainbow." *New Left Review* 35 (2005): 41-64.
- Kohl, Benjamin. "Democratizing Decentralization in Bolivia : The Law of Popular Partisipation." *Journal of Planning Education and Research* 23 (2003): 153-164.
- Kohl, Benjamin, Farthing, L. "Less Than Fully Satisfactory Development Outcomes: International Financial Institutions and Social Unrest in Bolivia." *Latin American Perspective* 36:3 (2009): 59-78.
- Lazar, Sian, McNeish, Andrew. "The Millions Return? Democracy in Bolivia at the Start of the Twenty First Century." *Bulletin of Latin America Research* 25:2 (2006).
- Lobina, E. "Cochabamba: Water War." *Focus (PSI) Journal* 7:2 (2003).
- Lichbach, Mark, I. "Contending Theories of Contentious Politics and The Structure-Action Problem of Social Order." *Annual Review of Political Science* 1 (1998): 401-24.
- Madrid, R. (2005). "Critical Debates: Indigenous Party and Democracy in Latin America". *Latin America Politics and Society* 47:4 (2005)161-179.

- Madrid, Raul. "Indigenous Movement and Democracy in Bolivia." *Democratic Governance and The New Left* 2 (2008).
- Patton, James. "Counter Development and Bolivian Coca War." *The Fletcher Journal of Development Studies* 18 (2002).
- Rochlin, James. "Latin America's Left Turn and The New Strategic Landscape: The Case of Bolivia". *Third World Quarterly* 28:7 1327-1342.
- Emir, Sader. "Neoliberalism in Latin America." *New Left Review* 5 (2008).
- Salman, Ton. "The Jammed Democracy: Bolivia's Trouble Political Learning Process." *Bulletin of Latin American Research* 25: 2 (2006): 163- 182.
- Smith, William D. "Multiculturalism, Identity, And The Articulation of Citizenship: The Indian Question Now." *Latin America Research Review* 42: 1 (2007).
- Subono, Nur Iman. "Keterkaitan Gerakan Penduduk Asli (*Indegenous Movement*) dan Kekuatan "Kiri" (*Left*) di Amerika Latin." *Jurnal Sosial Demokrasi* 4:1 (2008).
- . "Perlawanan "Kiri" Amerika Latin Terhadap Amerika Serikat Dalam Era Neoliberalisme." *Jurnal Politika* 2:1 (2006).
- Van Cott, Donna Lee. "Party System Development and Indigenous Populations in Latin America: The Bolivian Case." *Sage Publication* 6:2 (2000).
- . "From Exclusion to Inclusion: Bolivia's 2002 Elections." *Journal of Latin America Studies* 35:4 (2003): 751-776.
- Yashar, Deborah J. "Democracy, Indigenous Movement and the Postliberal Challenge in Latin America." *World Politics* 52:1 (1999): 76-104.

## MAKALAH

- Andersson, Vibekke. "Social Movement and Political Strategy: Cocaleros in Bolivia." *Makalah disampaikan dalam kongres tentang gerakan sosial di masa post-kolonial, pembangunan dan gerakan perlawanan Negara Selatan, Nottingham, 2008*
- Anria, Santiago. "Party Politics and The Bolivian Constituent Assembly: MAS Constraints To Become Dominant Party." *Makalah yang dipublikasikan oleh Universitas Simon Fraser, Kanada, 2008.*

- Arias, Omar, Robles, Marcus (2008) *The Geography of Monetary Poverty in Bolivia: The Lesson of Poverty Maps*
- Arocena, F, Porzecanski, R. (2008). *Ethnic Inequality, Multiculturalism and Globalization: The Case of Brazil, Bolivia and Peru*. makalah disampaikan dalam 38<sup>th</sup> World Congress of the International Institute of Sociology, in Budapest, Hungary.
- Cantellas, Miguel. "The Consolidation of Bolivian Poliarchy, 1985-1997." *Makalah yang dipresentasikan dalam 57th Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chichago, 1999.*
- Cameron, Maxwell A. "Latin America's Turning Left: Parties, Populism And Social Movements In The Post-Neoliberal Era," 2006.
- Cooke, Erick. "Indigenous Parties and Substantive Representation in Bolivia and Ecuador: A Preliminary Assessment." *Makalah yang dipresentasikan dalam Annual Meeting of The Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois, Amerika Serikat, 2008.*
- Cyr, Jennifer M. "The Political Party System and Democratic Crisis in Bolivia: El Sistema de Partidos Politicos, Y La Crisis Democratica En Bolivia." *Makalah yang disampaikan dalam Congreso Espanol de Ciencia Política y de la Administracion: Democracia y Buen Gobierno.*
- Daniel Planas, R. "Too Much Democracy: Party Collapse, Political Outsiders, and The Andean Populist Resurgence." *Makalah yang dipublikasikan oleh Universitas Texas, San Marco, Amerika Serikat.*
- Farah, Douglas. "Into The Abyss: Bolivia Under Evo Morales and The MAS." *Makalah yang dipublikasikan oleh International Assessment and Strategy Center, 2009.*
- George Gray, Molina. "The Crisis in Bolivia: Challenges of Democracy, Conflict and Human Security." *makalah yang dipublikasikan oleh International IDEA*
- Hoberman, Gabriella. "Politics of Dealignment and Etnic Parties in Bolivia." *Makalah disampaikan dalam Konfrensi Nasional MPSA, Palmer House Hotel, Hilton, Chicago, Illinois, 2008.*
- Kohl, Benjamin. "Challenges to Neoliberal Hegemony in Bolivia." *Makalah yang dipublikasikan oleh Geography and Urban Studies, Temple University, Philadelphia, United States, 2006.*



Kruyt, Suzzane. "Beetween Pachakuti and Another World is Possible: Global and Interactions in Social Movement Frames in Bolivia", *makalah yang dipublikasikan oleh Vrije Univesriteit, Amsterdam, Juli, 2006.*

Molina, George Gray. "*Ethnic Politics in Bolivia: Harmony of inequality 1900-2000.*" *Makalah yang dipublikasikan oleh Center For Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, Universitas Oxford, 2007.*

-----". "The Crisis in Bolivia: Challenges of Democracy, Conflict and Human Security." *makalah yang dipublikasikan oleh International IDEA.*

Mojtehezadeh, Sarah. "Indigenous Movements in Bolivia and Mexico: Expanding The Horizons of Democracy." *Makalah yang dipublikasikan oleh Toronto Universitas Toronto, 2007.*

Perreault, Thomas. "Natural Gas, Indigenous Mobilization and Bolivian State," *Makalah yang dipublikasikan oleh United Nation Research Institute for Social Development, Juli, 2008.*

Patch, Richard W. "Bolivia: The Restrained Revolution." *Makalah yang dipresentasikan dalam American Historical Association and The Confrence on Latin America History in New York, Desember, 1960.*

Wiggins, Steve. "Institution and Agricultural Growth in Bolivia and New Zealand." *Makalah yang dipublikasikan oleh Research Programe Consortium for Improving Institutions for Pro-Poor Growth (IPPG), Departement for International Development, 2008.*

## **TESIS**

Boyd, Zachery. "From Saboteur to Politician: Bolivia's Cocalersos of El Chapare." *Master's thesis on resistance and political empowerment of Bolivia's coca growers. 2008*

MccElroy, Kathrine. "The Mobilization of The Left and The Nationalitation of The Hydrocarbon Sector in Bolivia: Bolivia Transition From A Pacted Democracy." *Tesis yang dipublikasikan oleh University British Columbia, Vancouver, 2008.*

Salt, Sandra. "Towards Hegemony: The Rise of Bolivia Indigenous Movements." *Tesis yang dipublikasikan oleh Universitas Simon Frasser, Kanada, 2006.*

Scmidth, Richard J. "Indegenous Competition For Control in Bolivia." *Tesis yang dipublikasikan oleh Naval Post Graduate School, California.*

Webber, Jeffrey. "Red October: Left Indigenous Struggle in Bolivia, 2000-2005."  
*Tesis yang dipublikasikan oleh Universitas Toronto, Kanada, 2009.*

## LAPORAN PUBLIKASI ILMIAH

The National Democratic Institute for International Affairs. *Bolivia Political Party System and Incentive for Pro-Poor Reform Assessment Report and Program Recommendation*, 2004  
[www.accessdemocracy.org/files/1852\\_bo\\_propoor\\_100104\\_full.pdf](http://www.accessdemocracy.org/files/1852_bo_propoor_100104_full.pdf) -

United States. National Institute on Drug Abuse. *Cocaine Used in America : Epidemiologic and Clinical Perspective*, oleh Nicholas J. Kozzel dan Edgar H Adam, 1984. diunduh dalam situs:  
<http://archives.drugabuse.gov/pdf/monographs/61.pdf>

*Institute For Policy Studies, Bolivia's Nationalization: Understanding The Process and Gauging The Result*. Oleh Nadia Martinez, 2007.

Center For Economic and Policy Research. *Bolivia: The Economy During The Evo Morales Administration*. Oleh Mark Weissbrott, Rebecca Ray dan Jake Johnston, 2009.

## SITUS INTERNET

Arias, Omar, Robles, Marcus. "The Geography of Monetary Poverty in Bolivia: The Lesson of Poverty Maps", diunduh dalam situs:  
[http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1092157888460/493860-1192739384563/10412-04\\_p067-089.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1092157888460/493860-1192739384563/10412-04_p067-089.pdf). pada tanggal 9 September 2010, pukul: 19:56 WIB

Aziz, Mahir. "Marx Weber Concept of Plebiscitary Democracy and Liberal Democracy", diunduh dalam situs: <http://www.ulum.nl/a225.html>, pada tanggal September 2010, pukul: 00:52 WIB.

Chandra, Kanchan. "Ethnic Party and Democratic Stability", diunduh pada situs:  
[http://www.nyu.edu/gsas/dept/politics/seminars/chandra\\_f04.pdf](http://www.nyu.edu/gsas/dept/politics/seminars/chandra_f04.pdf)

Fuentes, Federico. "Cocaleros Will Not To Be Eradicated", diunduh dalam situs :  
<http://www.greenleft.org.au/node/31273>, pada tanggal 8 Agustus 2010 pukul 10:05 WIB.

Fuentes, Federico. “Bolivia Communitarian Socialism”, diunduh dalam situs: <http://links.org.au/node/988>, pada tanggal 15 Agustus 2010, pukul: 09:51 WIB.

Mahmoud, Fauzia. “Evo Morales From the Andes: New Vision, New Voices”, diunduh dalam situs: [http://www.watsoninstitute.org/events\\_detail.cfm?id=1127](http://www.watsoninstitute.org/events_detail.cfm?id=1127), pada tanggal 6 Agustus 2010, pukul: 19:12 WIB.

Ursula Duran, “The Defence of Coca as a Source of Political Empowerment”, hlm.3, diunduh dalam situs: [www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2010/217\\_589.pdf](http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2010/217_589.pdf), pada tanggal 5 Januari 2011.

“Who is Evo Morales and What is the MAS ?”, diunduh dalam situs: <http://www.boliviainfoforum.org.uk/inside-page.asp?section=3&page=31>, pada tanggal 13 Agustus 2010, pukul: 13:41 WIB.

“Bolivia National History”, diunduh dalam situs: <http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/bolivia/Bolivia-national-history.htm>, pada tanggal 28 April 2010, pukul: 17:38 WIB.

”The Bolivian National Revolution 1952-1964”, diunduh dalam situs: <http://www.latinamericanstudies.org/bolivian-revolution.htm>, pada tanggal 30 April 2010, pukul: 17:43 WIB.

“Bolivia Radical Reforms: The Bolivia National Revolution, 1952-1964”, diunduh pada situs : <http://www.mongabay.com/history/bolivia/bolivia-radical-reforms-the-bolivian-national-revolution-1952-64.html>, pada tanggal 30 April 2010, pukul: 20:16 WIB.

“Development and Social Statistic in Bolivia”, dalam: <http://www.boliviainfoforum.org.uk/inside-page.asp?section=2&page=3>, diakses tanggal 10 September 2009, pukul 21.14 WIB

“Background Note: Bolivia”, diunduh dalam situs: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35751.htm>, pada tanggal 10 September 2009, pukul 21:20 WIB